



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Samarinda Tahun 2016 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah produk akhir dari SAKIP dan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat bukan sekedar menyatakan bahwa program dan kegiatan telah terlaksana, namun yang terpenting adalah apakah program dan kegiatan pemerintah tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dampak yang mampu membawa perubahan bagi kesejahteraan masyarakat.

SAKIP adalah merupakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana system ini merupakan integrasi dari system perencanaan, system penganggaran dan system pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan system akuntabilitas kinerja.

Substantif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Samarinda memuat informasi yang berkaitan dengan capaian kinerja selama tahun 2016 dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda, serta penjelasan tentang kinerja, capaian dan analisis capaian kinerja.

Dalam memenuhi harapan masyarakat guna terwujudnya Clean Government dan Good Governance. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Samarinda ini tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparatur pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas



Kinerja Instansi Pemerintah Kota Samarinda, akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Samarinda, Maret 2017

WALIKOTA SAMARINDA

H. SYAHARIE JA'ANG.SH,MSi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Bidang Kewenangan	3
C. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB.....	4
D. Laju Inflasi.....	6
E. Indeks Pembangunan Manusia	7
F. Kesempatan kerja	9
G. Aspek Strategik	10
H. Struktur Organisasi	12
I. Tersedianya Sumber Daya Aparatur	15
J. Sarana dan Prasarana	17
K. Sumber Dana	17
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	19
B. Visi Pemerintah Kota Samarinda.....	19
C. Misi Pemerintah Kota Samarinda	21
D. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	32
D. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	36
E. Prioritas Utama Pembangunan Daerah.....	38
G. Perjanjian Kinerja Tahun 2016.....	42
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	50
B. Realisasi Anggaran.....	83
BAB. IV PENUTUP.....	110

Lampiran- Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
2. Pengukuran Kinerja tahun 2016

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.1. Perkembangan PDRB Thn 2011-2016.....	5
Tabel 1.1.2. Perkembangan Laju Inflasi	7
Tabel 1.1.3. Angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi	9
Tabel 1.1.4. Jumlah PNS Pemerintah Kota Samarinda.....	16
Tabel 1.1.5. Sarana dan Prasarana	17
Tabel 1.1.6. Belanja Kota Samarinda Tahun 2016	18
Tabel 1.2.1 Evaluasi Pencapaian Sasaran Pertama	52
Terlaksananya Pengendalian Banjir dan Relokasi Tepian SKM Optimalisasi penataan	
Tabel 1.2.2. Evaluasi Pencapaian Sasaran Kedua	54
Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Sehat dan Kota Bebas Narkoba	
Tabel 1.2.3. Evaluasi Pencapaian Sasaran Ketiga.....	58
Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas	
Tabel 1.2.4. Evaluasi Pencapaian Sasaran Keempat.....	61
Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah	
Tabel 1.2.5. Evaluasi Pencapaian Sasaran Kelima	62
Fasilitasi bagi santri dari keluarga tidak mampu di pesantren	
Tabel 1.2.6. Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis Keenam	62
Meningkatnya infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota	
Tabel 1.2.7. Evaluasi Pencapaian Sasaran ketujuh.....	65
Meningkatnya kapasitas & distribusi air bersih	
Tabel 1.2.8. Evaluasi Pencapaian Sasaran kedelapan.....	66
Tercapainya kebersihan, keindahan & kota ramah lingkungan (taman & RTH	
Tabel 1.2.9. Evaluasi Pencapaian Sasaran Kesembilan.....	69
Meningkatnya perekonomian melalui investasi swasta dan pasar tradisional	
Tabel 1.2.10. Evaluasi Pencapaian Sasaran kesepuluh.....	71
Meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM dan Koperasi, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan serta jawa usaha jasa lainnya	



Tabel 1.2.11. Evaluasi Pencapaian Sasaran Kesebelas.....	74
Meningkatnya sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana	
Tabel 1.2.12. Evaluasi Pencapaian Sasaran Keduabelas.....	76
terwujudnya pengembangan seni budaya, peran dan prestasi pemuda, pemsayarakatan olah raga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan dan keluarga	
Tabel 1.2.13. Evaluasi Pencapaian Sasaran ketigabelas.....	81
Tercapainyastabilitas keamanan dan ketertiban serta iklim yang kondusif	
Tabel 1.2.14. Evaluasi Pencapaian Sasaran keempatbelas.....	82
Meningkatnya pendapatan & pengelolaan keuangan	
Tabel 1.2.15. Evaluasi Pencapaian Sasaran kelimabelas.....	83
terwujudnya pelayanan public berkualitas, transparan, akuntabel dan bebas korupsi	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban Pemerintah Kota Samarinda menuju Good Governance dan clean government itulah maka Pemerintah Kota Samarinda berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk kegiatan Tahun 2016 yang merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Samarinda. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun atas dasar Instruksi Presiden RI nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta sesuai dengan Peraturan Presiden RI nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Good governance dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang efektif dan murah serta birokrasi yang tidak berbelit-belit , sedangkan praktek terbaiknya disebut good governance (kepemerintahan yang baik). Agar good governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, pengusaha (private sektor) dan masyarakat. Good governance yang baik adalah adanya koordinasi yang baik dan sinergitas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggaraan pemerintahan merupakan tantangan tersendiri.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.



Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 bahwa setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah** kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodek setiap akhir tahun.

Bertitik tolak dari RPJMD Kota Samarinda tahun 2016 – 2021, RKPD Kota Samarinda tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah, maka pelaporan kinerja pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator kinerja dengan penjelasan yang memadai atas pencapa indikator kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Samarinda yang merupakan laporan penyelenggaraan pemerintah oleh Walikota kepada Presiden telah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil pencapaian sasaran indikator kinerja pada tahun 2016.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Samarinda tahun 2016 didasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu :

1. TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari KKN
2. Undang-UNdang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RPJMD Kota Samarinda tahun 2011 – 2015;
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang APBD Kota Samarinda
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor , 8, 9, Tahun 2011 tentang SOTK Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2012 tentang SOTK Lembaga Daerah Kota Samarinda ;
11. Perda Kota Samarinda Nomor 13 dan 14 Tahun 2008) dan Pemekaran Kecamatan (Perda Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2010)
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

1.2. Bidang Kewenangan

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 12 disebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibagi menjadi 2 yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan
6. Sosial

Sedangkan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar adalah:

1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana
7. Perhubungan



8. Komunikasi dan Informatika
9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10. Penanaman Modal
11. Kepemudaan dan Olah Raga
12. Persandian
13. Perpustakaan dan
14. Kearsipan

Untuk urusan pemerintahan pilihan adalah :

1. Kelautan dan dan Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian dan
8. Transmigrasi

1.3.Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah merupakan indikator utama dalam melihat perkembangan perekonomian secara series sebagai pembanding antara nilai absolut perekonomian (PDRB atas dasar harga berlaku) dan distribusi nilai PDRB. Pertumbuhan ekonomi menjadi sebuah potret pembangunan perekonomian suatu daerah dengan membandingkan perencanaan pembangunan perekonomian antar waktu. Pembangunan ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai proses kenaikan output (tergantung dari jenis output yang diharapkan/ditetapkan) dalam jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda berjalan cukup fluktuatif dimana dalam kurun waktu lima tahun terakhir memiliki range pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Peningkatan signifikan pertumbuhan perekonomian terjadi pada tahun 2011 yang mencapai 15,71 persen. Namun, pertumbuhan yang tinggi tersebut tidak bertahan lama karena pada tahun 2012, terjadi perlambatan ekonomi hingga mencapai 0,50 persen. Pada tahun-tahun setelahnya, terjadi fluktuasi pertumbuhan ekonomi hingga pada tahun terakhir Kota Samarinda mengalami pertumbuhan ekonomi hanya 0,01 persen. Lambatnya pertumbuhan ekonomi

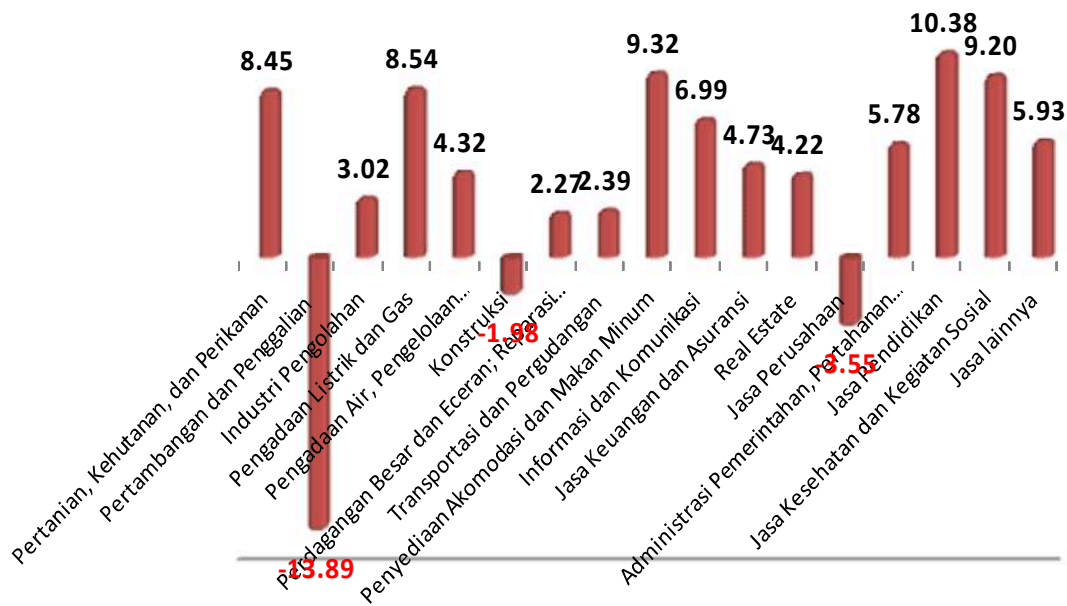


bukan hanya dirasakan oleh Kota Samarinda saja, namun dirasakan juga oleh Provinsi Kaltim yang mengalami pertumbuhan -1,75% atau dengan kata lain ada penurunan PDRB dari tahun 2014.

Tabel. 1.1.1
Perkembangan PDRB Tahun 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Rp. Juta)	41.648.707,27	41.242.817,59	44.824.302,00	48.250.237,00	51.195.737,00
Jumlah Penduduk (jiwa)	756.697	764.908	781.015	797.006	812.597
PDRB per kapita (Rp/jiwa)	55.040.137,95	53.918.664,19	57.392.370,18	60.539.364,82	63.002.616,30

Sumber Data : BPS , Samarinda dalam angka Tahun 2016



Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Lapangan Usaha
Kota Samarinda, 2015

Sumber: Data diolah, 2016



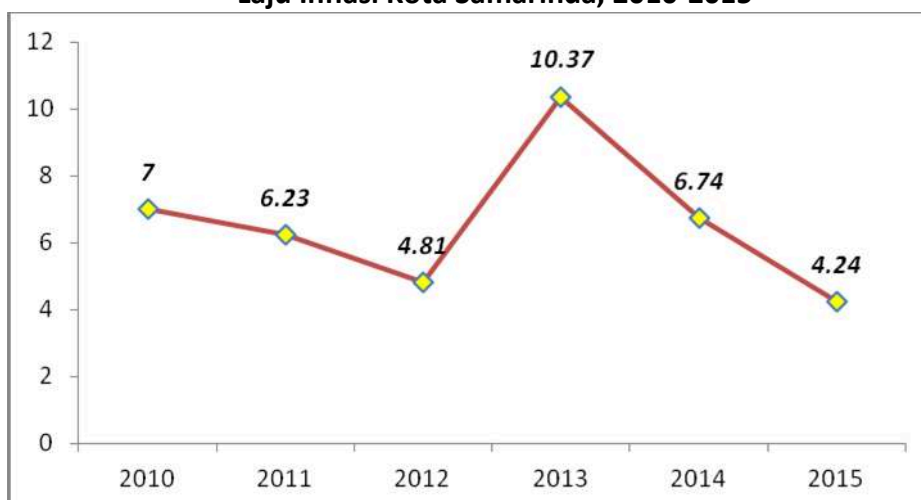
Jika dijabarkan berdasarkan sektor lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi sektoral terbesar berada pada sektor jasa-jasa (13,81 persen). Sedangkan pada sektor dominan PDRB yakni sektor perdagangan, hotel, dan restoran juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi yakni mencapai 10,91 persen. Selain itu, sektor lain yang cukup tinggi pertumbuhannya dan menjadi sorotan karena perannya dalam menciptakan degradasi lingkungan adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian dimana meskipun kontribusi terhadap PDRB mengalami penurunan setiap tahunnya, tetapi pertumbuhan ekonomi sektoralnya masih mampu menembus angka 11,26 persen pada tahun 2014.

Pertumbuhan ekonomi paling kecil dialami pada sektor listrik, gas dan air bersih (0,76 persen), industri pengolahan (1,17 persen), dan konstruksi (2,28persen) yang memiliki pertumbuhan ekonomi jauh di bawah 5 persen.

1.4.Laju Inflasi

Laju inflasi sangat penting dalam mengkaji gambaran perekonomian Kota Samarinda terutama dalam melihat stabilitas harga barang dan jasa secara umum dan mikro dari waktu ke waktu. Sebagai salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda memiliki laju inflasi yang sangat fluktuatif yang mengindikasikan terjadinya gejolak harga yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2015, laju inflasi Kota Samarinda mencapai 4,24 persen dimana pada tahun sebelumnya lebih tinggi yakni mencapai 6,74 persen.

Laju Inflasi Kota Samarinda, 2010-2015



Sumber: Data diolah, 2016



Penyebab laju inflasi tahun 2015 di Kota Samarinda tertinggi adalah Kelompok Transportasi dan Komunikasi; selanjutnya Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau; serta Kelompok Perumahan. Perhatikan tabel berikut :

Tabel 1.1.2.
Perkembangan Inflasi Tahun Kalender
Kota Samarinda, 2015

Kelompok	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
Bahan Makanan	3,78	5,42	4,67	8,69
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	9,93	10,88	7,64	10,27
Perumahan	5,88	6,33	1,22	1,86
Sandang	0,89	1,96	-0,22	-0,09
Kesehatan	4,82	4,22	3,09	3,93
Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	3,87	3,83	3,34	4,56
Transport dan Komunikasi	6,57	6,22	-3,37	-1,98
Umum	5,65	6,48	6,87	4,24

Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2016

1.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat dan horizontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah sendiri akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketrampilan serta mampu mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia perlu adanya pemotretan hasil pembangunan manusia yang sudah dilakukan guna evaluasi perbaikan ke depannya

Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda Tahun 2011 - 2015

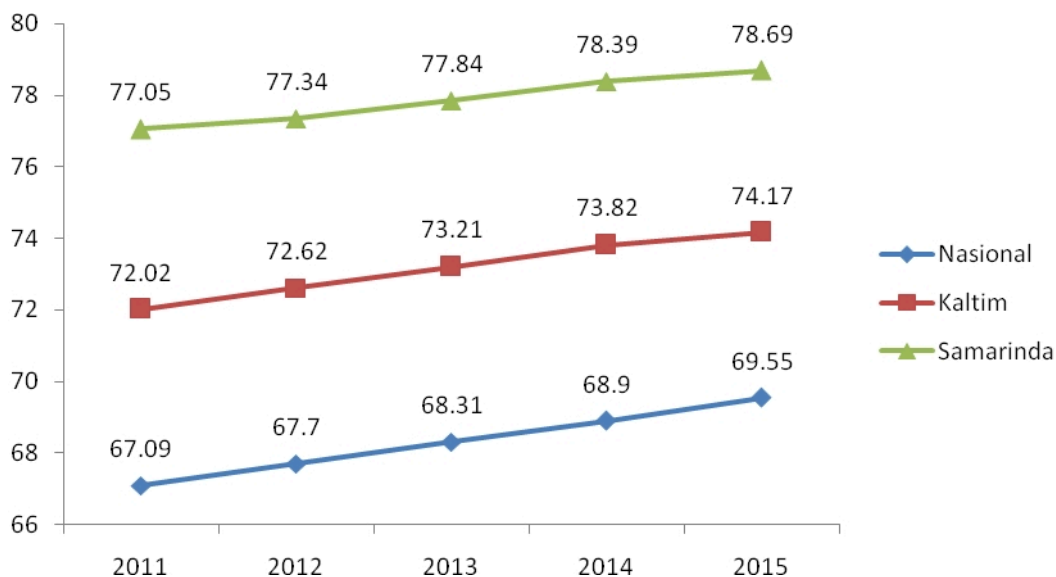
Tahun	IPM
2011	77,05
2012	77,34
2013	77,84



2014	78,39
2015	78,69

Sumber: Data diolah, 2016

Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda 2011-2015



Sumber: Data diolah, 2016

Indeks Pembangunan Manusia Kota Samarinda Tahun 2011 - 2015

Tahun	IPM
2011	77,05
2012	77,34
2013	77,84
2014	78,39
2015	78,69

Sumber: Data diolah, 2016

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Samarinda mengalami peningkatan progresif dari tahun ke tahun hingga mencapai indeks sebesar 78,39 pada tahun 2014. Namun perlu diketahui bahwa IPM ini merupakan angka makro pembangunan secara umum dan perlu tindak lanjut serius dalam pembangunan kesejahteraan manusia secara mikro agar pembangunan daerah berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Timur, IPM Kota Samarinda



menduduki peringkat kedua setelah IPM Kota Bontang yang mencapai indeks 78,58 pada tahun yang sama.

1.6. Kesempatan Kerja (Rasio penduduk yang bekerja)

Dalam menjalankan kehidupannya, setiap individu membutuhkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itulah, masyarakat perlu mendapatkan pekerjaan sebagai sarana mendapatkan penghasilan. Terdapat berbagai macam cara untuk mendapatkan penghasilan yakni dengan bekerja sebagai karyawan/buruh/pegawai di suatu perusahaan, usaha mandiri, maupun kantor, atau dapat pula membuka lapangan usaha sebagai wirausaha/pengusaha.

Tabel 1.1.3.

Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Kota Samarinda, Tahun 2015

Golongan Umur	Angkatan Kerja		Jumlah
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	1.971	0	1.971
Tidak/Belum Tamat SD	28.913	151	29.064
Sekolah Dasar	47.565	1.977	49.542
Sekolah Menengah Pertama	58.895	5.780	64.675
Sekolah Menengah Atas	89.942	6.850	96.792
Sekolah Menengah Atas Kejuruan	64.039	3.163	67.202
Diploma I/II/III/Akademi	10.228	477	10.705
Universitas	42.314	2.044	44.358
Jumlah	343.867	20.442	364.309

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka, 2016



1.7. Aspek Strategik Kota Samarinda

Kota Samarinda mempunyai luas wilayah 718.000 KM² dengan letak Geografis antara: 0°20'18" ± 1°09'16" LS dan 116°15'36" ± 117°24'16" BT, secara Administratif Kota Samarinda memiliki Batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak dan Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Loa Janan dan Kec Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara

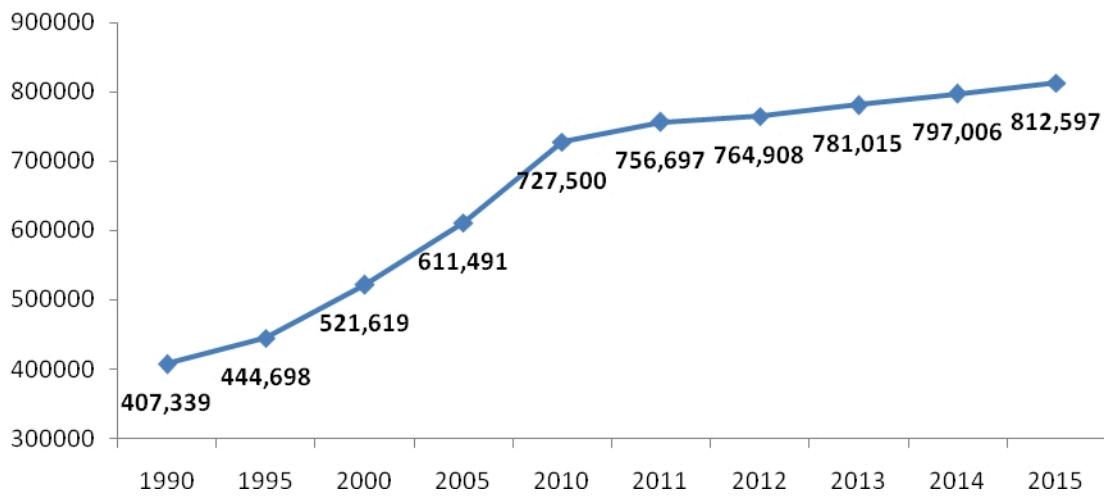
Laju pertumbuhan dan dominasi perekonomian yang di dominasi oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor jasa-jasa dalam perekonomian Kota Samarinda, memberikan efek langsung terhadap pertumbuhan penduduk yang sebagian besar disebabkan oleh migrasi penduduk. Hal tersebut dikarenakan, kedua sektor tersebut memberikan dampak positif dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Samarinda yang mencapai 28,92 persen tenaga kerja di sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta 22,84 persen tenaga kerja di sektor jasa-jasa. Berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk oleh Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, jumlah penduduk tahun 2015 sebesar 812.597 jiwa dengan kepadatan mencapai 1.134 jiwa/km².

Penduduk Kota Samarinda mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam sepuluh tahun terakhir. Dari rekapitulasi jumlah penduduk pada tahun 1990-2015, tercatat pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 19,72 persen dari tahun 2009 yang ketika itu masih sebesar 607.675 jiwa menjadi 727.500.

Peningkatan jumlah penduduk yang pesat dari tahun ke tahun ini menandakan Kota Samarinda memiliki banyak daya tarik bagi para penduduk di luar daerah, khususnya daya tarik bagi investasi maupun peluang sektor perdagangan. Kondisi ini pula semakin mengukuhkan peran Kota Samarinda sebagai kota jasa.



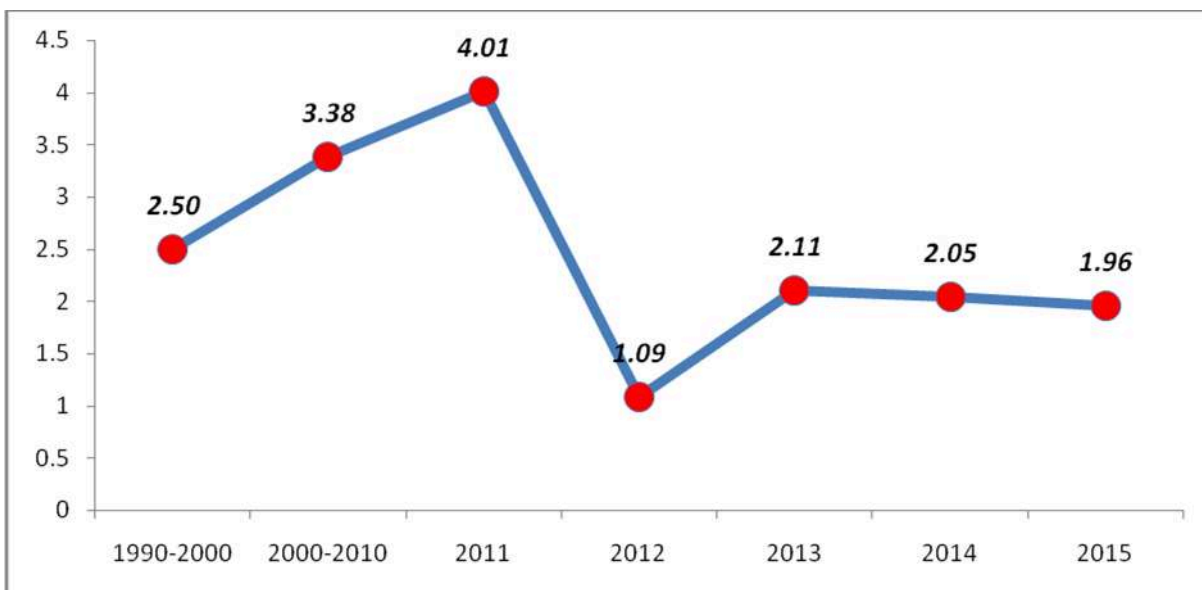
Jumlah Penduduk Kota Samarinda Tahun 1990-2015



Sumber: Data diolah, 2016

Sedangkan secara khusus, angka pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2010 terjadi sebagai koreksi berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010. Bahkan tercatat di tahun 2013 ada 1 wilayah kecamatan yang mengalami penurunan jumlah penduduk yang disebabkan karena adanya perpindahan penduduk antar wilayah dalam kota dan luar kota

Pertumbuhan Penduduk Kota Samarinda Tahun 1990-2015



Sumber: Data diolah, 2016



1.8. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah, sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah (Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang SOTK Sekretariat Daerah Kota Samarinda)

Sekretariat Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah kabupaten, serta mempunyai fungsi perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga daerah; penyelenggaraan administrasi pemerintahan; pembina pegawai negeri sipil daerah; pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagai berikut :

a. Sekretaris Daerah

- 1) Asisten Pemerintah dan Hukum membawahi:
 - (a) Bagian Hukum;
 - (b) Bagian Pemerintahan Umum
 - (c) Bagian Kerjasama
 - (d) Bagian Perkotaan
- 2) Asisten Kesejahteraan dan Kemasyarakatan, membawahi :
 - (a) Bagian Kesejahteraan;
 - (b) Bagian Humas dan Protokol
- 3) Asisten Administrasi Pembangunan , membawahi :
 - (a) Bagian Perekonomian ;
 - (b) Bagian Pembangunan
- 4) Asisten Administrasi dan Umum membawahi :
 - (a) Bagian Organisasi;
 - (b) Bagian Penatausahaan Keuangan
 - © Bagian Umum

b) Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat secara teknis operasional berada dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas memberikan



pelayanan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta mempunyai fungsi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD; menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD; mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

1) Dinas Daerah(Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang SOTK Dinas Daerah)

Dinas Daerah berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah yang bertugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, serta mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; pemberian perizinan pelaksanaan pelayanan umum; pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011, Dinas Daerah adalah:

- (1) Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
- (3) Dinas Pendidikan.
- (4) Dinas Perhubungan.
- (5) Dinas Bina Marga dan Pengairan.
- (6) Dinas Perikanan dan Peternakan.
- (7) Dinas Pertambangan dan Energi.
- (8) Dinas Tenaga Kerja.
- (9) Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kominfo.
- (10) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (11) Dinas Pendapatan Daerah
- (12) Dinas Koperasi dan UKM.
- (13) Dinas Cipta Karya dan Tata Kota.
- (14) Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (15) Dinas Pemuda dan olah Olah Raga.
- (16) Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (17) Dinas Kesejahteraan Sosial.
- (18) Dinas Pasar.
- (19) UPTD Dinas

2) Lembaga Teknis Daerah (Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua atas Perda Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah



Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, yang dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah. Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah, serta mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 , Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

- (1) Inspektorat Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- (3) Badan Litbang dan Diklat.
- (4) Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
- (5) Badan Kesbang, dan Politik .
- (6) Badan Lingkungan Hidup.
- (7) Badan Penanaman Modal Daerah.
- (8) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.
- (9) Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (10) Badan Penanggulangan Bencana
- (11) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah .
- (12) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.
- (13) Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah.
- (14) Badan Pengelolaan Keu. dan Aset Daerah .
- (15) BNK (Perda Nomor 15 Tahun 2008)
- (16) RSUD IA Moeis.
- (17) UPTB.

3) atuan Polisi Pamong Praja (Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2012)

Satuan Polisi Pamong Praja berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah yang bertugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan atau ketentuan daerah lainnya, serta mempunyai fungsi penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum; penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan atau ketentuan daerah lainnya; pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah; pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan atau Ketentuan Daerah lainnya; pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan



atau aparatur lainnya; pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan atau Ketentuan Daerah lainnya.

4) 10 Kecamatan dan 59 Kelurahan (Perda Kota Samarinda Nomor 13 dan 14 Tahun 2008) dan Pemekaran Kecamatan (Perda Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2014)

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kota Samarinda yang mempunyai wilayah tertentu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota Samarinda, yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah. Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Disamping itu juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah meliputi: mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan; mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan; melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Sedangkan Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kota Samarinda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu juga melaksanakan tugas meliputi: pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; pemberdayaan masyarakat; pelayanan masyarakat; penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

1.9. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Untuk mendukung program/kegiatan yang bertujuan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda diperlukan dukungan tenaga birokrasi. Pada Tahun 2015 Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Samarinda sebanyak 10.150 orang.



Tabel : 1.1.4

Jumlah PNS berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin setiap SKPD

No	SKPD	Golongan				Jlh	Gender	
		I	II	III	IV		L	P
1	Sekretariat Daerah	7	109	113	37	263	174	89
2	Sekretariat DPRD	2	24	34	4	64	38	26
3	Sekretariat DPD Korpri	0	2	5	1	8	6	2
4	KPU	0	6	7	2	15	5	10
5	Badan KB dan KS	0	12	31	8	51	18	33
6	BKD	0	17	27	4	48	33	15
7	Badan KesbangPol	0	24	25	13	62	34	28
8	Badan Ketahanan Pangan dan PP	0	19	72	14	105	73	32
9	BLH	0	10	40	8	58	35	23
10	BNK	0	5	4	2	11	5	6
11	BTPSP	2	24	20	5	51	30	21
12	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Permp	0	7	15	6	28	6	22
13	BPMD	0	9	18	10	37	22	15
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29	120	29	6	184	172	12
15	BPKAD	0	17	24	12	33	14	47
16	Bappeda	0	7	48	12	67	45	22
17	Dinas Bina Marga dan Pengairan	3	42	51	4	100	74	26
18	Dinas Cipta Karya dan Tata Kota	5	56	52	4	117	95	22
19	Dinas Kebersihan dan Pertaman	2	30	38	6	76	57	19
20	Disbudpar dan Kominfo	2	24	38	10	74	42	32
21	Dinas Kesehatan/PKM	11	211	439	25	208	471	679
22	Dinas Kessos	0	5	20	7	32	21	11
23	Dinas Koperasi dan UKM	0	13	34	9	56	32	24
24	Dinas Pasar	14	69	32	6	121	94	27
25	Dinas Pemuda dan Olahraga	2	22	17	5	46	30	16
26	Dinas Pendapatan Daerah	3	110	88	8	209	108	101
27	Dinas Pendidikan	19	493	1.958	3.142	2.272	3340	5.612
28	Dispenduk dan Capil	2	18	37	8	65	35	30
29	Dinas Perhubungan	6	108	75	9	198	164	34
30	Disperindag	0	21	32	10	63	36	17
31	Distambang dan Energi	0	17	31	6	54	39	15
32	Dinas Pertanian ,Perkebunan & Keh.	3	15	71	6	95	54	41
33	Disnaker	1	18	38	10	67	48	19
34	Inspektorat Daerah	0	12	28	9	49	32	17
35	Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip	0	11	9	1	21	9	12
36	Kantor Satpol PP	3	66	23	5	97	81	16
37	RSUD IA Moeis	0	92	43	5	140	45	95



38	Kecamatan dan Kel	18	310	513	29	509	361	870
	Jumlah	135	220 3	4.355	3.45 7	4.884	5.266	10.150

1.10. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana aset operasional yang terkait langsung dengan kegiatan pemerintahan berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya pada tahun 2016 Pemerintah Kota Samarinda melalui SIMDA BARANG tercatat dalam Neraca sebesar Rp. 11.773.446.670.931,60 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1.5.

No	Bidang	Nilai Aktiva (Rp)
1	Tanah	5.432.260.426.632,00
2	Peralatan dan Mesin	808.149.170.696,18
3	Gedung dan Bangunan	1.823.569.982.808,23
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.783.888.412.212,77
5	Aset tetap lainnya	17.749.982.460,49
6	Kontruksi Dalam Pengerjaan	2.454.995.734.677,00
7	Aset Lainnya	205.546.816.028,43
8	Aset lancar	364.184.000.371,04
9	Investasi jangka panjang	438.762.649.529,67
	Akumulasi penyusutan	(2.486.121.098.222,43)
	Total Nilai Asset 2016	11.842.986.077.193,40

1.11. Sumber Dana

Guna pembiayaan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kota Samarinda pada tahun anggaran 2016 dana yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 2.624.916.838.977,28 terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Operasi) sebesar Rp.1.871.664.295.308,24-dan Anggaran Belanja Langsung (Belanja modal) sebesar Rp.750.252.543.669,04 dan Belanja Tak terduga sebesar Rp. 3.000.000.000,-



Tabel : 1.1.6.

Belanja Kota Samarinda Tahun 2016 :

No	Uraian	Alokasi	
I	<u>Belanja Operasi</u>		
		Rp.	1.139.637.468.920,90
1.	Belanja Pegawai	Rp.	694.710.060.397,34
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	
3.	Belanja Bunga	Rp.	35.550.825.905,00
4.	Belanja Hibah	Rp.	-
5.	Belanja Bantuan Sosial	Rp.	1.765.940.085,00
6.	Belanja Bantuan Keu Kpd Prov/Kab/Kota		1.871.664.295.308,24-
	Jumlah Belanja Operasi		
		Rp.	750.252.543.669,04
II	Belanja Modal	Rp.	3.000.000.000,00
III	Belanja Tak Terduga	.	
		Rp.	
Total Belanja		Rp.	2.624.916.838.977,28

Sumber data : BPKAD Kota samarinda per 27 Maret 2016



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Rencana Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis local, nasional, global dan tetap dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI, oleh karena itu pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan LKjIP Pemerintah Kota Samarinda tahun 2016 ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RPJMD tahun 2016 – 2021, Peraturan Walikota Samarinda tentang RKPD tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Program dan Kegiatan Daerah. RPJMD secara sistematis yang mengedepankan isu-isu local, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016 merupakan awal pelaksanaan RPJMD Tahun 2016– 2021.

A. Visi Pemerintah Kota Samarinda

Dalam periode 2016-2021 Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 adalah :



“TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA METROPOLITAN YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”

Sehingga diharapkan seluruh stake holder yang ada di Kota Samarinda bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya khususnya kepada seluruh SKPD terkait untuk menyelaraskan dan mensinergikan program-program yang dimilikinya dalam mewujudkan visi RPJMD Kota Samarinda 2016-2021.

PENJELASAN VISI

Sejalan dengan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam lima tahun masa pembangunan Kota Samarinda adalah terwujudnya Kota Samarinda sebagai kota metropolitan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Makna yang paling besar yang terdapat dalam Visi ini adalah **Kota Samarinda sebagai Kota Metropolitan**. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan disekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.

Menetapkan Kota Samarinda sebagai Kota Metropolitan merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditengah-tengah pertumbuhan penduduk yang pesat, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali. Aspek-aspek pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus pemerintah Kota Samarinda terdiri atas aspek inti (sosial, ekonomi, lingkungan) dan aspek pendukung (*Good Governance*, keuangan daerah) dengan Kota Cerdas (*Smart City*) sebagai pondasi dalam pencapaiannya sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kota Samarinda 2005-2025. Oleh karena itu, metropolitan yang diharapkan dapat terwujud di Kota Samarinda dapat dilihat berdasarkan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan.

Penjelasan dua pokok pembangunan sebagai visi pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kota Metropolitan yang berdaya saing

Kota Metropolitan yang berdaya saing memberi pandangan bahwa Kota Samarinda pada lima tahun mendatang berupaya untuk menyelaraskan antara aspek ekonomi dan aspek sosial dalam pembangunan berkelanjutan dan mengusahakan untuk keduanya berjalan secara komprehensif.



Daya saing tidak hanya berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, fokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek sosial hanya akan menyebabkan ketimpangan dan kesenjangan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran, sehingga pada akhirnya menurunkan kualitas pertumbuhan itu sendiri. Sedangkan apabila pembangunan kota hanya di fokuskan pada pembangunan manusia saja tanpa diimbangi dengan pembangunan ekonomi maka akan menyebabkan roda perekonomian bergerak lambat, bahkan cenderung tidak berputar karena minimnya investasi swasta sebagai penyerap sumber daya manusia.

Kota Metropolitan yang berdaya saing pada intinya adalah upaya pemerintah Kota Samarinda untuk meningkatkan kontribusi sektor jasa, yang merupakan sektor tersier setelah pertanian (primer) dan manufaktur (sekunder), melalui ekonomi kerakyatan yang digerakkan oleh masyarakat kota yang sehat, cerdas, berkualitas dan berkarakter. Kolaborasi ini diharapkan kedepannya dapat menekan angka pengangguran dan angka kemiskinan, sehingga pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM secara bersama-sama memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Samarinda.

2. Kota Metropolitan yang berwawasan lingkungan

Kota metropolitan yang berwawasan lingkungan mengedepankan aspek lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan aspek lingkungan di Kota Samarinda ditujukan untuk menciptakan tatanan lingkungan yang nyaman sebagai penunjang produktivitas masyarakat ditengah-tengah pertumbuhan fisik kota sebagai dampak pembangunan ekonomi.

Kota metropolitan yang berwawasan lingkungan menjadi dasar pemerintah Kota Samarinda untuk terus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik publik maupun privat yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas udara. Selain itu, kota metropolitan berwawasan lingkungan dijadikan prinsip pembangunan baik pembangunan yang berasal dari masyarakat, swasta maupun dari pemerintah sendiri, sehingga jangan sampai pembangunan yang dilaksanakan justru merusak kualitas air, tanah dan udara. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah Kota Samarinda untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan hidup agar pembangunan yang dilakukan sekarang dapat pula dirasakan oleh generasi yang akan datang.

B. MISI

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021, dirumuskan 6 misi sebagai berikut :



- 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bebas Korupsi Ditunjang Aparatur Yang Berintegritas Tinggi, Profesional dan Inovatif**
- 2. Memantapkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Kota Samarinda Yang Akuntabel Dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan**
- 3. Mewujudkan Ruang Kota Yang Layak Huni**
- 4. Memantapkan Sektor Jasa dan perdagangan Sebagai Sektor Unggulan**
- 5. Mewujudkan Masyarakat Kota Samarinda Yang Berkarakter, Sehat, Cerdas Serta Berdaya Saing Nasional Dan Internasional**
- 6. Mewujudkan Iklim Kehidupan Masyarakat Kota Samarinda Yang Harmoni, Berbudaya Dan Religius**

Penjelasan masing-masing dari arahan misi di atas diuraikan sebagai berikut

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bebas Korupsi Ditunjang Aparatur Yang Berintegritas Tinggi, Profesional dan Inovatif

Pemerintahan yang baik merupakan kebutuhan dasar dalam mengungkit kesuksesan pembangunan di berbagai sektor. Pemerintah Kota Samarinda berupaya untuk menerapkan 14 prinsip pemerintahan yang baik sebagai berikut :

- 1) Wawasan ke Depan
- 2) Keterbukaan dan Transparansi
- 3) Partisipasi Masyarakat
- 4) Tanggung Gugat
- 5) Supremasi Hukum
- 6) Demokrasi
- 7) Profesionalisme dan Kompetensi
- 8) Daya Tanggap
- 9) Keefisienan dan Keefektifan
- 10) Desentralisasi
- 11) Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat
- 12) Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan
- 13) Komitmen pada Lingkungan Hidup
- 14) Komitmen Pasar yang Fair



Gambaran perilaku pemerintah terlihat dari perilaku aparaturnya sebagai penggerak roda pemerintahan. Oleh karena itu, dalam proses perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Samarinda, harus dimulai terlebih dahulu dengan menyiapkan aparatur yang berintegritas, profesional dan inovatif kemudian diikuti dengan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan sehingga menjadi sebuah sistem dalam pelayanan prima. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kepastian hukum dan akuntabilitas yang tinggi.

Tata kelola pemerintahan yang baik yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Samarinda tidak hanya berhenti pada aparatur dan kelembagaan, namun lebih jauh lagi adalah menerapkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik melalui pengembangan IPTEK. Kolaborasi antara kualitas aparatur, kelembagaan, dan teknologi yang tinggi inilah merupakan gambaran Smart Government yang dipersiapkan oleh pemerintah Kota Samarinda dalam mendukung Kota Metropolitan.

2. Memantapkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Kota Samarinda Yang Akuntabel Dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan

Dalam pasal 58 Undang Undang nomor 1 tahun 2004 disebutkan "dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Dan pada ayat 2 disebutkan bahwa sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Kota Samarinda Yang Akuntabel Dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan dilakukan melalui beberapa upaya yakni:

1. Peningkatan dan menggali sumber pendapatan daerah berdasarkan azas proporsionalitas, adil dan merata;
2. Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan pembangunan sebagai bagian dari deregulasi dalam pengembangan pelayanan publik ;
3. Pemanfaatan dana secara efisien dan produktif yang didasarkan pada pendekatan hasil/output dengan dilandasi azas manfaat ;
4. Peningkatan pengelolaan aset pemerintah kota untuk meningkatkan PAD dan peningkatan pelayanan publik ;



5. Pengelolaan keuangan secara transparan dalam meningkatkan akuntabilitas publik.

3. Mewujudkan Ruang Kota Yang Layak Huni

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Kemudian untuk mewujudkan Kota Samarinda yang Layak Huni diperlukan Perencanaan Tata Ruang Komprehensif berbasis Ekologis yang didefinisikan sebagai berikut: “Perencanaan yang mempertimbangkan kondisi keanekaragaman hayati, kapasitas atau daya dukung lingkungan serta kondisi sosial-ekonomi yang mempengaruhi kawasan. Kemudian di dalam prosesnya perencanaan infrastruktur lainnya seperti tata air, transportasi masal, pengelolaan limbah dan sampah, konservasi energi, dan lain-lain harus diintegrasikan. Serta melibatkan peran serta para pemegang kepentingan (stakeholders) dalam penentuan tata ruang tersebut.”

Adapun gambaran ruang Kota Samarinda yang layak huni kedepannya harus memenuhi aspek berikut :

1. Ekonomi

- Transportasi umum yang memadai dan mudah ditemukan untuk mendukung produktivitas masyarakat

2. Sosial

- Tersedianya fasilitas umum dan sosial yang memadai bagi setiap orang

3. Lingkungan

- Minimnya bencana sehingga memberikan kenyamanan kepada penghuninya
- Terbebas dari polusi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai (air bersih, sampah, limbah, dll).
- Mengurangi dampak pembangunan berupa emisi gas rumah kaca, urban sprawl, pemborosan sumber daya alam dan perusakan alam.

4. Memantapkan Sektor Jasa dan perdagangan Sebagai Sektor Unggulan

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan sesuatu yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Dampak langsung dari ketimpangan antarwilayah adalah terjadinya



kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ketimpangan pembangunan antar wilayah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun formulasi kebijakan pembangunan.

Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat karena peningkatan pembangunan daerah tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk secara merata. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, pendidikan, dan berbagai modal lainnya. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk adalah rasio Gini dengan analisis semakin mendekati angka 1 nilai rasio, maka semakin tidak merata pendapatan penduduknya.

Pengembangan dan pembangunan kawasan perdagangan dan jasa merupakan konsep dasar yang menjadi andalan Pemerintah Kota Samarinda. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan sumber daya yang dimiliki Kota Samarinda yang bertitik tolak pada sektor jasa dan perdagangan. Pengembangan dan pembangunan kawasan jasa dan perdagangan menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup serta memperkecil ketimpangan kesejahteraan antar wilayah.

5. Mewujudkan Masyarakat Kota Samarinda Yang Berkarakter, Sehat, Cerdas Serta Berdaya Saing Nasional Dan Internasional

Keberhasilan suatu bangsa atau daerah sangat erat kaitannya dengan keunggulan sumberdaya manusia. Melihat pengalaman di negara-negara yang telah maju termasuk di kawasan Asia memperlihatkan bahwa kualitas SDM yang dimiliki memungkinkan suatu bangsa atau daerah tersebut untuk mampu secara efisien menerapkan dan mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan produktivitas tinggi.

Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global sehingga masyarakat Kota Samarinda harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan masyarakat Kota Samarinda yang berkarakter, sehat, cerdas, serta berdaya saing nasional dan internasional menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini.



6. Mewujudkan Iklim Kehidupan Masyarakat Kota Samarinda Yang Harmoni, Berbudaya Dan Religius

Terciptanya kondisi masyarakat yang bermoral, berbudaya serta religius dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Disamping itu kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas daerah yang sesuai dengan nilai-nilai leluhur budaya daerah dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.

Pembangunan jati diri daerah tersebut dilakukan melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya bangsa mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern untuk pembangunan. Untuk memperkuat jati diri dan kebanggaan daerah, Pembangunan olah raga diarahkan pada peningkatan budaya dan presentasi olah raga.

Budaya inovasi yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar Kota Samarinda menguasai iptek serta mampu berjaya di era persaingan global.

Pengembangan budaya iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek, bersama dengan pengarahannya budaya konsumtif budaya produktif. Bentuk- bentuk pengungkapan kreatifitas antara lain melalui kesenian, tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spritual dan emosional. Pengembangan iptek serta kesenian diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat dan peradapan manusia.

C. AGENDA PRIORITAS

Untuk menunjukkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota Samarinda dalam jalan perubahan menuju Samarinda sebagai kota metropolitan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu adalah :



P1. Optimalisasi pengendalian banjir;

Bencana banjir merupakan fenomena alam yang terjadi akibat intensitas curah hujan yang tinggi. Intensitas tinggi tersebut disebabkan oleh tidak tertampungnya limpasan air permukaan oleh jaringan pematuan suatu wilayah. Kondisi tersebut berdampak pada timbulnya genangan di wilayah tersebut yang dapat meresahkan masyarakat. Bencana banjir di Indonesia sendiri merupakan jenis bencana yang paling sering terjadi. Kota Samarinda merujuk dari RTRW tahun 2014-2034 termasuk memiliki kerentanan terhadap banjir.

Hal tersebut dikarenakan kondisi kota Samarinda yang rentan, dimana topografinya cenderung landai. Selain itu, curah hujan di Kota Samarinda tergolong tinggi. Kondisi tersebut meningkatkan risiko bencana banjir khususnya banjir permukaan dan genangan di beberapa titik jalan. Hal tersebut diperparah dengan kondisi drainase di Kota Samarinda yang belum memadai dan masih banyaknya sampah diparit-parit sehingga menghambat aliran air jika terjadi banjir/genangan. Kecamatan di Kota Samarinda yang termasuk wilayah tersebut, antara lain : Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Ulu.

P2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

Derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat pada pengetahuan mereka tentang kesehatan yang berguna sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit. Selain itu ketika sakit, maka sejauh mana mereka mendapat pengobatan secara cepat dan berkualitas. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dalam rangka mencapai masyarakat yang sejahtera. Indikasi seseorang sejahtera antara lain memiliki tubuh yang sehat dan hidup dilingkungan yang sehat pula. Pemerintah kota samarinda berkomitmen mewujudkan Samarinda sebagai Kota Sehat dan Bebas Narkoba, oleh karena itu perlu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan bahaya narkoba serta lebih mendekatkan masyarakat kepada akses pelayanan kesehatan agar tindakan medis dapat lebih mudah menjangkau masyarakat. Selain itu kualitas pelayanan kesehatan juga harus ditingkatkan seiring dengan peningkatan fasilitas kesehatan.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa agenda prioritas 2 yaitu **Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat** memiliki tujuan sebagai berikut :

- Meningkatkan derajat kesehatan secara berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat, dengan sasaran :
 - Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Sehat dan Kota Bebas Narkoba



P3. Pengembangan bidang pendidikan untuk menghasilkan sdm yang profesional, berkarakter dan religius;

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) oleh Pemerintah Kota Samarinda, baik melalui upaya pendidikan maupun latihan ditujukan untuk menghasilkan SDM yang Profesional karena memiliki kualitas dan etos kerja, Berkarakter karena berintegritas dan berdedikasi, serta Religius karena telah dibekali ilmu agama yang cukup dan sanggup mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan SDM yang profesional, berkarakter dan religius ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan formal dan non formal, baik negeri maupun swasta serta pendidikan lainnya yang memiliki kearifan lokal seperti Pesantren.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa agenda prioritas 3 yaitu **Pengembangan Bidang Pendidikan untuk Menghasilkan SDM yang Profesional, Berkarakter dan Religius** memiliki tujuan sebagai berikut :

- Mewujudkan Pendidikan yang berkarakter, merata, dan terjangkau serta berdaya saing, dengan sasaran :
 - Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas
 - Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah
 - Fasilitasi bagi santri dari keluarga tidak mampu di pesantren

P4. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan;

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Infrastruktur juga memegang peranan yang penting sebagai salah satu roda penggerak ekonomi di daerah. Ini mengingatkan gerak laju dan pertumbuhan ekonomi di daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu pembangunan di sektor ini, menjadi fondasi dari pembangunan infrastruktur di daerah.

Pembangunan infrastruktur tentu didasarkan atas gagasan, maksud dan tujuan tidak saja bermanfaat untuk suatu golongan saja namun harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Tolok ukur keberhasilan pembangunan infrastruktur adalah sejauh mana pemanfaatan dan dampaknya terhadap dinamika pembangunan ekonomi masyarakat meningkat.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa agenda prioritas 4 yaitu **pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan** memiliki tujuan sebagai berikut :



- Menyediakan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota yang berkualitas dan efektif, dengan sasaran :
 - Meningkatkan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota
- Meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas air bersih, dengan sasaran :
 - Meningkatnya kapasitas & distribusi air bersih
- Mewujudkan kota yang bersih dan bebas polusi sesuai baku mutu lingkungan, dengan sasaran :
 - Tercapainya kebersihan, keindahan & kota ramah lingkungan (taman & RTH)

P5. Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan;

Kemiskinan apabila dipandang dari sisi ekonomi muncul karena adanya ketidaksamaan pada kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia dan perbedaan akses dalam modal serta rendahnya kesempatan kerja yang ada. Berbicara mengenai masalah ekonomi kerakyatan tidak akan pernah lepas dari pembicaraan tentang UMKM. Sebab UMKM berperan dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pendistribusian hasil-hasil pembangunan.

Pemberdayaan dan pengembangan UMKM merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan yang terjadi. Caranya adalah memberikan akses kepada penduduk miskin untuk dapat terlibat dalam berusaha dan aktif dalam kegiatan usaha yang produktif dan memasyarakatkan kewirausahaan terutama dikalangan keluarga miskin atau daerah tertinggal. Pengembangan UMKM melalui peningkatan usaha dan keterampilan pengelolaan usaha, akses lembaga keuangan dan sekaligus meningkatkan kepastian dan perlindungan usaha yang mandiri untuk siap tumbuh dan bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa agenda prioritas 5 yaitu **Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan** memiliki tujuan sebagai berikut :

- Meningkatkan peran investasi dan ekonomi kerakyatan, dengan sasaran :
 - Meningkatnya perekonomian melalui investasi swasta dan pasar tradisional
 - Meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM & Koperasi, bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan, serta usaha jasa lainnya

P6. Pencegahan dan penanggulangan bencana secara efektif;



Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, memberikan amanat penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan tujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

Selanjutnya Tanggungjawab Pemerintah daerah Kota Samarinda dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- 1) Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- 2) Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- 3) Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- 4) Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa agenda prioritas 6 yaitu **Pencegahan dan penanggulangan bencana secara efektif** memiliki tujuan sebagai berikut :

- Mengurangi dampak resiko bencana, dengan sasaran :
 - Meningkatnya sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana

P7. Peningkatan kehidupan beragama, seni budaya, peran dan prestasi pemuda, permasyarakatan olah raga serta pemberdayaan masyarakat dan perempuan;

Setiap masyarakat didorong agar dapat berperan sebagai subyek pembangunan, khususnya pada bidang-bidang keagamaan, seni budaya, keolahragaan, pengarusutamaan gender dalam rangka perlindungan perempuan dan anak, serta keluarga berencana.

Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan atau lembaga sosial yang ada serta menyiapkan regulasi yang jelas agar peran serta masyarakat berjalan di jalur yang benar demi kebaikan dan kemajuan bersama.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa agenda prioritas 7 yaitu **Peningkatan kehidupan beragama, seni budaya, peran dan prestasi pemuda, permasyarakatan olah raga serta pemberdayaan masyarakat dan perempuan** memiliki tujuan sebagai berikut :



- Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya seni budaya, peran dan prestasi pemuda, pemasyarakatan olahraga, serta pemberdayaan masyarakat & perempuan, dengan sasaran :
 - Terwujudnya pengembangan seni budaya, peran dan prestasi pemuda, pemasyarakatan olahraga, pemberdayaan masyarakat & perempuan, dan sukses Keluarga Berencana
 - Tercapainya stabilitas keamanan & ketertiban serta iklim yang kondusif

P8. Pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan di daerah;

Dalam mewujudkan pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan, daerah dituntut bukan hanya kreatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) namun juga dituntut untuk melakukan pembenahan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien & akuntabel. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Disadari bahwa sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam.

Ada beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Pola anggaran yang tertuang dalam APBD memiliki dua komponen, yaitu sisi pendapatan dan sisi belanja.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa agenda prioritas 8 yaitu **Pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan di daerah** memiliki tujuan sebagai berikut :

- Mewujudkan pembiayaan pembangunan yang tertib dan sesuai dengan prinsip perencanaan, dengan sasaran :
 - Meningkatnya pendapatan & pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien & akuntabel

P9. Peningkatan tata kota kelola pemerintahan yang baik.

Good governance merupakan perwujudan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa melalui pemanfaatan sumber daya social, budaya, politik, serta ekonomi dan diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan masyarakat. Pemerintahan yang bersih haruslah pemerintahan yang mampu melaksanakan program pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab yang tentunya dapat terwujud secara maksimal apabila unsur negara dan masyarakat madani (yang di dalamnya terdapat sector swasta) saling terkait. Syarat atau ketentuan agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik yaitu : bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan atau berlawanan dan mendapat dukungan dari rakyat, pembangunan dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam hal biaya dan waktu.



Prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang baik yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Asas Kepastian Hukum:
- 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara:
- 3) Asas Kepentingan Umum
- 4) Asas Keterbukaan:

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa agenda prioritas 9 yaitu **Peningkatan tata kota kelola pemerintahan yang baik** memiliki tujuan sebagai berikut :

- Memantapkan reformasi birokrasi, dengan sasaran :
 - Terwujudnya pelayanan publik berkualitas, transparan, akuntabel dan bebas korupsi

D.TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI

1.TUJUAN

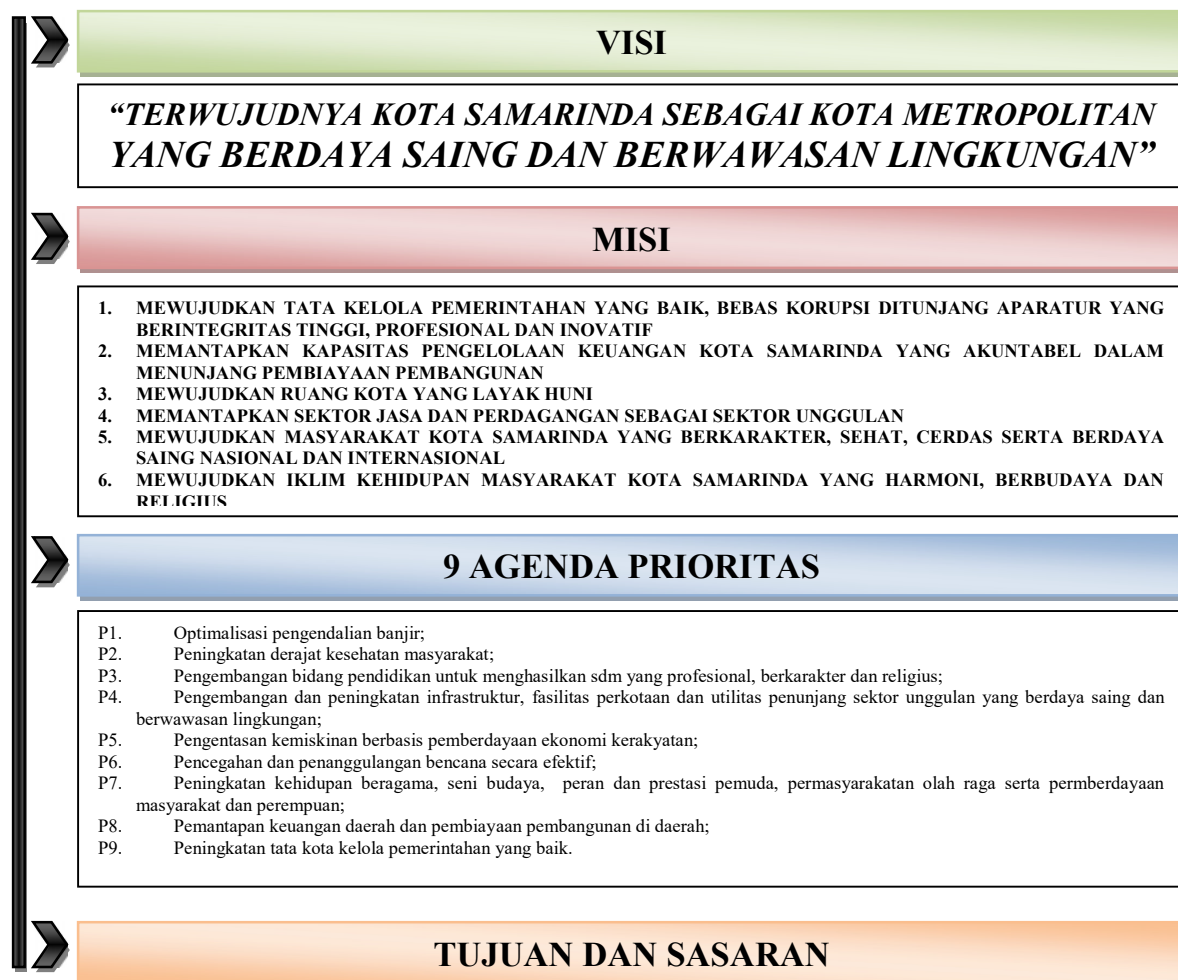
Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis terpenting yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kota Samarinda dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Secara skematik keterkaitan antara visi, misi, agenda prioritas dengan perumusan tujuan dan sasaran, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5.1.
**Skema Keterkaitan antara Visi, Misi, Agenda Prioritas
dengan Perumusan Tujuan & Sasaran**



Dari gambar di atas, jelas bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Selanjutnya, sasaran dipisahkan menjadi sasaran makro dan sasaran spesifik pembangunan daerah sebagai arsitektur kinerja 'impact' yang saling terhubung dimana sasaran makro merupakan *lagging indicator* yang dipicu oleh sasaran spesifik sebagai *leading indicator*. Dengan demikian, sasaran makro pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian tujuan



pembangunan daerah yang sekaligus menjadi indikator utama pencapaian pembangunan jangka menengah.

Berdasarkan visi, misi, dan agenda prioritas sebagaimana telah dijelaskan di atas maka tujuan pembangunan Kota Samarinda selama 5 (lima) tahun ke depan diuraikan sebagai berikut :

1. Memantapkan reformasi birokrasi;
2. Mewujudkan pembiayaan pembangunan yang tertib dan sesuai dengan prinsip perencanaan;
3. Mewujudkan Kota Samarinda bebas banjir;
4. Menyediakan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota yang berkualitas dan efektif;
5. Meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas air bersih;
6. Mewujudkan kota yang bersih dan bebas polusi sesuai baku mutu lingkungan;
7. Mengurangi dampak resiko bencana;
8. Meningkatkan peran investasi dan ekonomi kerakyatan;
9. Meningkatkan derajat kesehatan secara berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat;
10. Mewujudkan Pendidikan yang berkarakter, merata, dan terjangkau;
11. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya seni budaya, peran dan prestasi pemuda, pemasyarakatan olahraga, serta pemberdayaan masyarakat & perempuan.

2.SASARAN STRATEGI

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah sasaran strategi pembangunan daerah ditetapkan seperti berikut:

1. Terlaksananya pengendalian banjir dan relokasi tepi SKM
2. Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Sehat dan Kota Bebas Narkoba
3. Meningkatnya Pendidikan yang berkualitas
4. Meningkatnya Infrastruktur, Fasilitas Perkotaan dan Utilitas Kota
5. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Sekolah
6. Fasilitas Bagi Santri dari Keluarga Tidak Mampu di Pesantren
7. Meningkatnya KAPASITAS DAN Distribusi Air Bersih
8. Tercapainya Kebersihan, Keindahan dan Kota Ramah Lingkungan Taman & RTRW)
9. Meningkatnya Perekonomian Melalui Investasi Swasta dan Pasar Tradisional
10. Meningkatnya Perekonomian Melalui Peran Serta UMKM dan Koperasi, Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, serta Usaha Jasa Lainnya.
11. Meningkatnya Sarana Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
12. Terwujudnya Pengembangan Seni Budaya dan Prestasi Pemuda, Pemasyarakatan Olah Raga , Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan , dan Sukses Keluarga Berencana



13. Tercapainya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Serta Iklim Yang Kondusif
14. Meningkatkan Pedapatan dan Pengelolaan Keuangan
15. Terwujudnya Pelayanan Publik Berkualitas, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi

Adapun strategi pembangunan jangka menengah Kota Samarinda tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penataan kelembagaan, struktur organisasi, dan tata laksana pemerintahan yang akuntabel.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan bebas korupsi.
3. Meningkatkan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien
4. Meningkatkan manajemen pengelolaan PAD dalam menunjang pembiayaan pembangunan daerah.
5. Mengurangi titik banjir dan lama genangan air.
6. Menata tepi SKM untuk mendukung pengendalian banjir serta konsep Waterfront City.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana perkotaan yang responsif gender dalam mendukung mobilitas masyarakat.
8. Menyediakan dan mengembangkan fasilitas yang mendukung perekonomian masyarakat.
9. Meningkatkan kapasitas produksi & kualitas air bersih serta pendistribusiannya yang menjangkau seluruh kawasan.
10. Menyediakan ruang terbuka hijau publik dan privat sesuai dengan RTRW.
11. Meningkatkan pengelolaan sampah secara modern dan berkelanjutan.
12. Mengurangi pencemaran lingkungan.
13. Meningkatkan upaya preventif dalam mitigasi bencana.
14. Penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana.
15. Revitalisasi pasar tradisional menjadi pasar modern.
16. Memberikan kemudahan investasi baik dari sisi pelayanan maupun penyediaan SDM di pasar kerja.
17. Melakukan penataan PKL dan sektor informal lainnya pada kawasan perdagangan.
18. Meningkatkan kelembagaan koperasi aktif dan UMKM, serta peran bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan untuk mendukung ekonomi kerakyatan.
19. Memberikan jaminan dan perlindungan sosial masyarakat.
20. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat
21. Memberantas narkoba dengan melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat luas.



22. Meningkatkan mutu dan keunggulan pendidikan formal dan nonformal sejak usia dini hingga tingkat dasar.
23. Revitalisasi gedung sekolah sesuai standar kelayakan secara nasional.
24. Memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas santri di pesantren.
25. Mengangkat kesenian dan kebudayaan lokal.
26. Memberikan dukungan terhadap kegiatan kepemudaan, kegiatan komunitas minat dan hobi, serta pemasyarakatan olahraga.
27. Meningkatkan pembangunan yang responsif gender berbasis pemberdayaan masyarakat.
28. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana ke seluruh lapisan masyarakat.
29. Mendorong peran serta organisasi kemasyarakatan dalam keamanan dan ketertiban kota.

Disamping Strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Samarinda melakukan upaya untuk mencapai agenda prioritas, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan

E.ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Arah kebijakan pembangunan tahun kedua merupakan lanjutan dari tahun pertama (2017) pelaksanaan RPJMD Kota Samarinda 2016-2021. Pada tahun kedua (2018) ini difokuskan pada menindaklanjuti komoditi-komoditi potensial yang telah diidentifikasi akan memberi kontribusi terhadap sektor jasa dan perdagangan. Komoditi-komoditi unggulan yang telah teridentifikasi harus mampu memberikan peningkatan nilai tambah pada sektor unggulan dan secara nyata dapat mendorong tumbuhnya usaha, industri, dan ekonomi kreatif di Kota Samarinda. Kondisi ini memungkinkan Kota Samarinda untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas, terutama dalam rangka penyerapan tenaga kerja di Kota Samarinda sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan angka kemiskinan.



Untuk mewujudkannya, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan tahap kedua (2018) yaitu Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Sektor Unggulan Daerah. Pelaksanaan arah kebijakan tahap pertama (2017) yang kemudian dilanjutkan tahap kedua (2018) merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menumbuhkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di tengah-tengah masyarakat Kota Samarinda. Diharapkan ekonomi kerakyatan ini nantinya memiliki daya tahan yang kuat terhadap gejolak perekonomian secara nasional.

Untuk mendukung peningkatan nilai tambah, permasalahan menahun Kota Samarinda harus memperoleh porsi pada pembangunan tahap kedua (2018) ini, yaitu permasalahan banjir sebagai lanjutan dari penyelesaian masalah banjir pada tahap pertama (2017). Titik banjir yang menjadi perhatian pemerintah Kota Samarinda adalah titik yang menjadi akses pada pusat-pusat perdagangan, pusat pemerintahan, dan pusat pendidikan. Hal ini merupakan upaya pemerintah Kota Samarinda agar permasalahan banjir nantinya tidak berpengaruh besar pada perekonomian kota.

Arah kebijakan dalam melaksanakan pembangunan Daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem pengendalian banjir
2. Pengembangan sistem drainase perkotaan
3. Penerapan konsep waterfront city dengan membangun infrastruktur sungai
4. Relokasi pemukiman tepi DAS Karang Mumus
5. Pengamanan jalur hijau dan lahan kritis
6. Peningkatan profesionalisme manajemen pelayanan kesehatan
7. Peningkatan akses pelayanan kesehatan
8. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan
9. Pengawasan dan penindakan secara terpadu dan berjenjang terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemerintah, organisasi, lembaga pendidikan formal dan informal, serta seluruh lapisan masyarakat
10. Peningkatan kualitas profesionalisme manajemen pendidikan
11. Peningkatan kualitas gedung dan sarana prasarana sekolah yang layak dan sesuai standar minimal nasional
12. Peningkatan kerjasama Pemerintah Kota dengan pesantren dalam upaya pembentukan santri yang berkualitas dan berkarakter
13. Peningkatan manajemen perkotaan menuju smart city
14. Optimalisasi tata kelola jalan raya
15. Perbaikan jalan rusak
16. Efektivitas manajemen lalu lintas untuk meminimalisir kemacetan



17. Pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang berkeadilan
18. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pertanian (Dalam arti luas)
19. Pemerataan air bersih untuk rumah tangga
20. Pemanfaatan lahan lahan terdegradasi serta pasca eksploitasi lahan
21. Peningkatan ruang terbuka hijau bagi aktifitas masyarakat
22. Peningkatan kualitas dan sarana pengelolaan sampah yang modern, efektif dan ramah lingkungan
23. Efektivitas pengendalian pencemaran udara di daerah aglomerasi perkotaan
24. Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi (Green Economy) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
25. Pemanfaatan sumber daya air kota Samarinda yang sustainable
26. Pertumbuhan produk perdagangan daerah
27. Peningkatan kualitas dan akses tenaga kerja
28. Peningkatan investasi PMA/PMDN
29. Penyediaan ruang bagi perkembangan PKL dan Sektor informal lainnya sesuai zonasi zonasi yang telah ditetapkan dalam RTRW
30. Pemberdayaan masyarakat kurang mampu dalam kemandirian berusaha
31. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dan ekonomi kreatif
32. Peningkatan ekspor komoditi unggulan
33. Penyediaan pangan berkelanjutan untuk mendukung ekonomi kerakyatan
34. Perlindungan social bagi masyarakat kurang mampu
35. Pengembangan system peringatan dini pada titik titik rawan kebakaran dan rawan bencana lainnya
36. Peningkatan kualitas system penanggulangan bencana alam
37. Fasilitasi berkembangnya kesenian dan kebudayaan local
38. Fasilitasi aktivitas positif kepemudaan, komunitas minat dan hobi serta olah raga
39. Pengarusutamaan gender
40. Pembinaan keluarga berencana
41. Peningkatan keterpaduan organisasi masyarakat dengan pemerintah dalam mewujudkan ketertiban, kenyamanan dan keamanan masyarakat
42. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
43. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dalam menunjang pembiayaan pembangunan
44. Penataan kebutuhan organisasi dan tata laksana berdasarkan tugas, fungsi, serta beban kerja yang efektif, efisien, akuntabel dan tidak tumpang tindih
45. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan public berbasis IT



46. Penyiapan pembangunan infrastruktur pemerintahan di Samarinda Seberang atau Sungai Siring atau Makroman.

F. PRIORITAS UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Samarinda tahun 2016 yang disesuaikan dengan tuntutan pembangunan dalam mensejahterakan masyarakat Kota Samarinda dengan menetapkan **15 (Lima belas)** sasaran strategis dengan **175 (Seratus tujuh puluh lima)** indikator kinerja .

Pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan program yang akan dilaksanakan guna mencapai hasil sebagaimana dalam rencana pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2016 – 2021. , yaitu sebagai berikut:

Program Pembangunan Prioritas Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	No	Program
1	Terlaksananya Pengendalian banjir	1	Program pengendalian Banjir
		2	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
		3	Program Pembangunan turap/talud/ bronjong
		4	Program pengembangan Perumahan
		5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
		6	Pengendalian pencemaran Dan perusakan Lingkungan Hidup
		7	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2	Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Sehat dan Kota Bebas Narkoba	1	Program pembinaan upaya kesehatan dasar
		2	Program farmasi dan alat kesehatan
		4	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
		3	Program Pengendalian penyakit menular langsung
		5	Program pembinaan surveillans, imunisasi, karantina dan kesehatan mata
		6	Program peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak & remaja, lansia
		7	Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan
		8	Program upaya kesehatan rujukan
		9	Program Pemberdayaan Masyarakat
		10	Program Penyehatan Lingkungan
		11	Program pengembangan Perumahan



		12	Program pencegahan penyalahgunaan narkoba
		13	Program pelayanan kesehatan jiwa
3	Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas	1	Program Meningkatkan Pendidikan yang Berkualitas
		2	Program Manajemen Pendidikan
4	Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah	1	Program pendidikan Dasar
5	Fasilitasi bagi santri dari keluarga tidak mampu di pesantren		Program pendidikan Dasar
6	Meningkatnya Infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota	1	Program pembangunan Jalan Dan Jembatan
		2	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
		3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
		4	Program pembangunan Jalan Dan Jembatan
		5	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
		6	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
		7	Program Lingkungan Sehat Perumahan
		8	Program pembangunan Jalan Dan Jembatan
		9	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya
7	Meningkatnya kapasitas & distribusi air bersih	1	Program Penyediaan dan pengolahan air baku
		2	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
		3	Program Penyehatan Lingkungan
8	Tercapainya kebersihan, keindahan & kota ramah lingkungan (taman & RTH	1	Program rehabilitasi hutan dan lahan
		2	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
		3	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
		4	Peningkatan Pengendalian Polusi
		5	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
		6	Pengendalian pencemaran Dan perusakan



			Lingkungan Hidup
9	Meningkatnya perekonomian melalui investasi swasta dan pasar tradisional	1	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
		2	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
		3	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
		4	Program peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
		5	Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
		6	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
		7	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
		8	Program peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
10	Meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM & Koperasi, bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan, serta usaha jasa lainnya	1	Program Penataan Struktur Industri
		2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
		3	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
		4	Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
		5	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
		6	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
		7	Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor
		8	Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan
		9	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
		10	Program pengembangan Perikanan Tangkap
		11	Program peningkatan produksi hasil peternakan
		12	Program Peningkatan Ketersediaan dan Penguatan Cadangan Pangan
		14	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
		15	Program penguatan JKN
		16	Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
		17	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma
		18	Program Pembinaan Anak Terlantar
		19	Program pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
		11	Meningkatnya sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana
2	Program kedaruratan dan logistik		



12	Terwujudnya pengembangan seni budaya, peran dan prestasi pemuda, pemasyarakatan olah raga, pemberdayaan masyarakat & perempuan	1	Program Pengelolaan Keragaman Budaya
		2	Program pengembangan Nilai Budaya
		3	Program peningkatan peran serta kepemudaan
		4	Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda
		5	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak
		6	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
		7	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
		8	Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
		9	Program keluarga berencana
		10	Program pelayanan kontrasepsi
		11	Program pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
		12	Program penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
		13	Program pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
13	Tercapainya stabilitas keamanan & ketertiban serta iklim yang kondusif	1	Program pemeliharaan Ketrantibnas Dan pencegahan tindak Kriminal
		2	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
		3	Program pengembangan wawasan kebangsaan
14	Meningkatnya pendapatan & pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien & akuntabel	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
15	Terwujudnya pelayanan publik berkualitas, transparan, akuntabel dan bebas korupsi	1	Program penguatan Akuntabilitas Kinerja
		2	Program Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas
		3	Program Penataan Daerah Otonomi Baru
		4	Program peningkatan kualitas pelayanan publik

G. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh SKPD Pemerintah Kota Samarinda melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam rencana kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh



indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Pemerintah Tahun 2016

Dokmen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang indikator kinerja dan target yang ingin dicapai selama 1 (satu) tahun . Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realitas dengan memperhatikan tujuan dan sasaran serta data pendukung yang harus disiapkan. Indikator kinerja Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kota Samarinda tahun 2016 – 2021 , dengan realitas indikator kinerja yang disesuaikan dengan harapan kinerja setiap tahun yang seyogyanya diadakan review namun tidak dilaksanakan. . Berikut ini disampaikan Perjanjian Kinerja yang akan dicapai tahun 2015 adalah :

1. Terlaksananya pengendalian banjir & relokasi Tepi SKM

No	Uraian Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah titik banjir	42 Titik
2.	Persentase Drainase kota dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	55%
3.	Drainase lingkungan/permukiman dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	100%
4.	Persentase Pembangunan turap di wilayah aliran sungai	10%
5.	Persentase kawasan kumuh di tepi DAS Karang Mumus	100%
6.	Persentase kawasan kumuh	100%
7.	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	25%
8.	Kegiatan Penegakan hukum lingkungan	1 kali/hari/ke camatan
9.	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang	100%

2. Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Sehat dan Kota Bebas Narkoba

No	Uraian Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase puskesmas memberikan pelayanan sesuai standar termasuk puskesmas rawat inap	10 %
2.	Persentase kunjungan rujukan di fasyankes strata 2 dan strata 3	100%
3.	Persentase tersedianya obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan di puskesmas	100%
4.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (SPM)	100%
5.	Persentase balita gizi kurang	12%
6.	Persentase Ibu hamil mendapat tablet tambah darah (TTD)	80%
7.	Cakupan bayi < 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	45%
8.	Persentase kelurahan yang mempunyai SOPkseiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi	100%



	wabah	
9.	Angka kejadian semua kasus TB (CNR Seluruh Kasus TB per 100.000 penduduk)	100%
10.	Cakupan penemuan dan penanganan kasus baru HIV AIDS	50%
11.	Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (SPM)	100%
12.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4) (SPM)	95%
13.	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (SPM)	85%
14.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (SPM)	90%
15.	Persentase puskesmas yang melakukan kelas ibu hamil (SPM)	78%
16.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (SPM)	90%
17.	Cakupan kunjungan bayi (SPM)	80%
18.	Cakupan pelayanan anak balita (SPM)	80%
19.	Cakupan pelayanan kesehatan lansia (60+ Th)	70%
20.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	13 unit
21.	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai	90%
22.	Jumlah sarana prasarana rumah sakit rujukan yang memenuhi standar	13 buah
23.	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	13 unit
24.	Cakupan kelurahan siaga aktif (SPM)	100%
25.	Persentase kelurahan siaga aktif mandiri (SPM)	100%
26.	Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	55%
27.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	100%
28.	Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba	30kasus
29.	Persentase fasyankes institusi penerima wajib lapor (IPWL) pecandu narkoba yang aktif	5%

3.Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas

No	Uraian Indikator Kinerja	Target
1.	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	41,17 %
2.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A/SDLB	111,58%
3.	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	98,80%
4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/SDLB	93,40%
5.	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	67,73%
6.	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	81,69%
7.	Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	90,94%
8.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%
9.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%
10.	Persentase Sekolah SD/MI terakreditasi B dan A.	88,36%
11.	Persentase Sekolah SMP/MTs terakreditasi B dan A.	89,74%

4.Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah



No	Uraian Indikator Kinerja	Target
1	Persentase Ruang kelas SD/MI kondisi baik	78,21%
2	Persentase Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik	88,58%
3	Persentase SD/MI dan yang memiliki Sarpras sesuai standar Nasional	100%
4	Persentase SMP/MTs yang memiliki Sarpras sesuai standar Nasional	100%

5.Fasilitasi bagi santri dari keluarga tidak mampu di pesantren

No	Uraian Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah santri dari keluarga tidak mampu yang memperoleh bantuan	0 Orang

6.Meningkatnya infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota

No	Uraian Indikator Kinerja	Target
1.	persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota	10%
2.	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	80%
3.	Persentase ketersediaan angkutan kota	48,76%
4.	Persentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota	50,69%
5.	Persentase kendaraan yang telah melakukan uji	90%
6.	Proporsi panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	80,6%
7.	Proporsi panjang jaringanjalan Lingkungan dalam kondisi baik	100%
8.	Persentase jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	18%
9.	Masterplan transportasi	Tidak Ada
10.	Pelaksanaan Pembinaan, Penataan dan Penertiban Parkir Tepijalan di Kota Samarinda	56 kali
11.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	100%
12.	Panjang jalan yang memiliki trotoar	35%
13.	Rasio Jaringan Irigasi berfungsi dengan baik	1 : 0,42

7.Meningkatnya kapasitas & distribusi air bersih

No	Uraian Indikator Kinerja	Target
1.	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100%
	Pelayanan Air Bersih (SPAM)	100%
2.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	100%
3.	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	100%
4.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	100 %
5.	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih yang layak	80%



8. Tercapainya kebersihan, keindahan & kota ramah lingkungan (taman & RTH)

No	Uraian Indikator Kinerja	Target
1.	Cakupan rehabilitasi lahan kritis diluar lahan ex- tambang	1%
2.	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	0%
3.	Persentase Penyediaan RTH Publik	25%
4.	Persentase Sampah yang terangkut (Penanganan sampah)	64%
5.	Persentase Peningkatan Pengurangan Timbulan Sampah (3R)	5,70 %
6.	Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara (SPM)	16 usaha
7.	Jumlah kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan	0
8.	Pemantauan status mutu air (sungai)	Cemar berat
9.	Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	40usaha
10.	Persentase kegiatan usahamemiliki ijin pembuangan air limbah	20%

9. Meningkatkan perekonomian melalui investasi swasta dan pasar tradisional

No	Uraian Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah pasar daerah yang dikelola	12 Pasar
2.	Jumlah pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat	2 Pasar
3.	Memperkenalkan produk unggulan daerah ke luar daerah	24 kali
4.	Terwujudnya pengendalian Inflasi Daerah	4 sidak
5.	Jumlah tenaga kerja terserap PMA/PMDN	2.650 orang
6.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100%
7.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	0%
8.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100%
9.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	173 perusahaan

10. Meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM & Koperasi, bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan, serta usaha jasa lainnya

No	Uraian Indikator Kinerja	Target
1.	Pembentukan Kawasan Industri di kota samarinda	0%
2.	Jumlah pedagang (formal dan informal) yang dibina	60%
3.	Tersedianya laporan tertatanya Pasar dan PKL yang ada di Kota Samarinda	10 laporan
4.	Persentase koperasi aktif	79,64 %
5.	Jumlah UMKM yang dibina	100



6.	Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	0%
7.	Jumlah Obyek Wisata Unggulan yang menggambarkan kekhasan lokal	6 obyek
8.	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dikembangkan	9 produk
9.	Komoditi Ekspor Unggulan Daerah	0
10.	Produksi pertanian tanaman pangan utama	14.296,6
11.	Produksi perikanan budidaya	1.297
12.	Produksi perikanan tangkap	14.822,9
13.	Produksi daging	10.057
14.	Persentase Keamanan Pangan	85%
15.	Penguatan cadangan pangan	333,30
16.	Persentase terlaksananya penyaluran raskin secara tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu dan tepat administrasi	15.976
17.	Jumlah penduduk yang menjadi peserta melalui JKN	75%
18.	Persentase (%) PMKS skala kab/kot yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (SPM)	3,13%
19.	Persentase (%) PMKS skala kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (SPM)	20%
20.	Jumlah Fakir miskin yangmendapat bantuan tunai bersyarat dan penerima program keluarga harapan	20%
21.	Prosentase Penerima Jaminan Sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	20%
22.	Prosentase tertangani anak terlantar, bayi terlantar dan anak jalanan	20%
23.	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat	20%

11.Meningkatnya sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana

No	Uraian Indikator Kinerja	Target
1.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Samarinda (SPM)	90%
2.	Persentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (SPM)	100%
3.	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	100%

12.Terwujudnya pengembangan seni budaya, peran dan prestasi pemuda, pemasyarakatan olah raga, pemberdayaan masyarakat & perempuan, dan sukses Keluarga Berencana

No	Uraian Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah Misi Kesenian (SPM)	5 unit
2.	Cakupan Kajian Seni (SPM)	33%
3.	Cakupan Fasilitasi Seni (SPM)	57%
4.	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian (SPM)	57%
5.	Cakupan Organisasi seni (SPM)	67%
6.	Cakupan Tempat umum (SPM)	100%
7.	Cakupan Gelar Seni (SPM)	100%



8.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100%
9.	Jumlah tradisi masyarakat yang dilestarikan	5
10.	Rasio Lapangan olahraga	503 %
11.	Jumlah Cabang Olahraga Prestasi	6 cabang
12.	Jumlah klub olahraga	310kelompok
13.	Jumlah organisasi olahraga	64 kelompok
14.	Jumlah organisasi pemuda	98 kelompok
15.	Jumlah Wirausahawan Muda	25 kelompok
16.	Presentasi kelembagaan PUG yang aktif	100%
17.	Persentase pengelola institusi PUG dan anak yang mengikuti pelatihan	100%
18.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	100%
19.	persentase kelompok perempuan yang mengikuti prog.Keberdayaan dalam wirausaha guna penguatan ekonomi keluarga	100%
20.	Rasio KDRT yang tertangani	100%
21.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan (SPM)	100%
22.	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (SPM)	100%
23.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (SPM)	100%
24.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (SPM)	100%
25.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (SPM)	100%
26.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (SPM)	100%
27.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (SPM)	100%
28.	PKK aktif	90%
29.	Posyandu aktif	90 kelompok
30.	Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	10%
31.	Prosentase fasilitasi bagi pemerintah kelurahan dalam peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK) dan posyandu	30%
32.	KB Aktif	97.474org
33.	Laju Pertumbuhan Penduduk	3,38 %
34.	Presentase Pemakaian Kontrasepsi	60,48%
35.	Jumlah PPKBD	58 kelompok
36.	UPPKS	96,99%
37.	Jumlah BKB	84,21%



13. Tercapainya stabilitas keamanan & ketertiban serta iklim yang kondusif

No	Uraian Indikator Kinerja	Target
1.	Penurunan Angka Kriminalitas	3
2.	Persentase Penanganan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	100%
3.	Jumlah konflik sosial di masyarakat	60 kasus
4.	Persentase Ormas, LSM dan OKP yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	0

14. Meningkatnya pendapatan & pengelolaan keuangan

No	Uraian Indikator Kinerja	Target
1.	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	79%
2.	Tingkat kelengkapan dokumen utama perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, KUAP-PPASP)	100%
3.	Tingkat Kelengkapan Dokumen Utama Pengendalian dan Evaluasi (evaluasi RPJMD, dan evaluasi RKPD)	100%
4.	Rasio realisasi PAD terhadap target PAD	100%

15. Terwujudnya pelayanan publik berkualitas, transparan, akuntabel dan bebas korupsi.

No	Uraian Indikator Kinerja	Target
1.	Kategori Penilaian laporan kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah kota Samarinda	CC
2.	Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Berdasarkan LPPD	ST (sangat tinggi)
3.	Terbentuknya perubahan kelembagaan dan SOTK	1 dokumen
4.	Persentase unit pelayanan publik yang memiliki nilai Survey Kepuasan Masyarakat baik	10%
5.	Jumlah aplikasi e- government di lingkup Pemerintah Kota Samarinda	20 %
6.	Luas tanah yang siap bangun untuk infrastruktur pemerintahan baru	100 %



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kota Samarinda selaku pengemban amanah masyarakat Kota Samarinda melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Prersiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2016

Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Samarinda tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat digambarkan pada lampiran Pengukuran Kinerja (lampiran 2) . Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis , namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan . Media pengukuran kinerja terdiri dari Formulir Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja .

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran/program/kegiatan diberlakukan nilai serta makna dari nilai tersebut , yaitu :

- 100 % – 81% = Baik
- 80 %- 50% = Cukup
- Dibawah 50 = Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Secara umum Pemerintah Kota Samarinda telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang terdiri dari 15 (lima belas) Sasaran Strategis dan 173 (sertaus tujuh puluh tiga) indikator kinerja, yang terdiri dari sasaran strategis pertama sebanyak 9 (sembilan) indikator kinerja , sasaran strategis kedua sebanyak 30 (tiga puluh) indikator kinerja, sasaran strategis ketiga sebanyak 11(



Sebelas) , sasaran strategis keempat sebanyak 4 (empat) , sasaran strategis kelima sebanyak 1 (satu) dan sasaran strategis keenam sebanyak 13 (tiga belas) , sasaran strategis ketujuh 5 (Lima) indikator kinerja, sasaran strategis kedelapan 10 (sepuluh) indikator kinerja, sasaran strategis kesembilan 14 (empat belas) indikator kinerja, sasaran strategis kesepuluh 22 (dua puluh dua) indikator kinerja , sasaran strategis kesebelas 3 (tiga) indikator kinerja, sasaran strategis kedua belas 37 (tiga puluh tujuh) indikator kinerja, sasaran strategis ke tiga belas 4 (empat) , sasaran strategis ke empat belas 4 (empat) indikator kinerja sedangkan sasaran strategis kelima belas adalah 6 (enam) indikator kinerja.

Adapun hasil pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada matrik sebagai berikut:

Hasil Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Katagori Ketercapaian Indikator Kinerja			
			Baik (100 – 81)	Cukup (80-50)	Kurang Dibawah 50	Rata-Rata
1	Terlaksananya Pengendalian banjir	9		V		60,71
2	Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Sehat dan Kota Bebas Narkoba	30	V			102,06
3	Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas	11		V		71,75
4	Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah	4			V	26,75
5	Fasilitasi bagi santri dari keluarga tidak mampu di pesantren	1			V	0
6	Meningkatnya Infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota	13	V			92,12
7	Meningkatnya kapasitas & distribusi air bersih	5	V			95,49
8	Tercapainya kebersihan, keindahan & kota ramah lingkungan (taman & RTH	10		V		50,19
9	Meningkatnya perekonomian melalui investasi swasta dan pasar tradision	14		V		60,22
10	Meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM & Koperasi, bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan, serta usaha jasa lainnya	22		V		62,04
11	Meningkatnya sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana	3	V			100
12	Terwujudnya pengembangan seni budaya, peran dan prestasi pemuda,	37	V			111,74



	pemasyarakatan olah raga, pemberdayaan masyarakat & perempuan					
13	Tercapainya stabilitas keamanan & ketertiban serta iklim yang kondusif	4		V		56,24
14	Meningkatnya pendapatan & pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien & akuntabel	4	V			98,67
15	Terwujudnya pelayanan publik berkualitas, transparan, akuntabel dan bebas korupsi	6	V			112,50

B = Baik, **C** = Cukup, **K** = Kurang

Berdasarkan capaian diatas, tingkat capaian kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda dapat disimpulkan bahwa 7 (Tujuh) sasaran strategis rata-rata Katagori “BAIK”, dan 6 (Enam) sasaran strategis Katagori “ CUKUP “, sedangkan 2 (Dua) dengan capaian kinerja kategori kurang.

Hasil evaluasi dan analisis pencapaian terhadap indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan pada Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2016 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran strategis dengan target RPJMD tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

	Sasaran Strategis 1
	Terlaksananya pengendalian banjir & relokasi Tepi SKM

Tabel 1.2.1.

Evaluasi Pencapaian Sasaran strategis terlaksananya pengendalian banjir dan relokasi tepi SKM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Th 2016 (%)
			Target	Realisasi	
1	Jumlah titik banjir	titik	45(Target dr dinas)	43	95,56
2	Persentase Drainase kota dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	55	50	90,91
3	Drainase lingkungan/permukiman dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	&	100	50	50
4	Persentase Pembangunan turap di wilayah aliran sungai	%	0	0	0



5	Persentase kawasan kumuh di tepi DAS Karang Mumus	&	100	100	100
6	Persentase kawasan kumuh	%	0.49	0	0
7	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kali/hari/kecamatan	1	1	100
8	Kegiatan Penegakan hukum lingkungan	Kali/tahun	25	15	60
9	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang	%	100	50	50
	Rata Rata Capaian Kinerja				60,71

Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian Kinerja Indikator Kinerja jumlah titik banjir adalah sebesar 43 titik dari target kinerja anggaran sebesar Rp.1.432.945.550 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.431.585.000,- melalui kegiatan Pembangunan kolan sedimen saluran drainase Kota Samarinda dan Rehabilitasi /penurapan sungai alam tatako Kec. Sambutan sebesar Rp. 2.001.817.250 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.999.917.250,- dan merupakan bantuan Keurangan Provinsi Kalimantan Timur dengan program Pengendalian banjir.

Pada tahun 2016 jumlah titik banjir sudah berkurang , namun masih beberapa titik banjir yang belum teratasi, hal ini disebabkan beberapa hal antara lain

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara trotoar yang acapkali dipergunakan untuk dilewati kendaraan roda dua atau dijadikan tempat parkir serta adanya tumpukan sampah yang menghambat arus air pada drainase/gorong-gorong
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kegiatan pemeliharaan drainase/gorong-gorong pada kegiatan jumat bersih atau kegiatan lainnya.

Untuk capaian kinerja Presentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat adalah sebesar 50% dari target kinerja sebesar 55% atau dengan capaian kinerja sebesar 90,91% dengan anggaran sebesar Rp. 94.334.829.950 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 90.642.535.755,-melalui program Pembangunan saluran drainase dan gorong gorong .

Pada tahun 2016 capaian indikator kinerja persentase pembangunan turap diwilayah aliran sungai sampai dengan akhir tahun 2016 belum terealisasi. Beberapa hal tidak tercapainya kinerja yang telah ditetapkan disebabkan oleh :

1. Proses APBD-P yang alokasinya terbatas/kurang
2. Terbatasnya dana APBD kota gunas membayar kewajiban pihak ketiga
3. Pemotongan secara mandiri (Self Blocking) sumber dana bantuan Keuangan Provinsi.
4. Faktor social / pembebasan lahan belum diselesaikan terlebih dahulu.



Beberapa hambatan / permasalahan tersebut secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki dengan percepatan pelaksanaan , disamping itu juga melalui sosialisasi kegiatan.

Capaian kinerja untuk sasaran pertama yaitu terlaksananya pengendalian banjir dan relokasi tepi SKM adalah dengan capaian rata rata sebesar 60,71 % , namun jika dilihat dari capaian kinerja masing masing indikator, ada beberapa indikator yang capaiannya kinerja mencapai 100%, namun ada beberapa indikator yang capaiannya belum maksimal.

	Sasaran Strategis 2
	Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Sehat dan Kota Bebas Narkoba

Tabel 1.2.2.

Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Sehat dan Kota Bebas Narkoba sbb :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Th 2016 (%)
			Target	Realisasi	
1	Persentase puskesmas memberikan pelayanan sesuai standar termasuk puskesmas rawat inap	%	10	21	210
2	Persentase kunjungan rujukan di fasyankes strata 2 dan strata 3	%	100	100	100
3	Persentase tersedianya obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan di puskesmas	%	100	100	100
4	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (SPM)	%	100	100	100
5	Persentase balita gizi kurang	%	12	12	100
6	Persentase Ibu hamil mendapat tablet tambah darah (TTD)	%	80	80	100
7	Cakupan bayi < 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	45	81	180
8	Persentase kelurahan yang mempunyai SOP kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	%	100	100	100
9	Angka kejadian semua kasus TB (CNR Seluruh Kasus TB per 100.000 penduduk)	%	100	72	72
10	Cakupan penemuan dan penanganan kasus baru HIV AIDS	%	50	69	138
11	Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (SPM)	%	100	96,61	96,61



12	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4) (SPM)	%	95	95	100
13	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (SPM)	%	85	93	109
14	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (SPM)	%	90	94	104
15	Persentase puskesmas yang melakukan kelas ibu hamil (SPM)	%	78	80	103
16	Cakupan public s dengan komplikasi yang ditangani (SPM)	%	90	87	97
17	Cakupan kunjungan bayi (SPM)	%	80	91	114
18	Cakupan pelayanan anak balita (SPM)	%	80	60	75
19	Cakupan pelayanan kesehatan lansia (60+ Th)	%	70	100	143
20	Persentase puskesmas menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja	%	75	60	80
21	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	unit	13	13	100
22	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai	%	90	90	100
23	Jumlah sarana prasarana rumah sakit rujukan yang memenuhi standar	buah	13	5	38
24	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	unit	13	15	115
25	Cakupan kelurahan siaga aktif (SPM)	%	100	75	75
26	Persentase kelurahan siaga aktif mandiri (SPM)	%	100	0	0
27	Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	55	79	144
28	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	100	45,35	45,35
29	Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba	kasus	30	81	101
30	Persentase fasyankes institusi penerima wajib lapor (IPWL) pecandu narkoba yang aktif	%	5	5	100
	Rata rata capaian kinerja				104,73

Aspek kesehatan

Pencapaian indikator Kinerja Persentase puskesmas Memberikan pelayanan sesuai standar termasuk puskesmas rawat inap pada tahun 2016 adalah sebesar 21 % dari target kinerja sebesar 10 % atau dengan capaian kinerja sebesar 210 % hal ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 223.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 222.240.000,- melalui program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, sedangkan pencapaian indikator kinerja persentase kunjungan rujukan di fasyankes



strata 2 dan strata 3 , walaupun tanpa dukungan dana indikator kinerja mencapai kinerja sebesar 100%.

Untuk capaian Indikator kinerja persentase tersedianya obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan di puskesmas adalah sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 6.696.544.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.181.888.742 , hal ini dapat dicapai dan dilaksanakan melalui program Obat dan Perbekalan Kesehatan, sedangkan untuk pencapaian Indikator kinerja cakupan gizi buruk(SPM) , Indikator Balita Gizi Kurang dan Prosentase ibu hamil mendapat tambah darah (TTD) dengan capaian 100% sedangkan Indikator Kinerja Cakupan Bayi < 6 bulan mendapat ASI Eksklusif adalah sebesar 81% dari target 45% atau dengan capaian kinerja sebesar 180% , keberhasilan capaian kinerja tersebut diatas didukung dengan anggaran sebesar Rp. 4.313.108.783,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.692.606.474,- melalui program Upaya Kesehatan Masyarakat.

Capaian indikator kinerja Prosentase Kelurahan yang mempunyai SOP kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah adalah 100%, capaian indikator kinerja angka kejadian semua kasus TB (CNR seluruh kasus TB per 100.000 penduduk) dari target sebesar 100 % hanya tercapai sebesar 72% atau dengan capaian kinerja sebesar 72%, capaian indikator kinerja penemuan dan penanganan kasus baru HIV AIDS dari target kinerja sebesar 50% tercapai sebesar 69% atau dengan capaian kinerja sebesar 138% , pencapaian kinerja ini dapat dilaksanakan melalui program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular yang didukung dengan anggaran sebesar Rp.152.295.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 152.295.000,- .

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Kota Samarinda sudah tentu tidak terlepas dari partisipasi masyarakat baik swasta maupun organisasi kemasyarakatan (Ormas) dalam turut serta memabangunan sarana dan prasarana penunjang kesehatan ataupun membentuk kegiatan kegiatan yang berorientasi kesahatan masyarakat seperti posyandu, LSM bidang kesehatan dan lain lain

Sedangkan capaian indikator kinerja prosentase persalinan difasilitasi pelayanan kesehatan (SPM), cakupan pertolongan Pertama oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (SPM) dengan capaian ratata diatas 100% , untuk capaian indikator kinerja Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI/SMP adalah sebesar 97% dari target kinerja sebesar 97% atau dengan capaian kinerja sebesar 97% dilaksanakan melalui program Upaya kesehatan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 4213.911.700 dan terealisasi sebesar Rp. 3.308.124.199,-.

Pencapaian indikator kinerja (SPM) Prosentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal minimal 4 kali (K4/SPM) pada tahun 2016 dari terget kinerja sebesar 78% tercapai sebesar 80% atau dengan capaian kinerja sebesar 103%, sedangkan capaian indikator



kinerja Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani (SPM) dengan capaian kinerja sebesar 87% dari target kinerja sebesar 90% atau dengan capaian kinerja sebesar 97% ,capaian indikator kinerja cakupan kunjungan bayi (SPM), Cakupan pelayanan Kesehatan Lansia (SPM) dan capaian indikator kinerja kelurahan siaga aktif dengan capaian kinerja rata rata 100% namun ada dua indikator kinerja yang belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan , kegiatan ini dilaksanakan melalui program Upaya kesehatan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 8.077.600.504 dengan realisasi sebesar Rp. 7.372.809.074,- atau sebesar 91,27%.


Sedangkan capaian indikator kinerja prosentase kelurahan siaga aktif mandiri (SPM) belum terealisasi hal ini disebabkan ada beberapa persyaratan untuk mencapai kriteria kelurahan siaga mandiri memang belum terpenuhi dikarenakan masih belum optimalnya peran serta dari institusi/lembaga terkait untuk mewujudkannya, selanjutnya capaian kinerja yang memenuhi syarat kesehatan adalah sebesar 79% dari target kinerja sebesar 55% atau dengan capaian kinerja sebesar 144%, capaian indikator kinerja persentase rumah tinggal bersanitasi adalah sebesar 45,35% dari target kinerja sebesar 100% atau dengan capaian kinerja sebesar 45,35%, selanjutnya capaian indikator kinerja jumlah kasus penyalahgunaan narkoba adalah sebanyak 81% dari target kinerja sebesar 30% atau dengan capaian kinerja sebesar 101%. Selanjutnya untuk capaian indikator kinerja Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk capaian kerjanya adalah sebesar 100% dari target kinerja sebanyak 13 unit.

Namun demikian capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara keseluruhan baik kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB dan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2016 tidak jauh berbeda dengan tahun tahun sebelumnya dengan rata rata 88%.

Untuk capaian indikator kinerja Jumlah sarana prasarana rumah sakit rujukan yang memenuhi standar; rasio rumah sakit persatuan penduduk ; dan prosentase fayankes institusi penerima wajib lapor (IPWL) pencandu narkoba yang aktif telah mencapai target kinerja 100% dan satu indikator kinerja yang belum mencapai target kinerja dari target yang ditetapkan sebesar 13 buah hanya teralisasi sebanyak 5 buah atau dengan acapaian kinerja sebesar 38% yaitu indikator kinerja jumlah sarana prasarana rumah sakit rujukan yang memenuhi standar hal ini disebabkan akreditasi rumah sakit baru 5 buah dan capaian 100% akan tercapai sampai dengan tahun 2019.

Capaian kinerja untuk sasaran kedua yaitu Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Sehat dan Kota Bebas Narkoba adalah dengan capaian rata rata sebesar 106,02 % , namun jika dilihat dari capaian kinerja masing masing indikator, ada beberapa indikator yang capaiannya kerjanya masih dibawah 50%, salah satunya adalah indikator kinerja Jumlah Sarana Prasarana Rumah Sakit Rujukan Yang memenuhi standar yaitu dengan capaian kinerja hanya 35%.



	SASARAN STRATEGIS 3
	Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas

Tabel 1.2.3..

Evaluasi pencapaian sasaran strategis ketiga Terwujudnya Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Thn 2016(%)
			Target	Realisasi	
1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	41,17	36,15	87
2	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A/SDLB	%	111,58	64,67	57
3	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	%	98,80	53,84	54
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/SDLB	%	93,40	91,72	98
5	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	%	67,73	64,67	93,73
6	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	81,69	82,99	101,5
7	Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	90,94	82,95	91,22
8	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100
9	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100
10	Persentase Sekolah SD/MI terakreditasi B dan A.	%	88,36	0	0
11	Persentase Sekolah SMP/MTs terakreditasi B dan A.	%	89,74	0	0
	Rata rata capaian kinerja				71,13

Pencapaian indikator kinerja dari sasaran strategis ketiga dapat dijelaskan secara singkat sesuai bidangnya sebagai berikut:

Aspek Pendidikan Dasar

Dalam sasaran strategis ketiga ini , Khusus Bidang Pendidikan dalam tahun 2016 menetapkan sebanyak 11 (sebelas) indikator kinerja dan sebanyak 7 (enam belas) telah mencapai kinerja dengan kategori baik , 2(dua) indikator kinerja dengan kategori cukup .

Untuk mendukung keberhasilan terhadap capaian sasaran strategis, bidang pendidikan telah melaksanakan 7 (tujuh) program kegiatan masing masing 1) Program Pendidikan anak usia dini (PAUD) ; 2); 3)Program wajib belajar pendidikan dasar dua belas tahun ; 4) Program pendidikan menengah ; 5) Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan ; 6) Program



manajemen pelayanan pendidikan dan 7) Program peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan serta 4 program lainnya yaitu 1) Program pelayanan administrasi perkantoran; 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; 3) Program Peningkatan disiplin aparatur; 4) Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan total anggaran sebesar Rp.175.070.910.517 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 156.027.584.979.

Capaian terhadap indikator kinerja pendidikan anak usia dini pada tahun 2016 adalah sebesar 41,17% dari target sebesar 36,15% atau dengan capaian kinerja sebesar 87%. Hal ini artinya APK jenjang pendidikan pada anak usia dini di Kota Samarinda hanya mencapai 36,15%, sedangkan sebesar 63,85% orang tua tidak menyekolahkan anaknya pada jenjang PAUD.dengan demikian bahwa Pendidikan usia dini masuk kategori kurang karena belum mencapai standar.

Capaian Indikator Kinerja Angka partisipasi murni SD/MI/Paket A/SDLB adalah sebesar 61,67% dari target kinerja sebesar 111,58% atau dengan capaian sebesar 57%

Capaian angka pada melek huruf yang berusia > 15 tahun di Kota Samarinda pada tahun 2015 adalah sebesar 98,61% dari target sebesar 84,58% atau dengan capaian sebesar 116,58%, sedangkan capaian indikator kinerja angk partisipasi murni SMP/MTs/Paket B/SMLB adalah sebesar 53,84% dari target kinerja sebesar 98,80% atau dengan capaian kinerja sebesar 54%.

Capaian indikator kinerja prosentase APM SD/MI paket A /SDLB adalah sebesar 91,72% dari target sebesar 93,40% atau dengan capaian sebesar 98% ,untuk capaian indikator kinerja angka partisipasi murni SMP/MTS Paket B/SMPLB adalah dengan capaian sebesar 93,73% atau 64,67% dari target sebesar 67,73%, untuk capaian indikator angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B/SMPLB adalah sebesar 64,67% dari target kinerja sebesar 67,73% atau dengan capaian kinerja sebesar 93,73%.

APM jenjang SD 91,72% artinya penduduk Kota Samarinda usia 7-12 yang bersekolah pada jenjang SD mencapai 91,72% sedangkan sebesar 8,28% adalah penduduk yang berusia kurang ataupun melebihi usia 7-12 tahun yang bersekolah dijenjang SD. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa APM jenjang SD masuk dalam kategori tinggi karena mendekati 100%. Jenjang SD mempunyai kondisi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan jenjang SMP dan jenjang SM.

Capaian indikator kinerja guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV adalah sebesar 67,79% dari target kinerja sebesar 81,69% atau dengan capaian kinerja sebesar 82,99%, guru layak pada jenjang SD sebesar 82,99% adalah yang terkecil dibandingkan dengan jenjang SMP dan SM yang belum layak mengajar, yaitu sebesar 17,01% harus disetarakan ke pendidikan yang lebih tinggi (Strata I) melalui kebijakan dan program kualifikasi pendidikan guru yang diprioritaskan oleh pemerintah. Jumlah guru SD/MI adalah sebanyak 4.762 orang , sedangkan guru yang layak hanya sebanyak 3.952. Untuk capaian indikator kinerja guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV adalah sebesar 82,95% dari target kinerja sebesar 90,94% atau dengan capaian kinerja sebesar 91,22% dengan jumlah guru/tenaga pendidik sebanyak 2.928 orang dan guru yang layak adalah



sebanyak 2,671%, sedangkan capaian kinerja angka kelulusan SD/MI/SMP/MTs adalah 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Guru layak jenjang SPM sebesar 91,22% adalah lebih besar dibandingkan dengan jenjang SD dan lebih kecil dibandingkan dengan SM .

Jumlah tenaga pendidik untuk kondisi saat ini sudah cukup memadai , hanya saja dari segi kualitas dan tingkat profesionalisme masih terdapat tenaga pendidik yang belum atau bahkan tidak layak mengajar dikarenakan tingkat pendidikan, kualifikasi guru (dibawah S1).

Capaian APM SD/MI/ SMP/MTSN/SMA/MI tahun 2015/2016
Kota Samarinda

No.	Jenis Indikator	Satuan	SD	SMP	SM
1	APM	persentase	91,72	64,67	53,84
2	APK	persentase	64,67	53,84	

Capaian Kelulusan Tingkat Pendidikan SD s/d SLTA tahun 2015/2016 Kota samarinda dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2015/2016		
		Target	Lulus	%
1.	Tingkat SD	100	100	100
2.	Tingkat SLTP	100	100	100
3.	Tingkat SLTA	100	100	100

Sedangkan capaian indikator kinerja persentase sekolah SD/MI terakreditasi B dan A dan persentase sekolah SMP/MTR terakreditasi B dan A masing masing dengan target 88,36 % dan 89,74% belum terealisasi, untuk lebih meningkatkan keberhasilan atas pencapaian target dan dapat diwujudkan secara maksimal maka strategi yang dapat dilakukan antara lain:

- Penyediaan dana alokasi pendidikan yang lebih besar .
- Peningkatkan Kualifikasi S1/D.IV melalui dana stimulan/beasiswa
- Peningkatan pembiayaan perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang memadai .
- Penguatan peran serta masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusia.

Capaian kinerja untuk sasaran ketiga yaitu Terwujudnya Meningkatnya Pendidikan yang berkualitas adalah dengan capaian rata rata sebesar 71,13% , pada sasaran ini ada 2 indikator kinerja yang capaiannya masih dibawah 50% yaitu indikator kinerja Persentase sekolah SD/MI terakreditasi B dan A dan indikator kinerja Persentase sekolah SMP/MTs terakreditasi B dan A



	SASARAN STRATEGIS 4
	Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah

Tabel 1.2.4.

Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis keempat, Meningkatnya infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota sbb :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Thn 2016 %
			Target	Realisasi	
1	Persentase Ruang kelas SD/MI kondisi baik	%	78,21%	47,01	60
2	Persentase Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik	%	88,58%	41,88	47
3	Persentase SD/MI dan yang memiliki Sarpras sesuai standar Nasional	%	100%	0	0
4	Persentase SMP/MTs yang memiliki Sarpras sesuai standar Nasional	%	100%	0	0
Rata rata Capaian Kinerja					26,75

Aspek Pendidikan

Berkenaan dengan capaian terhadap indikator kinerja persentase ruang kelas SD/MI kondisi baik adalah sebesar 47,01% dari target kinerja sebesar 78,21% atau dengan capaian sebesar 60% , ruang kelas dalam kondisi baik pada Jenjang SD sebanyak 1.076 atau sebesar 47,01% dari ruang kelas yang ada sebanyak 2.289 ruang kelas. RKB pada jenjang SD/MI yang dalam kondisi baik lebih besar dibandingkan dengan SMP dan SM. Diharapkan dalam rangka peningkatan kualitas prasarana pendidikan, diperlukan kepedulian pemerintah terhadap kondisi ruang kelas yang tidak dalam kondisi baik/yang mengalami kerusakan sebesar 52,99%, sedangkan capaian indikator kinerja prosentase ruang kelas SMP/MTs kondisi baik adalah sebesar 41,88% dari target kinerja sebesar 88,58% atau dengan capaian kinerja sebesar 47% , sedangkan capaian indikator kinerja persentase SD/SMP/MTs yang memiliki sarpras sesuai standar nasional sampai dengan saat ini belum terealisasi disebabkan Karena keterbatasan anggaran.

Untuk ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik dari 1.275 ruang kelas yang ada hanya sebanyak 534 ruang kelas yang dalam kondisi baik atau hanya sebesar 41,88% , berikut table ruang kelas pada tahun 2016 sesuai dengan jenjang pendidikan sbb:

Tabel ruang kelas pada tahun 2016

No.	Variabel	SD/MI	SMP/MTS
1	Baik	1.076	534
2	Rusak	1.213	741



	Jumlah	2.289	1.275
1	% Baik	47,01	41,88
2	% Rusak	52,99	58,12

Capaian kinerja untuk sasaran keempat yaitu Terwujudnya Meningkatnya Pendidikan yang berkualitas adalah dengan capaian rata rata sebesar 71,13% , pada sasaran ini ada 2 indikator kinerja yang capaiannya masih dibawah 50% yaitu indikator kinerja Persentase sekolah SD/MI terakreditasi B dan A dan indikator kinerja Persentase sekolah SMP/MTs terakreditasi B dan A

	SASARAN STRATEGIS 5
	Fasilitasi bagi santri dari keluarga tidak mampu di pesantren

tabel 1.2.5.

Evaluasi Pencapaian Sasaran strategis kelima Fasilitasi bagi santri dari keluarga tidak mampu adalah:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Thn 2016	Realisasi thn 2016	Capaian Kinerja Thn 2016
1	Jumlah santri dari keluarga tidak mampu yang memperoleh bantuan	%	0	0	0

Aspek sosial

Untuk pencapaian sasaran strategis kelima Fasilitasi bagi santri dari keluarga tidak mampu dengan indikator kinerja jumlah santri dari keluarga tidak mampu yang memperoleh bantuan pada tahun 2016 belum ada target kinerja yang ditetapkan, namun sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 200 orang.

	SASARAN STRATEGIS 6
	Meningkatnya infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota

Tabel 1.2.6.

Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis keenam Meningkatkan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Thn 2016 (%)
			Target	Realisasi	



1	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota	%	10	5	50
2	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	65	70	107,69
3	Persentase ketersediaan angkutan kota	%	48,76	48,76	100
4	Persentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota	%	50,69	50,69	100
5	Persentase kendaraan yang telah melakukan uji	%	90	100	90
6	Proporsi panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	%	80,6	50	62
7	Proporsi panjang jaringanjalan Lingkungan dalam kondisi baik	%	100	226,93	222,93
8	Persentase jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	%	18	15	83
9	Pelaksanaan Pembinaan, Penataan dan Penertiban Parkir Tepijalan di Kota Samarinda	kali	56	55,80	56
10	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	100	100	100
11	Panjang jalan yang memiliki trotoar	%	35	30	85,7
12	Rasio Jaringan Irigasi berfungsi dengan baik	%	1 : 0,42	1:0.43	100,04
13	Persentase air irigasi untuk pertanian rakyat system irigasi yang sudah ada	%	0	0	0
	Rata Rata Capaian Kinerja				92,12

Aspek Perhubungan , Infrastruktur dan Utilitas Kota

Pencapaian indikator kinerja persentase terhubungnya pusat pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota adalah sebesar 5% dari target sebesar 10% atau dengan capaian kinerja sebesar 50% , capaian indikator Kinerja Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik adalah sebesar 70% dari target sebesar 70% atau dengan capaian kinerja sebesar adalah sebesar 100% hal ini dapat dicapai melalui Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar 67.500.000,- dengan realisasi sebesar 67.372.400,- ; program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar 823.993.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 645.473.200,- serta program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ sebesar Rp.500.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 498.099.000 kegiatan antara lain Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan kegiatan pemeliharaan traffic light dan jaringan area traffic control system (ATCS) .

Capaian indikator kinerja persentase ketersediaan angkutan kota dan persentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten kota sesuai dengan target yang telah ditetapkan adalah dengan capaian kinerja 100%.




Sedangkan capaian kinerja persentase kendaraan yang telah melakukan uji adalah 100% dari target kinerja sebesar 90% atau dengan capaian kinerja sebesar 111%, capaian ini didukung dengan anggaran sebesar 721.675.100 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 501.886.300,- melalui program peningkatan kelaikan jalan dan pengoperasian kendaraan bermotor dengan kegiatan UPT pengujian kendaraan bermotor, sedangkan capaian indikator kinerja proporsi jaringan jalan kota dalam kondisi baik adalah sebesar 50% dari target kinerja sebesar 80,6% atau dengan target kinerja sebesar 62%, tidak tercapainya target tersebut disebabkan terbatasnya anggaran terutama pada program pembangunan jalan dan jembatan .

Untuk capaian indikator kinerja proporsi panjang jaringan jalan lingkungan dalam kondisi baik adalah sebesar 222,93% dari target kinerja 100% atau dengan capaian dengan kinerja sebesar 222,93% , indikator ini mengalami kenaikan sehingga dalam penyediaan jalan lingkungan bagi masyarakat telah tercapai.

Capaian indikator kinerja persentase jalan kondisi rusak yang terhabilitasi adalah sebesar 15% dari target sebesar 18% atau dengan capaian kinerja sebesar 83% melalui program tanggap darurat , sedangkan capaian indikator kinerja persentase pelaksanaan pembinaan , penataan dan penertiban public tepi jalan di kota Samarinda adalah 55,80% dari target 55,80% atau dengan capaian sebesar 100% keberhasilan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- melalui program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ dengan kegiatan peningkatan pelayanan public pada pelayanan parker, untuk capaian lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU adalah 100%.

Untuk capaian indikator kinerja panjang jalan yang memiliki trotoar adalah sebesar 30% dari target kinerja sebesar 35% atau dengan capaian kinerja sebesar 85%, capaian indikator kinerja rasio jaringan irigasi berfungsi baik adalah sebesar 1:0,43 dari rasio sebesar 1:0,42 atau dengan capaian kinerja sebesar 100,04%. Pencapaian rasio jaringan irigasi berfungsi baik dilaksanakan melalui program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dengan didukung anggaran sebesar Rp. 4.295.629.950,- dengan realisasi sebesar 4.150.391.100,- atau dengan serapan anggaran sebesar 96,62% .

Capaian kinerja untuk sasaran keenam yaitu meningkatnya infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas Kota adalah dengan capaian rata rata sebesar 92,12% , pada sasaran ini 7 indikator kinerja yang capaiannya adalah 100% , 1 indikator kinerja dibawah 50% dan beberapa indikator dengan capaian baik.

	SASARAN STRATEGIS 7
	Meningkatnya kapasitas & distribusi air bersih



Tabel 1.2.7.
Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya kapasitas & distribusi air bersih

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Thn 2016 (%)
			Target	Realisasi	
1	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	%	100	100	100
2	Pelayanan Air Bersih (SPAM)	%	100	100	100
3	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	%	100	81	81
4	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	100	90	90
5	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih yang layak	%	80	85,16	106,45
Rata Rata Capaian Kinerja					95,49

Pencapaian kinerja tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari; pelayanan air bersih (SPAM) mencapai target kinerja sebesar 100%, sedangkan capaian indikator kinerja proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah sebesar 81% dari target kinerja sebesar 100% atau dengan capaian sebesar 81%, untuk pencapaian indikator kinerja persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman adalah sebesar 85% dari target kinerja sebesar 100%.

Sedangkan pencapaian indikator kinerja persentase rumah tangga dengan akses air bersih yang layak adalah sebesar 47,38% dari target kinerja sebesar 80% atau dengan capaian kinerja sebesar 59,2% . Jumlah rumah tangga dengan akses air bersih sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 141.244 rumah tangga, semakin angka realisasi mendekati target/mencapai target, maka nilai keberhasilan dalam memenuhi rumah tangga dengan akses air bersih yang layak telah tercapai.

Sasaran ketujuh yaitu meningkatnya kapasitas dan distribusi air bersih adalah dengan capaian kinerja rata rata sebesar 95,49% dari 5 indikator kinerja , 4 indiktaor kinerja dengan capaian kinerja 100%

	SASARAN STRATEGIS 8
	Tercapainya kebersihan, keindahan & kota ramah lingkungan (taman & RTH

Tabel 1.2.8
Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis kedelapan Tercapainya kebersihan,keindahan dan Kota ramah lingkungan (Tman dan RTH) sebagai berikut



No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Thn 2016 (%)
			Target	Realisasi	
1	Cakupan rehabilitasi lahan kritis diluar lahan ex- tambang	%	1%	0,5	50
2	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	%	7%	2	28
3	Persentase Penyediaan RTH Publik	%	25%	25	100
4	Persentase Sampah yang terangkut (Penanganan sampah)	%	64	62,32	97,38
5	Persentase Peningkatan Pengurangan Timbulan Sampah (3R)	%	5,70	4,71	85,63
6	Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara (SPM)	usaha	16	8	50
7	Jumlah kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan	0	0	0	0
8	Pemantauan status mutu air (sungai)	Cemar berat	Cemar berat		
9	Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	usaha	40	32	80
10	Persentase kegiatan usahamemiliki ijin pembuangan air limbah	%	20	32	160
Rata Rata Capaian Kinerja					50,10

Capaian indikator kinerja cakupan rehabilitasi lahan kritis diluar eks tambang adalah sebesar 0,5% dari target kinerja sebesar 1% atau dengan capaian kinerja sebesar 50%, sedangkan Capaian indikator kinerja persentase penyediaan RTH publik dengan target capaian sebesar 25% teralisasi sebesar 25 % atau dengan capaian kinerja sebesar 100% , untuk tahun 2016 tidak ada penambahan tanaman baru/taman aktif, namun demikian tetap melaksanakan penataan dan pemeliharaan taman taman dan penghijauan yang ada sehingga terwujud Kota Samarinda yang asri dengan mengandung makna bahwa setiap anggota masyarakat merasa sejuk dikota yang bersih, teduh di kota yang hijau dan nyaman dikota yang sehat didalam tata kehidupan masyarakat hal ini didukung dengan anggaran 32.068.886.500,- melalui program Pengelolaan ruang terbuka hijau sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 202 tentang hutan kota dan Peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 21 Tahun 2013 tentang hutan kota disebutkan bahwa hutan kota merupakan bagian dari ruang terbuka hijau wilayah Kota/Daerah dan prosentase luas hutan kota paling sedikit 10% dari wilayah Kota dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat.

Sedangkan capaian indikator kinerja persentase sampah yang terangkut (Penanganan sampah) adalah sebesar 62,32% dari taget kinerja sebesar 64% atau dengan capaian kinerja sebesar 97,38%, untuk capaian indikator kinerja persentase peningkatan pengurangan sampah (3R) adalah



sebesar 4,71% dari target kinerja sebesar 5,70% atau dengan capaian sebesar 85,63% hal ini didukung dengan pengadaan kendaraan operasional, alat alat kebersihan dan lain lain kebutuhan yang mendukung dalam peningkatan kinerja sebagai pelayanan dan kepuasan masyarakat dalam cakupan pelayanan pengangkutan sampah. Selain hal tersebut dalam mengurangi penimbunan sampah juga dilaksanakan pertemuan forum faskel, siaran keliling dimasyarakat tentang aturan pemerintah mengenai aturan persampahan(jam buang sampah dan himbuan membuang sampah pada tempatnya, diimbau agar kepada CSR dan dunia usaha dan organisasi masyarakat agar dapat memberikan bantuan saranadan prasarana penunjang kebersihan.Kegiatan ini dilaksanakan melalui program pengembangan kinerja dan pengelolaan persampahan.

Capaian indikator kinerja Jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara (SPM) adalah dengan capaian kinerja sebesar 50% dari target kinerja sebanyak 16 usaha atau sebanyak 8 usaha yang diawasi.

Dari 8 usaha yang diawasi tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi dan pencegahan pencemaran udara.

Jumlah kegiatan usaha yang menjadi target pengawasan adalah :

Nomor	Jenis kegiatan	Jumlah
1	Industri Kayu Lapis	4
2	Industri Pembangkit Listrik	3
3	Industri Lem Kayu Lapis	1
	Jumlah	8

Capaian indikator Kinerja jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencemaran air adalah sebanyak 32 usaha dari target kinerja sebesar 40 usaha atau dengan capaian kinerja sebesar 80 %, indikator ini dari SKPD menetapkan 80 kegiatan usaha yang diawasi , namun hanya dapat dicapai sebanyak 64 usaha kegiatan usaha yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencemaran air.

Jumlah kegiatan yang menjadi target pengawasan

Nomor	Jenis kegiatan	Jumlah
1	Industrasi kayu lapis/lem kayu lapis	5
2	Industri pembangkit listrik	3
3	Workshop alat berat	5
4	Rumah sakit	6
5	Hotel	8
6	Tambang batu bara	40
7	Mall	1



8	Distribusi BBM	2
9	Laboratorium analisis	3
10	Eksplorasi dan produksi migas	1
11	Pelabuhan	2
12	Pengumpul limbah B3	3
13	Ready mix	1


Sedangkan pencapaian indikator kinerja presentase kegiatan usaha memiliki ijin pembuangan air limbah adalah sebesar 32% dari target kinerja sebesar 20% atau dengan capaian sebesar 160%, pelaksanaan kegiatan ini berlangsung selama 12 bulan dari bulan januari s/d desember dengan rincian kegiatan antara lain Verifikasi dan evaluasi perijinan pengelolaan lingkungan Hidup; Pengadaan kelengkapan kegiatan pengawasan dan pengendalian perijinan.

Dari hasil verifikasi dan evaluasi teknis lapangan tersebut dipakai sebagai bahan pertimbangan teknis penerbitan ijin :

1. Ijin pembuangan air limbah
2. Penghapusan titik penataan pembuangan air limbah
3. Ijin penyimpanan sementara limbah B3
4. Penghapusan titik penataan penyimpanan sementara limbah B3

Pelaksanaan kegiatan pada lingkungan hidup dimaksud melalui program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.987.049.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.242.063.858,- atau dengan serapan anggaran sebesar 62,51%.

Sasaran kedelapan yaitu tercapainya kebersihan, keindahan dan Kota ramah lingkungan (Taman dan RTH) adalah dengan capaian kinerja rata rata sebesar 50,10% , sasaran kedelapan ini capaian belum maksimal karena beberapa indikator kinerja masih ada belum ditargetkan pada tahun 2016, namun pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 15 kegiatan dan sampai dengan akhir masa RPMD ditargetkan sebanyak 35 kegiatan, namun jika dilihat pada masing masing capaian indikator capaiannya rata bernilai baik.

	SASARAN STRATEGIS 9
	Meningkatnya perekonomian melalui investasi swasta dan pasar tradisional

Tabel 1.2.9.

Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis kesembilan Meningkatkan perekonomian melalui investasi swasta dan pasar tradisional sebagai berikut :



No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Thn 2016 %)
			Target	Realisasi	
1	Jumlah pasar daerah yang dikelola	Pasar	12	12	100
2	Jumlah pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat	Pasar	2	1	50
3	Memperkenalkan produk unggulan daerah ke luar daerah	kali	24	2	8,33
4	Terwujudnya pengendalian Inflasi Daerah	sidak	4	3	75
5	Jumlah tenaga kerja terserap PMA/PMDN	orang	2.650	2.761	104,18
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	0	0
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	0	0	0
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	0	0
9	Jumlah investor berskala nasional PMDN	perusahaan	173	192	110,98
10	Jumlah investor berskala nasional PMA	perusahaan	11	13	118,18
11	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN	Rp.	Rp. 6.500.00 0.000.00 0	4.775.50 1.000.00 0	73,47
12	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN	Rp.	2.250.00 0.000.00 0	3.214.74 1.000.00 0	142,88
13	Jumlah peta potensi penanaman modal	%	0	0	0
14	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan (SPM)	kali	3	0	0
	Rata rata Capaian Kinerja				60,22

Capaian indikator kinerja memperkenalkan produk unggulan daerah luar daerah sebanyak 2 kali dari target kinerja sebanyak 24 kali atau dengan capaian sebesar 8,33%, belum tercapainya kinerja ini disebabkan karena keterbatasan anggaran untuk memperkenalkan produk keluar daerah, untuk capaian indikator kinerja terwujudnya pengendalian inflasi daerah adalah sebanyak 3 kali sidak dari target kinerja sebanyak 4 kali sidak atau dengan capaian kinerja sebesar 75%.

Sedangkan capaian indikator kinerja jumlah tenaga kerja terserap PMA/PMDN adalah sebanyak 2.761 orang dari target kinerja sebanyak 2.650 orang atau dengan capaian kinerja sebesar Rp. 104,18, hal ini menunjukkan banyaknya tenaga kerja yang terserap pada pada bidang penanaman modal asing / penanaman modal dalam negeri.

Untuk capaian indikator kinerja jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi ; indikator kinerja besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat serta indikator kinerja besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan pada tahun 2016, capaian kinerja belum tercapai hal ini disebabkan juga karena keterbatasan anggaran.



Untuk pencapaian indikator jumlah investor PMDN adalah sebanyak 179 investor dari target kinerja sebanyak 173 investor atau dengan capaian kinerja 104,19, sedangkan capaian indikator kinerja jumlah investor PMA adalah sebanyak 13 investor dari target kinerja sebanyak 11 investor atau dengan capaian kinerja sebesar 118,18%. Pencapaian kedua indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak investor yang menanamkan modal baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri baik dari sector jasa, perdagangan, industry, konstruksi, perumahan, pasar tradisional, pusat perbelanjaan, took modern, property , perhotelan maupun jasa lainnya

Realisasi investasi di Kota Samarinda gabungan antara PMDN dan PMA selama 2015-2016 dapat dilihat pada data dibawah ini :

Tahun	Jumlah Investor PMA	Jumlah investor PMDN	Nilai Investasi PMA (Jutaan)	Nilai Investasi PMDN (Jutaan)
2015	9	163	1.946.294.000	5.210.914.000
2016	13	179	3.214.741.000	4.775.501.000
Jumlah	22	342	5.161.035.000	9.986.415.000

Sumber : BPMD Kota Samarinda tahun 2016


Capaian indikator kinerja jumlah investasi PMA/PMDN berskl nasional adalah sebesar Rp. 7.990242.000 (Dalam jutaan) dari target kinerja sebesar Rp. 8.750.000.000,- (Dalam jutaan) atau dengan capaian kinerja sebesar 91,32%. Dengan perkembangan nilai investasi tersebut tidak terlepas dari berbagai kemudahan dalam pelayanan pengurusan administrasi perijinan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu , juga dengan memberikan rasa aman dan nyaman yang dapat memudahkan akses menuju Kota Samarinda . Sedangkan capaian indikator kinerja tersedianya informasi peluang usaha sector/bidang usaha unggulan dari target yang ditetapkan sebanyak 3 informasi sampai dengan akhir tahun 2016 belum terealisasi

Kenaikan jumlah investasi di Kota Samarinda disebabkan karena kondisi iklim investasi yang kondusif dengan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, serta upaya Pemerintah Kota Samarinda untuk mendorong peningkatan investasi. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi dengan anggaran sebesar Rp175.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 160.973.400,- atau dengan prosentase capaian sebesar 91,98% dan program Peningkatan iklim in vestasi dan realisasi investasi dengan anggaran sebesar Rp. 206.264.000 dengan realisasi sebesar Rp. 206.264.000,-

Sasaran kesembilan adalah meningkatnya perekonomian melalui investasi swasta dan pasar tradisional adalah dengan capaian kinerja rata rata sebesar 59,81 %, capaian rata rata ini belum tercapai disebabkan beberapa indikator kinerja capaiannya masih dibawah 50% , dan target kinerja



masih belum ditetapkan pada tahun 2016 serta keterbatasan anggaran sehingga beberapa indikator belum dapat dilaksanakan.

	SASARAN STRATEGIS 10
	Meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM & Koperasi, bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan, serta usaha jasa lainnya

Tabel 1.2.10.

Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis kesepuluh meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM dan Koperasi, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan serta jasa usaha jasa lainnya sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Thn 2016 (%)
			Target	Realisasi	
1	Pembentukan Kawasan Industri di kota samarinda	%	0	0	0
2	Jumlah pedagang (formal dan informal) yang dibina	%	60	22,9	38,16
3	Tersedianya laporan tertatanya Pasar dan PKL yang ada di Kota Samarinda	laporan	10	1	10
4	Persentase koperasi aktif	%	79,64	80,76	101,41
5	Jumlah UMKM yang dibina	ukm	100	80	80
6	Jumlah Obyek Wisata Unggulan yang menggambarkan kekhasan lokal	obyek	6	6	100
7	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dikembangkan	produk	9	6	66,66
8	Komoditi Ekspor Unggulan Daerah	0	0	0	0
9	Produksi pertanian tanaman pangan utama	ton	14.296,6	14.000,-	97,92
10	Produksi perikanan budidaya	ton	1.297	1.153	88,89
11	Produksi perikanan tangkap	ton	14.822,9	33.518,9	226,12
12	Produksi daging	ton	10.057	27.850	276,92
13	Presentase Keamanan Pangan	%	85	85	100
14	Penguatan cadangan pangan	%	333,30		
15	Persentase terlaksananya penyaluran raskin secara tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu dan tepat adminitrasi	rts	15.976	15.976	100



16	Jumlah penduduk yang menjadi peserta melalui JKN	%	75	31	41
17	Persentase (%) PMKS skala kab/kot yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (SPM)	%	3,13	0	0
18	Persentase (%) PMKS skala kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (SPM)	%	20	0	0
19	Jumlah Fakir miskin yangmendapat bantuan tunai bersyarat dan penerima program keluarga harapan	%	20	0	0
20	Prosentase Penerima Jaminan Sosial bagi penyandang cacat fiisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	%	20	0	0
21	Prosentase tertangani anak terlantar, bayi terlantar dan anak jalanan	%	20	0	0
22	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat	%	20	20	100
	Rata Rata Capaian Kinerja				62,04

Capaian indikator kinerja kawasan industry di kota Samarinda pada tahun 2016 belum ada target yang ditetapkan , namun demikian pada tahun 2017 target yang ditetapkan adalah 20% dan direncanakan pada akhir tahun RPJMD sebesar 100%, capaian indikator kinerja pedagang (Formal dan informal) yang dibina dari target yang ditetapkan sebesar 60% baru tercapai 20% atau dengan capaian kinerja sebesar 38,18% , sedangkan tersedianya laporan tertatanya pasar dan PKL yang di kota Samarinda adalah 1 laporan dari target kinerja yang ditetapkan sebanyak 10 laporan atau dengan capaian kinerja sebesar 10%.

Untuk capaian indikator kinerja koperasi aktif adalah sebesar 80,76% dari target kinerja sebesar 79,64% atau dengan capaian kinerja sebesar 101,41%, capaian indikator kinerja jumlah UMKM yang dibina adalah sebanyak 80 UMKM dari target kinerja sebanyak 100 UMKM atau dengan capaian kinerja sebesar 80%, sedangkan jumlah obyek wisata unggulan yang menggambarkan kekhasan local dengan capaian kinerja sebesar 100%, capaian indikator kinerja jumlah produk ekonomi kreatif yang dikembangkan adalah sebanyak 6 produk dari target kinerja sebanyak 9 produk atau dengan capaian kinerja sebesar 66,66%.

Selanjutnya capaian indikator kinerja ekspor unggulan daerah pada tahun 2016 belum ada target yang ditetapkan , namun pada tahun 2017 ditetapkan target sebnyak 1 produk unggulan , untuk capaian indikator kinerja produksi pertanian tanaman pangan utama adalah sebesar 14.000 ton dari target kinerja sebesar 14.296,6 ton atau dengan capaian kinerja sebesar 97,92%.



Sedangkan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya pada tahun 2016 adalah sebanyak 1.153 ton dari target kinerja sebanyak 1.297 atau dengan capaian kinerja sebesar 88,89%. Peningkatan produksi perikanan budidaya didukung oleh kinerja kegiatan memberikan bantuan stimulan usaha berupa sarana produksi perikanan berupa benih dan pakan, melibatkan pihak ketiga dalam memanfaatkan dana CSR (Coorporate Social Responcibility) pada sektor budidaya perikanan, memanfaatkan sungai sebagai lahan baru budidaya Keramba Jaring Apung (KJA), melakukan pembinaan teknis budidaya, mengintroduksi metode budidaya lebih sederhana seperti sistem kolam terpal dan mengembangkan budidaya kolam pekarangan, sedangkan Capaian kinerja produksi perikanan tangkap (Ton) pada tahun 2016 adalah sebanyak 33,518,9 ton dari target kinerja sebanyak 14.822,9 ton atau dengan capaian kinerja sebesar 226,12%


Jumlah Produksi Daging pada tahun 2016 adalah sebesar 27.850 ton dari target sebesar 10.057 ton atau dengan capaian kinerja sebesar 276,92% ,peningkatan produksi daging merupakan respon positif dari tingginya tingkat permintaan pemenuhan kebutuhan daging di Kota Samarinda dalam memenuhi kebutuhan pasokan untuk masyarakat Samarinda dan kabupaten/ kota di sekitar wilayah Samarinda. Jumlah produksi daging terutama daging sapi diwujudkan dengan meningkatkan fasilitas Rumah Potong Hewan Sapi/ Kerbau yang berlokasi di Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, sehingga jumlah produksi daging pada tahun mendatang diharapkan dapat meningkat dan menghasilkan output daging sapi segar dengan kualitas yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) bagi masyarakat. Upaya peningkatan produksi daging lokal diwujudkan dengan peningkatan populasi ternak Sapi Bibit dan Budidaya di masyarakat berupa bantuan ternak pemerintah yang digulirkan di kelompok ternak sehingga diharapkan dapat meningkatkan populasi ternak setiap tahunnya dan mensuplai kebutuhan daging untuk Kota Samarinda. Peningkatan investasi dan minat usaha di sub sektor peternakan akan mendorong terwujudnya kemandirian dalam memenuhi bahan pangan lokal dan akan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan bahan pangan dari wilayah lain.

Selanjutnya capaian indikator kinerja persentase PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar (SPM); persentase PMKS skala kab yang menerima program pemberdayaan social melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok social ekonomi sejenis (SPM); Jumlah fakir miskin yang mendapatr bantuan tunai bersyarat dan penerima keluarga harapan; prosentase penerima jaminan social bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial serta capaian indikator kinerja prosentase tertangani anak terlantar, bayi terlantar dan anak jalanan sampai dengan akhir tahun 2016 dari target yang ditetapkan masih belum tersedianya anggaran yang mendukung program tercapainya beberapa indikator kinerja dimaksud, selanjutnya capaian indikator kinerja persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan social selama masa tanggal darurat adalah sebesar 100%

Sasaran kesepuluh meingkatnya perekonomian melalui peran UMKM dan Koperasi, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan serta jawa usaha



jasa lainnya adalah dengan capaian kinerja rata rata sebesar 62,04% . Dalam sasaran ini beberapa indikator tidak mencapai target antara lain persentase PMKS skala kab yang menerima program pemberdayaan social melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok social sejenis lainnya dan indikator kinerja jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat dan penerima keluarga harapan.

	SASARAN STRATEGIS 11
	Meningkatnya sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana

Tabel 1.2.11.

Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis kesebelas Meningkatkan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Thn 2016 (%)
			Target	Realisasi	
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Samarinda (SPM)	%	90	90	100
2	Persentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (SPM)	%	100	100	100
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	%	100	100	100
	Rata rata Capaian Kinerja				100

Capaian indikator kinerja cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Samarinda (SPM) dari target 90% mencapai kinerja sebesar 100% hal ini dapat diwujudkan melalui program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dan beberapa kegiatan :

1. Kegiatan peningkatan pelayanan penanggulangan bencana UPTB I
2. Kegiatan peningkatan pelayanan penanggulangan bencana UPTB II
3. Kegiatan peningkatan pelayanan penanggulangan bencana UPTB III

Pada 3 kegiatan ini BPBD melalui patrol, penyuluhan, siaran keliling pencegahan bencana kebakaran dan penanganan pemadaman kebakaran. Melalui kegiatan ini masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran dan mampu melakukan penanggulangan dini serta cepat tanggap dalam merespon dan melaporkan kejadian bencana/kebakaran.


4. Peningkatan retribusi pemadaman kebakaran dan bantuan tabung APAR , melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat mampu berpartisipasi dalam penanggulangan bencana/kebakaran.



5. Penanggulangan tanggap darurat bencana, kegiatan ini dilakukan pada setiap kejadian bencana/kebakaran yang memerlukan tanggap darurat.

Sedangkan capaian indikator kinerja tingkat waktu tanggap (Response time rate) tercapai 100%. Response time (Waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba ditempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran. Sedangkan response time rate adalah rasio antara kejadian yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 menit dengan jumlah kejadian secara keseluruhan, kegiatan ini dilakukan melalui apel siaga dan drill pemadaman kebakaran yang melibatkan seluruh pasukan dari BPBD maupun dari PMK dan balakarcana.

Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran didukung dengan anggaran sebesar Rp. 4.476.574.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.371.674.900 atau dengan realisasi sebesar 98%.

SASARAN STRATEGIS 12	
	Terwujudnya pengembangan seni budaya, peran dan prestasi pemuda, pemsayarakatan olah raga, pemberdayaan masyarakat & perempuan, dan sukses Keluarga Berencana

Tabel 1.2.12

Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis keduabelas terwujudnya pengembangan seni budaya, peran dan prestasi pemuda, pemsayarakatan olah raga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan dan keluarga

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Thn 2016 (%)
			Target	Realisasi	
1	Jumlah Misi Kesenian (SPM)	kali	5	2	40
2	Cakupan Kajian Seni (SPM)	%	33	15	45,45
3	Cakupan Fasilitasi Seni (SPM)	%	57	35	61,40
4	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian (SPM)	%	57	40	70,17
5	Cakupan Organisasi seni (SPM)	%	67	45	67,16
6	Cakupan Tempat umum (SPM)	%	100	85	85
7	Cakupan Gelar Seni (SPM)	%	100	85	85
8	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100	100	100
9	Jumlah tradisi masyarakat yang dilestarikan	buah	5	4	80
10	Lapangan olahraga per 1.000 penduduk	unit	503	502	99,80
11	Jumlah Cabang Olahraga Prestasi	cabang	6	6	100%
12	Jumlah klub olahraga	Klub	310	310	100%



13	Jumlah organisasi olahraga	klp	64	64	100%
14	Jumlah organisasi pemuda	klp	98	98	100%
15	Jumlah Wirausahawan Muda	orang	25	26	104
16	Presentasi kelembagaan PUG yang aktif	%	100	100	100
17	Persentase pengelola institusi PUG dan anak yang mengikuti pelatihan	%	100	100	100
18	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	100	100	100
19	persentase kelompok perempuan yang mengikuti prog.Keberdayaan dalam wirausaha guna penguatan ekonomi keluarga	%	100	100	100
20	Rasio KDRT yang tertangani	%	100	100	100
21	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan (SPM)	%	100%	169	169
22	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (SPM)	%	100	30	30
23	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (SPM)	%	100	169	169
24	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (SPM)	%	100	169	169
25	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (SPM)	%	100%	169	169
26	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (SPM)	%	100	169	169
27	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (SPM)	%	100	169	169
28	PKK aktif	orang	90	100	111,11
29	Posyandu aktif	klp	90	692	768
30	Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	%	10	10	100
31	Prosentase fasilitasi bagi pemerintah kelurahan dalam peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK) dan posyandu	%	30	30	100
32	KB Aktif	orang	97.474	93.873	96,3
33	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	3,38	3,8	112,42



34	Presentase Pemakaian Kontrasepsi	%	60,48	59,71	98,72
35	Jumlah PPKBD	klp	58	59	100
36	UPPKS	%	96,99	92,43	95,30
37	Jumlah BKB	%	84,21	69,85	82,95
	Rata Capaian Kinerja				111,74

Aspek kesenian

Untuk capaian indikator kinerja jumlah misi kesenian pada tahun 2016 adalah misi dari target kinerja sebanyak 5 misi atau dengan capaian kinerja sebesar 40 , capaian inidikator kinerja cakupan kajian seni dari target sebesar 33% hanya tercapai sebesar 15% atau dengan capaian kinerja sebesar 45,45% , capaian indikator kinerja fasilitas seni adalah sebesar 35% dari target kinerja sebesar 57% atau dengan capaian kinerja sebesar 61,40%.

Selanjutnya capaian indikator kinerja cakupan sumberdaya manusia kesenian adalah dengan capaian kinerja sebesar 70,17%, capaian kinerja cakupan organisasi seni adalah dengan capaian kinerja sebesar 67,16% dari target kinerja 67% tercapai sebesar 45%, sedangkan capaian indikator kinerja cakupan tempay umum; cakupan gelar seni adalah dengan capaian kinerja masing masing sebesar 85%, tidak tercapainya beberapa indikator dikamksu disebabkan keterbatasn anggaran yang tersedia untuk mendukung program tersebut.

Untuk capaian indikator kinerja jumlah grup kesenian dari target kinerja sebanyak 57 grup tercapai sebanyak 50 grup atau dengan capaian kinerja sebesar 87,71%, sedangkan capaian indikator kinerja jumlah gedung kesesian adalah dengan capaian kinerja sebesar 100%

Selanjutnya capaian indikator Benda Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan capaian adalah 100% dari jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilaksanakan pemeliharaan sebanyak 13 buah. Hal ini menggambarkan jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya tidak mengalami peningkatan dari segi jumlah , namun dari segi pemeliharaan/perawatan tetap dilaksanakan pada setiap tahunnya dengan tujuan agar benda situs dan kawasan cagar budaya tepat ada dan dipertahankan yaitu :

1. Makam lamohang Daeng Mangkona
2. Masjid Siratul Mustaqim
3. Rumah Tua Samarinda Seberang
4. Villa Annie
5. Desa Budaya Pampang
6. Klinteng Tia Lekong
7. Kampung Tenun Samarinda
8. Makam Tentara Jepang
9. Tugu Perjuangan Pertempuran Pertama
10. Desa Budaya Loa Bahu



11. Desa Budaya Benangan
12. Makam Jepang Lembang
13. Makam Tua Tentara Belanda, Makam Tentara Jepang.

Cagar budaya di Kota Samarinda 7 diantaranya telah didaftar ke Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya Kementerian Pendidikan Nasional dan sisasnya masih dalam tahap penyelidikan, sedangkan capaian indikator kinerja jumlah tradisi masyarakat yang dilestarikan adalah dengan capaian kinerja sebesar 80%

Aspek Kepemudaan

Capaian indikator kinerja jumlah klub olah raga ; jumlah gedung olah raga; jumlah cabang olah raga prestasi; jumlah organisasi olah raga dan jumlah organisasi pemuda olah raga pada tahun 2016 rata rata dengan capaian kinerja sebesar 100% , sedangkan capaian rasio lapanganm olah raga adalah dengan capaian kinerja lapangan olah raga adalah sebesar 99,80%.

Untuk capaian kinerja jumlah wirausahawan muda dari target kinerja sebesar 25 wirausahawan tercapai sebesar 26 usahawan atau dengan capaian kinerja sebesar 104%, sedangkan capaian indikator kinerja presentase kelembagaan PUG yang aktif; persentase pengelola institusi PUG dan anal yang mengikuti pelatihan ; persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah; persentase kelompok perempuan yang mengikuti program keberdayaan dalam wirausaha guna penguatan ekonomi keluarga dan rasio KDRT yang tertangani adalah dengan capaian kinerja rata rata 100%.

Selanjutnya capaian persentase kelompok perempuan yang mengikuti program keberdayaan dalam wirausaha guna penguatan ekonomi keluarga didukung melalui program peningkatan kualitas hidup perempuan dengan kegiatan penunjan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 198.573.000,- atau dengan serapan anggaran sebesar 99,29%, sedangkan capaian kinerja rasio KDRD yang tertangani dilaksanakan melalui program peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan melalui kegiatan fasilitasi pengembangan P2TP2A, kegiatan ini melalui pendampingan pendampingan korban KDRT dengan anggaran sebesar 286.617.000 dengan realisasi anggaran sebesar 260.817.600 atau sebesar 91% serapan anggaran.

Untuk pencapaian indikator kinerja cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani yang terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (SMP) adalah sebesar 30% dari target kinerja sebesar 100% atau dengan capaian kinerja sebesar 30% , tidak tercapainya target kinerja ini disebabkan keterbatasan anggaran yang tersedia.

Sedangkan untuk pencapaian indikator kinerja cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (SPM); cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (SPM) ; cakupan layanan reintegrasi social bago perempuan dan anak



korban kekerasan (SPM) serta capaian kinerja layanan rehabilitasi social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (SPM) dengan capaian sebesar 169% dari target kinerja sebesar 100% atau dengan capaian sebesar 169%.

Untuk capaian indikator kinerja PKK aktif tercapai sebesar 100% dari target kinerja sebesar 90% atau dengan capaian kinerja sebesar 111,11% , capaian indikator kinerja posyandu aktif sebesar 692 kelompok dari target kinerja sebesar 90 kelompok atau dengan capaian kinerja sebesar 769%, capaian kinerja persentase posyandu pusnema dan mandiri dengan capaian kinerja sebesar 100%, kegiatan ini dilaksanakan melalui program peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 1.102.250.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 910.118.394 ,- atau dengan resapan anggaran sebesar 82,45%.

Capaian kinerja persentase fasilitase bagi pemerintah kelurahan dalam peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK) dan posyandu dengan capaian kinerja 100% dengan program peningkatan pemberdaqyaan masyarakat dengan kegiatan pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelembagaan dengan didukung anggaran sebesar Rp. 132.1780.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 106.577.000,- atau dengan serapan anggaran sebesar 80,60%.

Capaian indikator kinerja KB Aktif tahun 2016 dari target kinerja sebanyak 97.474 orang tercapai sebanyak 93.873 orang atau dengan capaian kinerja sebesar 96,3%, capaian peserta KB aktif dari tahun ke tahun mengalami kenaikan , sedangkan capaian kinerja laju pertumbuhan penduduk adalah sebesar 3,80% dari target kinerja sebesar 3,38% atau dengan capaian kinerja sebesar 112,42%, capaian indikator kinerja presentase pemakaian kontrasepsi adalah sebesar 59,71% dari target kinerja sebesar 60,48% atau dengan capaian kinerja sebesar 98,72 % , beberapa indikator tersebut adalah untuk mendukung terwujudnya keluarga berencana dan keluarga sejahtera , dimana keluarga sejahtera dan keluarga sejahtera 1 setiap tahun mengalami kenaikan dari target sebesar 40.000 menjadi 41.341, ini dilihat dari hasil pendataan keluarga dari jumlah keluarga pra sejahtera dengan keluarga sejahtera 1 sehingga berjumlah 41,341. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain masih adanya data yang berbeda beda belum bersifat integrative; penanganannya masih bersifat umum, belum ada pemetaan yang mendasar ; kriteria kemiskinan yang perlu direviu kembali sesuai dengan perkembangan serta banyaknya pendatang dari luar kota.

Pencapaian peserta KB aktif terhadap PUS Bulan Desember Tahun 2016

No	Kecamatan	PUS Proyeksi	PA	PR
1	Palaran	10.773	7.418	68,86
2	Samarinda Seberang	9.381	5.976	63,70
3	Samarinda Ulu	25.699	14.559	56,65
4	Samarinda Ilir	16.747	9.143	54,59
5	Samarinda Utara	19.985	10.573	52,90



6	Sungai Kunjang	24.943	15.871	63,63
7	Samarinda Kota	7.247	3.598	49,65
8	Sambutan	9.857	7.006	71,08
9	Sungai Pinang	20.297	11.425	56,29
10	Loa Janan Ilir	12.297	8.304	67,53
	Jumlah	157.226	93.873	59,71

Pencapaian peserta KB aktif terhadap terhadap PPM bulan Desember Tahun 2016

No	Kecamatan	PPM	PA	%
1	Palaran	7.537	7.418	98,42
2	Samarindaa Seberang	8.527	5.976	70,08
3	Samarinda Ulu	14.378	14.559	101,26
4	Samarinda Ilir	9.284	9.143	98,48
5	Samarinda Utara	10.193	10.573	103,73
6	Sungai Kunjang	16.372	15.871	96,94
7	Samarinda Kota	3.589	3.598	100,25
8	Sambutan	7.501	7.006	93,40
9	Sungai Pinang	11.553	11.425	98,89
10	Loa Janan Ilir	8.540	8.304	97,24
	Jumlah	97.474	93.873	96,31

Selanjutnya capaian indikator kinerja PPKBD pada tahun 2016 adalah 96,99% dari target kinerja 96,99% atau dengan capaian kinerja sebesar 100%, untuk capaian indikator kinerja UPPKS adalah sebesar 92,43% dari target kinerja sebesar 96,99% atau dengan capaian kinerja sebesar 95,30%, sedangkan indikator kinerja jumlah BKB pada tahun 2016 adalah sebesar 69,85% dari target kinerja sebesar 84,21% atau dengan capaian kinerja sebesar 82,95%

Sasaran Strategis keduabelas terwujudnya pengembangan seni budaya, peran dan prestasi pemuda, pemsayarakatan olah raga, pemberdayaan masyarakat dan perempuan dan keluarga dengan capaian rata rata 111,74% yaitu 23 indikator kinerja dengan capaian diatas 100% , namun demikian ada beberapa indikator kinerja yang capaiannya kinerja masih dibawah 50%.

	SASARAN STRATEGIS 13
	Tercapainya stabilitas keamanan & ketertiban serta iklim yang kondusif

Tabel 1.2.13.

Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis ketiga belas tercapainya stabilitas keamanan dan ketertiban serta iklim yang kondusif



No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Thn 2016 (%)
			Target	Realisasi	
1	Penurunan Angka Kriminalitas	3	3	2	66,66
2	Persentase Penanganan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	75	75
3	Jumlah konflik sosial di masyarakat	kasus	60	50	83,33
4	Presentase Ormas, LSM dan OKP yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	0	0	0
Rata Rata Capaian Kinerja					56,24

Capaian indikator kinerja penurunan angka kriminalitas pada tahun 2016 adalah sebesar 2% dari target kinerja sebesar 3% atau dengan capaian kinerja sebesar 66,66%, untuk capaian indikator kinerja persentase penanganan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum adalah dengan capaian kinerja sebesar 75%, sedangkan untuk capaian indikator kinerja jumlah konflik sosial di masyarakat adalah dengan capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 83,33% dari target kinerja sebesar 60%.

	SASARAN STRATEGIS 14
	Meningkatnya pendapatan & pengelolaan keuangan

Tabel 1.2.14.


Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis keempat belas Meningkatkan pendapatan & pengelolaan keuangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Thn 2016 (%)
			Target	Realisasi	
1	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	%	79	88,84	112,45
2	Tingkat kelengkapan dokumen utama perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, KUAP-PPASP)	%	100	100	100
3	Tingkat Kelengkapan Dokumen Utama Pengendalian dan Evaluasi (evaluasi RPJMD, dan evaluasi RKPD)	%	100	10	100
4	Rasio realisasi PAD terhadap target PAD	%	100	83,39	83,39
Rata rata Capaian Kinerja					98,67

Capaian indikator kinerja rasio belanja terhadap anggaran belanja adalah sebesar 88,84% dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 79% atau dengan capaian kinerja sebesar 112,45 %,



sedangkan untuk capaian indikator kinerja tingkat kelengkapan dokumen utama perencanaan (RPJPD,RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, KUAP-PPASP) ; Tingkat kelengkapan dokumen utama pengendalian dan evaluasi (evaluasi RPJMD dan evaluasi RKPD) dan capaian kinerja tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung Negara di kota Samarinda adalah sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.

	SASARAN STRATEGIS 15
	Terwujudnya pelayanan publik berkualitas, transparan, akuntabel dan bebas korupsi.

Tabel 1.2.15.

Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis kelima belas terwujudnya pelayanan public berkualitas, transparan, akuntabel dan bebas korupsi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Thn 2016 (%)
			Target	Realisasi	
1	Kategori Penilaian laporan kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah kota Samarinda	CC	CC	CC	100%
2	Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Berdasarkan LPPD	ST (sangat tinggi)	ST (sangat tinggi)	ST	100%
3	Terbentuknya perubahan kelembagaan dan SOTK	dokumen	1	1	100%
4	Persentase unit pelayanan publik yang memiliki nilai Survey Kepuasan Masyarakat baik	%	10	30	300
5	Jumlah aplikasi e- governmentdi lingkup Pemerintah Kota Samarinda	buah	25	15	60
6	Luas tanah yang siap bangun untuk infrastruktur pemeritahan baru	ha	100		
	Rata Rata Capaian Kinerja				112,50

Capaian indikator kinerja kategori penilaian laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Samarinda adalah dengan kategori CC atau dengan capaian kinerja sebesar 100%, dengan nilai sebesar 56,11m,kegiatan didukung melalui program penguatan akuntabilitas Kinerja dengan kegiatan pembinaan, pemantauan dan evaluasi SAKIP dengan anggaran sebesar Rp. 134.000.000 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 128.894.546 atau dengan realisasi sebesar 96,70%, sedangkan kategori hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) berdasarkan LPPD adalah dengan capaian kategori sangat tinggi (ST) atau dengan capaian kinerja sebesar 100%, capaian kinerja terbentuknya perubahan kelembagaan dan SOTK adalah dengan



capaian kinerja sebesar 100% melalui program penguatan kelembagaan yang didukung dengan melalui program Penataan dan penguatan Organisasi dengan kegiatan penguatan kelembagaan dan anjab perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp.46.000.000 dengan realisasi sebesar 100%.

Selanjutnya capaian kinerja persentase unti pelayanan public yang memiliki nilai survey kepuasan masyarakat adalah sebesar 30% dari target kinerja sebesar 10% atau dengan capaian kinerja sebesar 300% , sedangkan jumlah aplikasi e-government dilingkup Pemerintah Kota Samarinda adalah sebesar 15% dari target kinerja sebesar 20% atau dengan capaian kinerja sebesar 75%, capaian indikator kinerja luas tanah yang siap bangun untuk infrastruktur pemerintahan baru adalah sebesar

B. REALISASI ANGGARAN

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 dilaksanakan tetap mengacu pada kebijakan umum sesuai yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021. Kebijakan itu mencakup kebijakan tentang pendanaan pembangunan dan arah pendapatan , belanja dan pembiayaan

Penetapan formulasi kebijakan dalam hal pendapatan, dimaksudkan agar peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2016 diupayakan untuk tetap menjaga penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, sehingga keberadaannya diharapkan dapat mewujudkan stabilitas fiskal daerah khususnya dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan kualitas pelayan publik.

- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapat, optimalisasi pengelolaan asset-aset daerah dan penyempurnaan regulasi kebijakan daerah dalam menentukan retribusi/tarif kepada masyarakat
- Peningkatan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan berdasarkan perhitungan-perhitungan riil yang berkembang dimasyarakat dengan berbagai pendekatan dengan memperhatikan keadaan kondisi masyarakat
- Peningkatan pendapatan daerah yang berasal diluar pendapatan asli daerah dilakukan peningkatan koordinasi yang lebih intens dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Kaltim dalam rangka sinergitas pembangunan
- Pemberdayaan dan peningkatan peran perusahaan daerah dengan lebih professional

1. Realisasi

a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan pada tahun 2016 PAD Kota Samarinda selama periode 2015-2016 dapat dilihat pada table berikut

Tabel 1.2.13.

Perkembangan PAD Kota Samarinda Tahun 2015 – 2016



No	Tahun	Target PAD (RPJMD)	Realisasi PAD	APBD	Proporsi Thd APBD (%)
1	2015	819.500.000.000,00	419.745.787.641,01	4.065.235.714.751,48	10,33
2	2016	469.371.060.803,39	391.404.293.920,97	2.613.861.928.835,27	14,97

Sumber data BPKAD per 27 Maret 2016

PAD Kota Samarinda Tahun 2016 diperoleh dari penerimaan Hasil Pajak daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang syah. Proporsi dari komponen PAD ini dapat digambarkan pada data sebagai berikut :

Realisasi Komponen PAD Kota Samarinda tahun 2015 – 2016

No	Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang dipisahkan	Lain lain PAD yang syah
1	2015	419.745.787.641,01	61.937.838.047,00	4.776.018.600,80	108.952.714.395,87
2	2016	290.510.000.000,00	79.724.248.000,00	5.297.911.057,00	93.838.901.746,39

Sumber data BPKAD per 27 maret 2016

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer menjadi salah satu komponen yang sangat penting bagi APBD Kota Samarinda. Pendapatan Transfer selama tahun 2016 adalah sebesar sebesar Rp.2.082.088.178.066,00 -.Pendapatan Transfer ini dapat dilihat pada tabel sebagai sebagai berikut :

Dana Transfer Tahun 2016

No	Jenis Dana Transfer	
1	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	Rp. 1.593.279.916.066,00
2	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Rp. 5.000.000.000,00
3	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 249.075.179.000,00
4	Jumlah Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi Lainnya	Rp. 234.733.083.000,00

Pendapatan dimaksud selain berasal dari pendapatan asli daerah dan pendapatan dari dana transfer daerah juga berasal dari dana perimbangan

Dana Perimbangan Kota Samarinda diperoleh dari komponen Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagai berikut :

No	Tahun	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil bukan pajak	Realisasi Dana Alokasi Umum	Realisasi DanaAlokasi Khusus
----	-------	--	-----------------------------	------------------------------



1	2015	1.153.958.189.633,00	590.233.541.000,00	97.568.524.000,00
2	2016	632.937.941.666,00	665.150.055.000,00	295.191.919.400,00

c. Lain lain pendapatan yang syah

No	Tahun	Target RPJMD	Realisasi Dana Lain- Lain	APBD	Proporsi Thd APBD %
1	2015	467.280.275.288,-	897.193.002.550,-	4.065.235.741.751,48	22,06
2	2016		62.402.689.965.,88	2.624.916.838.977,28	

3. Belanja

a. Kebijakan Umum

Prinsip kebijakan perencanaan belanja daerah disesuaikan dengan kekuatan keuangan yang dimiliki. Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Samarinda disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang telah direncanakan. Belanja Tidak Langsung. Strategis kebijakan pengelolaan belanja daerah tahun 2016 diarahkan dan dititik beratkan pada :

b. Belanja Tidak Langsung.

- Belanja pegawai yang pengalokasian dananya untuk gaji dan belanja pegawai berdasarkan prestasi kerja serta adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNS daerah.
- Belanja hibah yang diberikan kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan atau kelompok masyarakat/perorangan, sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi tercapainya keamanan dan ketertiban di daerah, seperti penanggulangan bencana alam dan bantuan sosial yang tidak diperkirakan

c. Belanja Langsung

Kebijakan perencanaan penggunaan belanja langsung tahun anggaran 2014 adalah ::



- a) Belanja langsung program kegiatan pada setiap SKPD. Belanja ini diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- b) Belanja langsung urusan wajib dan pilihan. Untuk tahun 2016 belanja ini digunakan untuk :
- Mendanai program dan kegiatan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
 - Mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, kependudukan, kelautan dan perikanan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut :

- Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
- Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja

Laporan Realisasi APBD Kota Samarinda Tahun 2016

N o	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang)(Rp)
1	Pendapatan			
a	Pendapatan Asli Daerah	469.371.060.803,39	391.404.293.290,97	(77.966.767.512,42)
b	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana perimbangan)	1.593.279.916.066,00	1.617.965.303.098,00	24.685.387.032,00
c	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
d	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	249.075.179.000,00	188.523.970.000,00	(60.551.209.000,00)
f	Pendapatan Bantuan Keuangan dari	234.733.083.000,00	234.733.083.000,00	0.00



	Pemerintah Provinsi			
g	Lain lain pendapatan yang sah	62.402.689.965,00	62.402.689.965,00	0,00
2	Belanja			
a	Belanja Operasi	1.871.664.295.308,24	1.635.116.706.291,21	2.027.136.296.511,36
b	Belanja Modal	750.252.543.669,04	695.737.176.719,43	(54.515.366.949,61)
c	Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00	1.075.015.572,00	(1.924.984.428,00)
	Jumlah belanja	2.624.916.838.977,28	2.331.928.898.582,64	3.234.540.741.278,12
	Surplus/Defisit	(11.054.910.142,01)	105.697.750.806,33	(379.204.831.419,12)
3	Pembiayaan			
	Penerimaan pembiayaan : Penggunaan SILPA	73.457.600.107,89	73.457.600.107,89	0,00
4	Pengeluaran Pembiayaan: Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	62.402.689.965,88	0,00	0,00
5	Pembiayaan Netto	11.054.910.142,01	73.457.600.107,89	62.402.689.914,22
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	179.155.350.914,22	179.155.350.914,22

Sumber data BPKAD laporan Realisasi APBD per 27 Maret 2017

C. CAPAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2010-2015

Capaian Misi 1 Menciptakan dan meningkatkan fasilitas umum dan utilitas penunjang sector industri, perdagangan dan jasa sebagai basis untuk menuju kota metropolitan

Program	Indikator	Target RPJMD	Capaian	%
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Penataan kawasan citra niaga dan pinggiran sungai mahakam secara bertahap	100% penataan wilayah	50% penataan wilayah	50%
Program peningkatan perhubungan	Revitalisasi transportasi publik	100%	Baru memasuki tahap rehabilitasi halte	0%
	Penataan parkir dengan model central parking	100%	0%	30%



Program	Indikator	Target RPJMD	Capaian	%
Program peningkatan kualitas pemukiman	Pembangunan perumahan 1000 unit untuk relokasi masyarakat SKM	1000 unit	22 unit (sudah dipersiapkan tujuan relokasi warga SKM yaitu perumahan bengkuring idaman permai, sambutan idaman permai, sambutan asri, sambutan handil kopi, damanhuri, dan talang sari)	2,2%
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Semenisasi seluruh gang dan jalan pendekat	3000 gang	3090 gang	100%
Program penataan ruang daerah	Tersedianya ruang publik pada 10 kecamatan dalam bentuk taman	10 buah	6 buah (mahakam lampion garden, teluk lerong garden, taman lampion, taman air mancur biru, taman cerdas, taman eks SMP 1 dan SMA 1)	60%

Dalam perjalanannya pembangunan Kota Samarinda selama 5 tahun terakhir sejak 2011 sampai 2015, penataan kawasan citra niaga tidak terlaksana dengan baik dikarenakan tingginya permasalahan sosial yang muncul. Tidak terlaksananya pembangunan tersebut bukan berarti tidak ada capaian, hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan pemerintah Kota Samarinda dalam merelokasi PKL secara damai dari kawasan Citra Niaga ke GOR Segiri Samarinda.

Sedangkan untuk penataan pinggiran sungai mahakam yang difokuskan pada pembangunan taman dan arena hiburan anak antara lain pembangunan jembatan yang representatif dalam fungsinya sebagai arus lalu lintas maupun sebagai estetika kota yang terdapat di Jalan Gajah Mada. Sedangkan untuk penataan taman sebagai arena rekreasi anak dan keluarga telah diresmikan dan dapat dinikmati secara umum yaitu :



- a. Pembangunan taman lampion disekitar air mancur patung pesut tepat di depan kantor Gubernur Provinsi Kaltim Jl.Gajah Mada.
- b. Pembangunan Teluk Lerong Garden dan Monumen Perahu Tambangan tepat disebelah SPBU Jl.RE. Martadinata.
- c. Pembangunan Mahakam Lampion Garden Jl.Slamet Riyadi yang secara resmi dibuka pada tahun 2015.
- d. Arena bermain anak di Jl.Slamet Riyadi.

Selain tepian mahakan, pembangunan taman di pertengahan kota dan relokasi PKL juga terus menjadi perhatian pemkot. Sampai tahun 2015 capaian kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Kota Samarinda guna meningkatkan ruang terbuka hijau adalah melalui pembangunan taman. Sampai saat ini beberapa taman sudah dibangun, antara lain:

- a. Mahakam lampion garden,
- b. Teluk lerong garden,
- c. Taman segiri, taman cerdas, taman samarendah, dan taman sejati.

Dalam rangka mewujudkan ruang kota yang layak huni, pemerintah Kota Samarinda juga melakukan Penataan dan relokasi PKL. Empat titik/lokasi yang menjadi fokus pemkot diantaranya:

- a. Merelokasi PKL pasar pagi dan pasar segiri melalui penataan tempat berjualan,
- b. PKL pasar sungai dama dilakukan relokasi ke pasar yang baru semi modern, dan
- c. PKL citra niaga telah direlokasi ke daerah GOR Segiri

Capaian Misi 2 penanggulangan persoalan banjir secara tuntas dan menyeluruh

Program	Indikator	Target RPJMD	Capaian	%
Program peningkatan pelayanan irigasi dan pengendalian banjir	Berkurangnya daerah rawan banjir	2% dari luas Samarinda	2,43% dari luas Samarinda (luas banjir 1747 Ha)	99,5%

Pemerintah Kota Samarinda terus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan banjir. Bukan hanya sarana fisik seperti drainase dan folder, berbagai peralatan diadakan untuk meminimalisasi banjir. Terdapat beberapa Kawasan rawan banjir dikota Samarinda meliputi Kelurahan Sempaja, Kelurahan Lempake, Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Loa Bahu, Kelurahan Sungai Siring, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Sungai Kapih, Kelurahan Pulau



Atas, Kelurahan Sindang Sari, Kelurahan Loa Janan Ilir, Kelurahan Simpang Pasir, Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Bukuan, Kelurahan Bentuas, Kelurahan Karang Asam, dan Kelurahan Gunung Kelua. Berdasarkan hal tersebut diatas maka pemerintah dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Selama periode tahun 2011 sampai dengan 2015, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk penanggulangan banjir diantaranya:

- a. Penyediaan infrastruktur pengendali banjir
- b. Membuat polder air dan memaksimalkan polder yang ada
- c. Membuat drainase pada titik daerah rawan banjir dan revitalisasi pada drainase yang sudah tidak berfungsi lagi.

Melalui upaya-upaya diatas, sampai tahun 2015 luas genangan banjir di Kota Samarinda memperlihatkan penurunan dari 2,55% menjadi 2,43%, sementara target adalah menjadikan luas genangan sebesar 2% dari luas Kota Samarinda. Angka ini memperlihatkan bahwa kinerja pemkot dalam pengendalian banjir masih belum memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJM 2011 – 2015.

Capaian Misi 3 penanggulangan persoalan kebakaran secara tuntas dan menyeluruh

Program	Indikator	Target RPJMD	Capaian	%
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Meminimalkan kasus bencana kebakaran melalui peningkatan sarana dan prasarana pemadam, instalasi listrik dan sosialisasi penanganan kebakaran secara dini kepada masyarakat*	100% perlengkapan sarana prasarana	100% perlengkapan sarana prasarana sudah dipenuhi	100%

Proteksi kebakaran adalah merupakan aspek paling utama dalam program perlindungan kebakaran. Perencanaan yang baik dalam aktifitas pencegahan kebakaran akan dapat menyelamatkan miliaran rupiah dan juga nyawa manusia akibat kebakaran. Salah satu penyebab utama terjadinya kebakaran adalah tindakan tidak aman atau kondisi lingkungan yang kurang baik. Dengan memperbaiki tindakan tidak aman dan kondisi lingkungan kerja maka penyebab terjadinya kebakaran dapat dikurangi.



Warga Kota Samarinda saat ini tengah dibuat gelisah dengan musibah kebakaran yang datang silih berganti, dalam jangka waktu 1-3 hari. Bahkan terdapat kejadian kebakaran dalam 1 hari di dua lokasi. Dari data yang ada pada BPDB Kota Samarinda, kerugian yang terjadi akibat kebakaran di kota Samarinda, dari bulan Januari-Juni, atau semester pertama 2015, mencapai angka Rp 10 Miliar. Angka tersebut belum ditambah dengan kerugian pada bulan Agustus, yang telah tercatat terdapat 11 kali kejadian kebakaran. Tercatat, sudah terjadi 67 kali kejadian kebakaran yang terjadi di Samarinda pada sampai Oktober 2015, dengan 684 jiwa kehilangan tempat tinggal. Jumlah tersebut merupakan setengah dari kejadian kebakaran yang terjadi pada tahun 2014 silam, yang berjumlah 123 kejadian. Tidak hanya menghancurkan bangunan rumah, namun juga toko dan lahan.

Bila melihat penekanan program untuk mendukung misi ini adalah pemenuhan perlengkapan sarana prasarana pemadam, untuk sarana prasarana bahkan sudah dipenuhi 100%, namun masih belum memberikan efek pada penurunan bencana kebakaran, bahkan cenderung meningkat dari 67 kejadian tahun 2011 menjadi 123 kejadian tahun 2014.

Capaian Misi 4 Penciptaan dan Peningkatan Kehidupan Kesehatan Masyarakat

Program	Indikator	Target RPJMD	Capaian	%
Program peningkatan keterjangkauan pelayanan kesehatan	Meningkatnya pelayanan Jaminan kesehatan masyarakat*	100% program dilaksanakan	100% program dilaksanakan oleh DKK melalui UPTD Jamkesda	100%
Program peningkatan pelayanan irigasi dan pengendalian banjir	Terpenuhinya distribusi air bersih secara bertahap sampai dengan tahun 2015*	100% distribusi air bersih	99,07% rumah tangga memperoleh air bersih	99,07%

Tercapainya misi dibidang kesehatan melalui program peningkatan keterjangkauan pelayanan kesehatan dapat dilihat dari meningkatnya pelayanan jaminan kesehatan masyarakat melalui program Jamkesda yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda melalui UPTD Jamkesda. Hampir seluruh masyarakat samarinda yang telah terdaftar dalm program Jamkesda telah menggunakan program ini yang dapat dilihat dari tingkat partisipan dari setiap Puskesmas maupun Rumah Sakit yang melayani program Jamkesda tersebut. Walaupun program ini telah berjalan 100%, fokus kita



mendatang untuk mempertahankan capaian misi ini adalah menjaga konsistensi pelaksanaan Jamkesda melalui penguatan data masyarakat target/sasaran.

Salah satu program penunjang lainnya pada misi ini adalah program peningkatan pelayanan irigasi dan pengendalian banjir, target dari misi ini adalah terpenuhinya distribusi air secara bertahap sampai tahun 2015. Adapun capaian dari program ini adalah 99,07% rumah tangga yang memperoleh air bersih. Dalam misi ini, masih banyak kendala yang harus dihadapi dan harus diperbaiki kedepannya, masih banyak daerah di samarinda yang belum menikmati jaringan air bersih seperti Lempake, Tanah Merah, Pampang dan Sei Siring. Para stakeholder terkait harus mampu berusaha mengoptimalkan pelayanannya kepada seluruh masyarakat samarinda, sehingga target 100% distribusi air bersih dapat dirasakan seluruh masyarakat samarinda.

Capaian Misi 5 Mengembangkan Sektor Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Yang Professional dan Religious

Program	Indikator	Target RPJMD	Capaian	%
Program pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan	Rehabilitasi gedung sekolah dasar dengan bangunan kayu menjadi bangunan permanen selesai dalam 5 tahun*	100% bangunan permanen	95% bangunan permanen, namun beberapa gedung masih belum memenuhi standar minimal dan standar kelayakan	95%
	Program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun	9 tahun rata-rata lama sekolah	10,26 tahun rata-rata lama sekolah	100%
	Persentase sekolah yang permanen	90,63% bangunan permanen	93% bangunan permanen, tapi masih ada beberapa yang belum memenuhi kriteria standar minimal dan standar kelayakan	100%
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Program pengembangan perpustakaan	100% program berjalan	49,14% sekolah memiliki perpustakaan	49,14%

Melihat capaian diatas, maka misi ini belum tercapai secara maksimal. Ini dapat dilihat dari program pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dengan indikator rehabilitasi gedung sekolah dasar dengan bangunan kayu menjadi bangunan permanen yang telah mencapai 95%,



walaupun masih ada beberapa gedung yang belum memenuhi standar minimal dan standar kelayakan. Capaian ini sebagian besar didukung oleh program Block Grant dari APBN sejak tahun 2012 hingga sekarang yang difokuskan pada pembangunan ruang kelas

permanen. Sehingga untuk APBD Kota Samarinda bisa difokuskan pada pemenuhan standar minimal dan standar kelayakan gedung sekolah, dan pembangunan gedung sekolah beserta penunjangnya.

Indikator lain dari misi ini adalah program wajib belajar 9 tahun yang telah tercapai, dan kedepannya pemerintah Kota Samarinda akan meningkatkan target menjadi wajib belajar 12 Tahun. Program pengembangan perpustakaan juga harus diperhatikan kedepannya dikarenakan program ini baru berjalan 49,14% dari target 100%. Sekolah-sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta harus memiliki perpustakaan yang memadai sebagai penunjang syarat-syarat akademis.

Capaian Misi 6 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Income Perkapita Masyarakat Kota Samarinda ke Tingkat Pertumbuhan Yang Lebih Tinggi Dalam Setiap Tahun

Program	Indikator	Target RPJMD	Capaian	%
Peningkatan bantuan masyarakat miskin dan penanganan kemiskinan dan masalah sosial lainnya	Penurunan angka kemiskinan maksimum 5% tahun 2015	5% penurunan	0,65% penurunan	11,60%
Program peningkatan investasi daerah	Program peningkatan dan promosi kerjasama investasi	15% pertumbuhan investasi	28% pertumbuhan investasi	100%
Program perluasan kesempatan kerja	Penurunan angka pengangguran maksimal 5% pada tahun 2015*	5% penurunan	2,3% penurunan	46%
Program peningkatan kualitas kelembagaan KUKM	Bantuan stimulan/permodalan UMKM untuk 1000 unit/orang pertahun sampai tahun 2015*	1000 UMKM	Tidak ada capaian, karena penyaluran bantuan harus melalui BLUD, sementara untuk permodalan diarahkan ke BPR	0%

Capaian misi ini dapat dilihat melalui capaian indikator-indikatornya. Indikator program pertama peningkatan bantuan masyarakat miskin dan penanganan kemiskinan dan masalah sosial lainnya yaitu penurunan angka kemiskinan dengan target maksimum 5%. Walaupun dalam penerapan



program tersebut, capaian yang diperoleh hanya sebesar 0,65%. Kendala yang dihadapi dalam program ini adalah, kurangnya database yang valid tentang Gakin, sehingga banyak gakin yang belum terdaftar secara maksimal.

Program penunjang lainnya adalah program peningkatan investasi daerah melalui peningkatan dan promosi kerjasama investasi. Untuk pertumbuhan investasi menunjukkan hasil yang sangat baik, dimana Kota Samarinda mampu tumbuh 28% dari 3,2 trilyun tahun 2011 menjadi 4,1 trilyun tahun 2014.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda pada tahun mendatang, pemerintah perlu memaksimalkan penurunan angka pengangguran hingga 5%, memberi bantuan stimulan modal untuk UMKM yang belum berjalan sampai saat ini, serta menggali dan mengembangkan potensi daerah khususnya industri dan perdagangan. Dari angka pengangguran, pemerintah Kota Samarinda mampu menunjukkan penurunan yang signifikan, yaitu dari 10,9% tahun 2011 menjadi 5,61% tahun 2014 atau turun 5,29% yang artinya melampaui target RPJMD.

Capaian Misi 7 Peningkatan Kehidupan Beragama, Pemuda dan Olahraga Serta Sosial Budaya Yang Lebih Dinamis dan Kondusif Sehingga tercipta Iklim Kehidupan Yang Lebih Produktif

Program	Indikator	Target RPJMD	Capaian	%
Program pemberdayaan masyarakat desa	Terwujudnya program kampung HBS (hijau, bersih, sehat) dalam mendukung Kaltim Green*	30% Kelurahan HBS	55,9% kelurahan HBS (33 kelurahan yang melaksanakan HBS dari 59 kelurahan di Kota Samarinda)	100%
Program peningkatan keamanan dan wawasan kebangsaan	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	100% program berjalan	87,24% (kegiatan pembinaan dilaksanakan rutin satu tahun sekali, melibatkan kemitraan dengan polresta, kodim, kantor imigrasi, kementerian hukum dan HAM, serta kalangan akademis)	87,24%
Program pembinaan pemuda dan peningkatan prestasi olahraga	Program peningkatan peran serta kepemudaan	12 kegiatan kepemudaan	14 kegiatan kepemudaan	100%



Capaian misi ini dapat dilihat dari capaian setiap indikator, seperti program pemberdayaan masyarakat desa melalui program HBS yang bersinergi dengan program Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kaltim Green. Program HBS ini telah mencapai 55,9% atau telah 33 Kelurahan yang melaksanakan program HBS dari 59 Kelurahan yang ada di Kota Samarinda pada tahun 2013. Selain itu, untuk mendukung misi peningkatan kehidupan beragama, pemuda, dan olahraga serta sosial budaya yang lebih dinamis dan kondusif, maka pemerintah harus meningkatkan program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan melalui kegiatan pembinaan rutin satu tahun sekali yang melibatkan stakholder-stakeholder terkait, seperti aparat pemerintahan, aparat keamanan, tokoh pemuda dan tokoh agama serta kalangan akademisi, serta secara rutin menjalin komunikasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Dan yang paling penting kedepannya pemerintah harus fokus untuk mempertahankan suasana kondusif dalam mendukung peningkatan investasi di Kota Samarinda.

Capaian Misi 8 Pemantapan Keuangan Daerah dan Pembiayaan Pembangunan di Daerah

Program	Indikator	Target RPJMD	Capaian	%
Program pembinaan dan penagihan pajak dan retribusi daerah	Program penyusunan dan pendokumentasian pajak dan retribusi daerah	38 pajak/retribusi	38 pajak/retribusi (11 pajak daerah, 12 retribusi jasa umum, 10 retribusi jasa usaha, dan 5 retribusi perizinan tertentu)	100%
	Pemanfaatan teknologi informasi keuangan daerah	100% program berjalan	100% program dilaksanakan (penerapan sistem pajak dan retribusi online untuk wajib pajak tertentu)	100%

Capaian misi ini mencapai target 100%, Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pendapatan Daerah bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia sejak tahun 2013 telah menerapkan sistem pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah melalui sistem online terutama untuk wajib pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir sebagaimana tertuang dalam Perwali Kota Samarinda No.37 Tahun 2013. Dengan semakin membaiknya prosedur administrasi yang diterapkan, maka capaian yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Samarinda telah sejalan dengan target yang dicanangkan yaitu 38 pajak/retribusi yang meliputi 11 pajak daerah, 12 retribusi jasa umum, 10 retribusi jasa usaha, dan 5 retribusi perizinan tertentu. Dari upaya tersebut, pemkot memperoleh pendapatan khusus dari sisi PAD berkisar antara 128 milyar hingga 407 milyar dengan rata-rata persentase terhadap total pendapatan adalah 12,32%. Persentase ini menunjukkan bahwa keuangan pemkot masih sangat ketergantungan dengan



dana transfer dari APBN maupun Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim. Untuk itu kedepannya pemkot harus bekerja lebih keras melibatkan peran serta pihak swasta untuk pembangunan kota.

Capaian Misi 9 peningkatan good government dan pemerintah kota yang dinamis

Program	Indikator	Target RPJMD	Capaian	%
Program penelitian, perencanaan dan pengendalian pembangunan	Inovasi dan evaluasi pembangunan daerah	100% program berjalan	100% program dilaksanakan (3 tahun berturut-turut Bappeda melakukan survey publik kepuasan masyarakat atas pembangunan Kota Samarinda)	100%
Program peningkatan pelayanan perijinan	Program peningkatan sarana dan prasarana perijinan	100% program berjalan	61% perijinan sistem online	61%

Misi ini ditujukan untuk memperlihatkan sejauh mana program-program pemerintah Kota Samarinda dapat diterima masyarakat sebagai implementasi dari Good Government. Dalam periode 2011-2015, pemkot melalui Bappeda melakukan survey publik kepuasan masyarakat untuk periode pemerintahan 2011-2012 dan 2012-2013. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Untuk periode 2011-2012 tingkat kepuasan masyarakat adalah 37,13% dengan kepuasan tertinggi ada pada misi 7 (kepuasan 56,67%).
2. Untuk periode 2012-2013 tingkat kepuasan masyarakat adalah 25,96% dengan kepuasan tertinggi ada pada misi 7 (kepuasan 53,06%).

Berdasarkan hasil diatas, maka dapat dikatakan Good Government di Kota Samarinda tidak berjalan dikarenakan program-programnya belum mampu memuaskan masyarakat.

2.1. Evaluasi Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal

SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak bagi setiap warga untuk memperoleh pelayanan, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengadakannya. Dari sisi manajemen pemerintahan, bidang-bidang pelayanan dasar yang tercakup dalam SPM ini termasuk dalam penyelenggaraan urusan wajib (bukan pilihan).

Dengan demikian, pembiayaannya dalam APBD maupun APBN menjadi prioritas. Terkait dengan pengadaan pelayanan dasar, untuk menjamin akses dan mutu pelayanannya, disusunlah Standar



Pelayanan Minimal (SPM)-nya. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa mau tidak mau harus diselenggarakan tanpa melihat pada potensi maupun pertumbuhan daerah, karena pelayanan minimal ini menjadi bagian dari penyelenggaraan urusan wajib. Penerapan SPM menjadi sangat urgen dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud. Capaian pelayanan minimal di Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut :

**Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Kota Samarinda Tahun 2015**

No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi (2015)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kesehatan				
1.1	Pelayanan Kesehatan Dasar	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.	95	2015	95,12
		Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yg ditangani	80	2015	99,87
		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan	90	2015	95,99
		Cakupan pelayanan Ibu Nifas	90	2015	84,56
		Cakupan neonatal dengan komplikasi yg ditangani.	80	2010	38,71
		Cakupan kunjungan bayi.	90	2010	83,61
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI).	100	2010	89,83
		Cakupan pelayanan anak balita.	90	2010	47
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan keluarga miskin.	100	2010	100
		Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan.	100	2010	100
		Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat.	100	2010	91,97
		Cakupan peserta KB Aktif.	70	2010	62,8
		Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit.	100	2010	73,55
		Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun	100	2010	100
		Penemuan penderita pneumonia balita	100	2010	100
		Penemuan pasien baru TB BTA Positif	100	2010	100
		Penderita DBD yang ditangani	100	2010	100
		Penemuan penderita Diare	100	2010	100
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin.	100	2015	100
1.2	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.	100	2015	100
		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kota Samarinda.	100	2015	100



No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi (2015)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.3	Penyelidikan epidemiologi dan Penanggulangan KLB	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam.	100	2015	100
1.4	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif.	80	2015	72
2	Sosial				
2.1	pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kota.	Persentase (%) PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar panti sosial skala kota.	80	2015	355,5
2.2	pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kota	Persentase (%) PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80	2015	304,55
2.3	penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kota.	Persentase (%) panti sosial skala kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80	2015	80
2.4	penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kota	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60	2015	100
2.5	bantuan sosial bagi korban bencana skala Kota	Persentase (%) korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80	2015	68
2.6	evakuasi korban bencana skala Kota	Persentase (%) korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80	2015	90,00
2.7	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.	40	2015	100
3	Lingkungan Hidup				
3.1	Pelayanan pencegahan pencemaran air	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100	2013	96
3.2	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	100	2013	100
3.3	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100	2013	5



No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi (2015)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.4	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti,	100	2013	100
4	Pemerintahan Dalam Negeri				
4.1	Pelayanan Dokumen Kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	90%	2015	80%
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99%	2015	95%
		Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	80%	2020	18,13%
		Cakupan penerbitan Akta Kematian	30%	2015	20%
4.2	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Cakupan Penegakkan Perda dan Peraturan Kepala daerah	100%	2015	100%
		Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3x patroli	2014	3x patroli Sehari
		Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1 Orang per RT	2014	1 Orang per RT – 0,089 = 0,911
4.3	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Samarinda	80	2015	80
		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75	2015	100
		Presentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85	2015	85
		Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000 – 5000 Liter pada WMK	90	2015	90
5	Perumahan Rakyat				
5.1	Rumah Layak Huni Dan Terjangkau	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100	2009-2025	90,26
		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70	2009-2025	74,17
5.2	Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	70	2009-2025	70
6	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak				
6.1	Penanganan pengaduan/ laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	2015	100



No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi (2015)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.2	Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS	100	2015	100
6.3	Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75	2015	75
		Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75	2015	75
6.4	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80	2015	75
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	80	2015	75
6.5	Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	80	2015	75
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	80	2015	75
7	Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera				
7.1	Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun 3,5%	3.5	2014	2,45
		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif 65%	65	2014	80,17
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 5,0%	5.0	2014	9,86
		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%	70	2014	71,89
		Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan 87%	87	2014	76,67
		Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 kelurahan	1 petugas 2 kelurahan	2014	0,92



No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi (2015)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Ratio Pembantu Pembina KB 1 petugas di setiap kelurahan	1 Petugas di setiap kelurahan	2014	1
7.2	Penyediaan alat dan obat kontrasepsi	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	30	2014	0
7.3	Penyediaan Informasi data mikro	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan 100% setiap tahun	100	2014	100
8	Pendidikan				
8.1	Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/Kota	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	-	2014	100
		Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis	100	2014	85,43
		Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	-	2014	62,20
		Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru	-	2014	89,4
		Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	-	2014	100
		Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	-	2014	100



No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi (2015)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akedemik S-1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	-	2014	85,51
		Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akedemik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	-	2014	53,09
		Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akedemik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris	-	2014	35,80
		Disetiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualitas akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	-	2014	79,49
		Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualitas akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	-	2014	81,71
		Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	-	2014	79,71
		Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu saluran pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	-	2014	100
		Kunjungan pengawas kesatuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	-	2014	45,83
8.2	Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	-	2014	21,03
		Setiap SMP/MTs menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA	-	2014	9,76



No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi (2015)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA	-	2014	50,93
		Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi	-	2014	46,91
		Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam perminggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan	-	2014	40,01
		Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :	-	2014	59,97
		- Kelas I – II: 18 Jam per minggu	-		
		- Kelas III: 24 Jam per minggu	-		
		- Kelas IV – VI: 27 Jam per minggu	-		
		- Kelas VII – IX: 27 Jam per minggu	-		
		Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku	-	2014	96,62
		Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	-	2014	81,26
		Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	-	2014	74,65
		Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	-	2014	48,17
		Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik	-	2014	81,31



No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi (2015)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan ulangan kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau kantor Kementerian Agama di kabupaten/Kota pada setiap akhir semester	-	2014	96,53
		Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).	-	2014	77,85
9	Ketenagakerjaan				
9.1	Pelayanan Pelatihan Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75	2016	100
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60	2016	75
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60	2016	47,62
9.2	Pelayanan Penempatan Tenaga kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70	2016	71,45
9.3	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50	2016	78,64
9.4	Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	70	2016	71,45
9.5	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	45	2016	96,15
		Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	50	2016	100
10	Komunikasi & Informatika				
10.1	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian	Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;	100	2015	75
		Media baru seperti website (media online);	100	2015	50
		Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	100	2015	75
		Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi, dan lokakarya; dan/atau	100	2015	75
10.2	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan	100	2015	50
11	Ketahanan Pangan				



No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi (2015)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.1	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Ketersediaan energi dan protein perkapita	100	2015	85
		Penguatan Cadangan pangan			
11.2	Distribusi dan Akses Pangan	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah			
		Stabilitas harga dan pasokan pangan			
11.3	Penganeka-ragaman dan Keamanan Pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)			
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan			
11.4	Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan daerah rawan pangan			
12	Perhubungan				
12.1	Angkutan Jalan				
12.1.1	Jalan Jaringan Pelayanan Angkutan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	75	2014	100
		Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.	60	2014	100
12.1.2	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100	2014	98
		Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	40	2014	77,78
12.1.3	Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	60	2014	87,67
12.1.4	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	60	2014	100
12.1.5	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	50	2014	93,67
		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	100	2014	50



No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi (2015)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	40	2014	85,67
		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum.	100	2014	40
12.1.6	Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	100	2014	100
12.2	Angkutan Sungai dan danau.				
12.2.1	Jaringan Pelayanan Angkutan	Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	75	2014	100
		Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	40	2014	100
12.2.2	Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.	60	2014	100
12.2.3	Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota.	100	2014	90
12.2.4	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.	50	2014	75,48
12.3	Angkutan Penyeberangan				
12.3.1	Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kab/Kota.	60	2014	60



No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi (2015)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	100	2014	100
12.3.2	Jaringan Prasarana angkutan Penyeberangan	Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.	60	2014	60
12.3.3	Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	100	2014	100
12.3.4	Sumber daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	50	2014	50
12.4	Angkutan Pelayanan Laut				
12.4.1	Jaringan Pelayanan Angkutan Laut	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	90	2014	90
		Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	100	2014	100
12.4.2	Jaringan Prasarana Angkutan Laut	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	60	2014	60
12.4.3	Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.	100	2014	100



No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi (2015)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.4.4	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT.	100	2014	100
13	Penanaman Modal				
13.1	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedia informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 (satu) sektor/bidang usaha/tahun	2015	0
13.2	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota	1 (satu) kali/tahun	2015	13
13.3	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaraanya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/tahun	2015	0
13.4	Penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/tahun	2015	2
13.5	Izin Lokasi/penetapan Lokasi	Terselenggaranya pelayanan perizinan Izin Lokasi/Penetapan Lokasi	80	2015	80
13.6	Izin Peruntukan Penggunaan Lahan	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	80	2015	80
13.7	Izin Pematangan Lahan	Terselenggaranya pelayanan perizinan izin pematangan lahan	80	2015	80
13.8	Izin sosial	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan	100	2015	100
		- Izin operasional organisasi sosial		2015	
		- Tanda daftar organisasi		2015	
13.9	Izin Limbah	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan	80	2015	80
		- Izin Pembuangan air limbah		2015	
		- Izin Tempat Penyimpanan		2015	
13.10	Surat izin tempat usaha	Surat izin tempat usaha	100	2015	100
13.11	Surat Izin usaha kepariwisataan	Surat Izin usaha kepariwisataan	100	2015	100
13.12	Izin mendirikan bangunan	Izin mendirikan bangunan	100	2015	100
13.13	Surat izin usaha perdagangan	Surat izin usaha perdagangan	100	2015	100
13.14	Tanda daftar perusahaan	Tanda daftar perusahaan	100	2015	100
13.15	Tanda daftar gudang	Tanda daftar gudang	100	2015	100
13.16	Tanda daftar industri	Tanda daftar industri	100	2015	100
13.17	Surat izin usaha penyelenggaraan pelayanan informasi dan promosi	Surat izin usaha penyelenggaraan pelayanan informasi dan promosi	100	2015	100
13.18	Izin reklame	Izin reklame	100	2015	100
13.19	Surat izin usaha jasa konstruksi	Surat izin usaha jasa konstruksi	100	2015	100
13.20	Izin usaha ketenagalistrikan	Izin usaha ketenagalistrikan	100	2015	100
13.21	Izin bahan bakar minyak	Izin bahan bakar minyak	100	2015	100



No	Bidang/Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi (2015)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.22	Izin penumpukan kayu bundaran, kayu masak dan bahan bangunan lainnya	Izin penumpukan kayu bundaran, kayu masak dan bahan bangunan lainnya	100	2015	100

BAB IV

P E N U T U P

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016 yang merupakan laporan akhir masa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) 2016-2021 dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Samarinda telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya . Pada tahun 2016 sasaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2011 tentang RPJMD Tahun 2016 – 2021 dan dokumen Perencanaan Lainnya.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran singkat pencapaian sasaran strategis maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari Visi , misi dan strategis pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan .

Penyelenggaraan pemerintah yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan adalah merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 15 (lima belas) sasaran strategis beserta indikator kinerja Pemerintah Kota Samarinda menunjukkan masih terdapat beberapa indikator kinerja capaiannya belum seperti yang diharapkan. Sasaran strategis yang capaian kinerjanya masih dibawah 50% adalah 1) meningkatnya sarana dan prasarana sekolah ; 2) Fasilitasi bagi santri keluarga tidak mampu di pesantren, untuk sasaran ini pada awal tahun RPJMD 2016-2021 sementara memang belum ditargetkan namun pada akhir masa RPJMD ditargetkan sebanyak 200 orang, sedangkan beberapan sasaran sudah mencapai target bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan dengan kategori baik.

Ketidak capaian ini bukan semata-mata tidak berkinerjanya aparatur Pemerintah Kota Samarinda, tetapi juga disebabkan keterbatasan anggaran, sehingga untuk menyikapi permasalahan tersebut diatas upaya yang ditempuh antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penataan infrastruktur / tata ruang, pengendalian banjir serta sarana dan prasarana pendidikan dasar dan kesehatan



dengan meningkatkan penganggaran belanja publik dan mengkampanyekan program pembangunan Kota Samarinda.

2. Upaya yang masif seluruh aparatur Pemerintah Kota untuk mewujudkan pemerintah yang peduli dengan kepentingan masyarakat dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Namun secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap sasaran strategis beberapa indikator kinerja yang dicantumkan dalam RPJMD Kota Samarinda tahun 2016-2021 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia. Karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidak mampuan harus menjadi motivasi untuk lebih baik.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Terlaksananya pengendalian banjir & relokasi Tepi SKM	Jumlah titik banjir	42 Titik(45 titik) target dinas	43	95,56
		Persentase Drainase kota dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	55%	50	90,91
		Drainase lingkungan/permukiman dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	100%	50	50
		Persentase Pembangunan turap di wilayah aliran sungai	0%	0	0
		Persentase kawasan kumuh di tepi DAS Karang Mumus	100%	100	100
		Persentase kawasan kumuh	0.49%	0	0
		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1 kali/hari/kec	1	100
		Kegiatan Penegakan hukum lingkungan	25 kali/tahun	15	60
		Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang	100%	50	50

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2	Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Sehat dan Kota Bebas Narkoba	Persentase puskesmas memberikan pelayanan sesuai standar termasuk puskesmas rawat inap	10%	21	210
		Persentase kunjungan rujukan di fasyankes strata 2 dan strata 3	100%	100	100
		Persentase tersedianya obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan di puskesmas	100%	100	100
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (SPM)	100%	100	100
		Persentase balita gizi kurang	12%	12	100
		Persentase Ibu hamil mendapat tablet tambah darah (TTD)	80%	80	100
		Cakupan bayi < 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	45%	81	180
		Persentase kelurahan yang mempunyai SOPkseiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	100%	100	100
		Angka kejadian semua kasus TB (CNR Seluruh Kasus TB per 100.000 penduduk)	100%	72	72
		Cakupan penemuan dan penanganan kasus baru HIV AIDS	50%	69	138
		Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (SPM)	100%	96,61	96,61
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4) (SPM)	95%	95	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (SPM)	85%	93	109
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (SPM)	90%	94	104
		Persentase puskesmas yang melakukan kelas ibu hamil (SPM)	78%	80	103
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (SPM)	90%	87	97
		Cakupan kunjungan bayi (SPM)	80%	91	114
		Cakupan pelayanan anak balita (SPM)	80%	60	75
		Cakupan pelayanan kesehatan lansia (60+ Th)	70%	100	143
		Persentase puskesmas menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja	75%	60	80
		Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	13 Unit	13	100
		Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai	90%	90	100
		Jumlah sarana prasarana rumah sakit rujukan yang memenuhi standar	13 Buah	5	38
		Rasio rumah sakit per satuan penduduk	13 Unit	15	115
		Cakupan kelurahan siaga aktif (SPM)	100%	75	75
		Persentase kelurahan siaga aktif mandiri (SPM)	100%	0	0
		Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	55%	79	144

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	100%	45,35	45,35
		Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba	30 kasus	81	101
		Persentase fasyankes institusi penerima wajib lapor (IPWL) pecandu narkoba yang aktif	5%	5	100
3	Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	41,17 %	36,15	87
		Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A/SDLB	111,58%	64,67	57
		Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	98,80%	53,84	54
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/SDLB	93,40%	91,72	98
		Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	67,73%	64,67	93,73
		Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	81,69%	67,79	82,99
		Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	90,94%	82,95	91,22
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100	100
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	100	100
		Persentase Sekolah SD/MI terakreditasi B dan A.	88,36%	0	0
		Persentase Sekolah SMP/MTs terakreditasi B dan A.	89,74%	0	0
4	Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah	Persentase Ruang kelas SD/MI kondisi baik	78,21%	47,01	60
		Persentase Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik	88,58%	41,88	47
		Persentase SD/MI dan yang memiliki Sarpras dalam kondisi baik	100%	0	0

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Persentase SMP/MTs dan yang memiliki Sarpras dalam kondisi baik	100%	0	0
5	Fasilitasi bagi santri dari keluarga tidak mampu di pesantren	Jumlah santri dari keluarga tidak mampu yang memperoleh bantuan	0 Orang	0	0
6	Meningkatnya infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota	persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota	10%	5	50
		Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	65 %	70	107,69
		Persentase ketersediaan angkutan kota	48,76%	48,76	100
		Persentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota	50,69%	50,69	100
		Persentase kendaraan yang telah melakukan uji	90%	100	90
		Proporsi panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	80,6%	50	62
		Proporsi panjang jaringan jalan Lingkungan dalam kondisi baik	100%	22,96	222,96
		Persentase jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	18%	15	83

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Pelaksanaan Pembinaan, Penataan dan Penertiban Parkir Tepijalan di Kota Samarinda	56%	55,80	56
		Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	100%	100	100
		Panjang jalan yang memiliki trotoar	35%	30	85,7
		Rasio Jaringan Irigasi berfungsi dengan baik	1 : 0,43	1:0.43	100,04
		persentase air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	0%	0	0
7	Meningkatnya kapasitas & distribusi air bersih	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100%	100	100
		Pelayanan Air Bersih (SPAM)	100%	100	100
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	100%	81	81
		persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	100%	85	85
		Persentase rumah tangga dengan akses air bersih yang layak	80%	47,36	59,2
8	Tercapainya kebersihan, keindahan & kota ramah lingkungan (taman & RTH)	Cakupan rehabilitasi lahan kritis diluar lahan ex- tambang	1%	0,5	50
		Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	7%	2	28
		Persentase Penyediaan RTH Publik	25%	25	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Persentase Sampah yang terangkut (Penanganan sampah)	64%	62,32	97,38
		Persentase Peningkatan Pengurangan Timbulan Sampah (3R)	5,70 %	4,71	85,63
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara (SPM)	16 usaha	8	50
		Jumlah kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan	0%	0	
		Pemantauan status mutu air (sungai)	Cemar berat		
		Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	40 usaha	32	80
		Persentase kegiatan usaha memiliki ijin pembuangan air limbah	20%	32	160
9	Meningkatnya perekonomian melalui investasi swasta dan pasartradisional	Jumlah pasar daerah yang dikelola	12 Pasar	12	100
		Jumlah pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat	2 Pasar	1	50
		Memperkenalkan produk unggulan daerah ke luar daerah	24 kali	2	8,33
		Terwujudnya pengendalian Inflasi Daerah	4 sidak	3	75
		Jumlah tenaga kerja terserap PMA/PMDN	2.650 orang	2.761	104,18
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100%	0	0

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	0%	0	0
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100%	0	0
		Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	173 perusahaan	192	110,98
		Jumlah investor berskala nasional PMA)	11	13	118,18
		Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN	Rp. 6,500.000.000.000	4.775.501.000.000	73,47
		Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA)	Rp. 2.250.000.000.000	3.214.741.000.000	142,88
		Jumlah peta potensi penanaman modal	0	0	0
		Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan (SPM)	3 kali	0	0
10	Meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM & Koperasi, bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan, serta usaha jasa lainnya	Pembentukan Kawasan Industri di kota samarinda	0%	0	0
		Jumlah pedagang (formal dan informal) yang dibina	60%	22,9	38,16
		Tersedianya laporan tertatanya Pasar dan PKL yang ada di Kota Samarinda	10 laporan	1	10
		Persentase koperasi aktif	79,64 %	80,76	101,41
		Jumlah UMKM yang dibina	100 unit	80	80
		Jumlah Obyek Wisata Unggulan yang menggambarkan kekhasan local	6 obyek	6	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Jumlah produk ekonomi kreatif yang dikembangkan	9 produk	6	66,66
		Komoditi Ekspor Unggulan Daerah	0	0	0
		Produksi pertanian tanaman pangan utama	14.294 Ton	14.000,-	97,92
		Produksi perikanan budidaya	1.297 Ton	1.153	88,89
		Produksi perikanan tangkap	14.822,9 Ton	33.518,9	226,12
		Produksi daging	10.057 Ton	27.850	276,92
		Presentase Keamanan Pangan	85%	85	100
		Penguatan cadangan pangan	333,33%		
		Persentase terlaksananya penyaluran raskin secara tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu dan tepat adminitrasi	15.976 RTS	15.976	100
		Jumlah penduduk yang menjadi peserta melalui JKN	75%	31	41
		Persentase (%) PMKS skala kab/kot yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (SPM)	3,13%	0	0
		Persentase (%) PMKS skala kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (SPM)	20%	0	0
		Jumlah Fakir miskin yangmendapat bantuan tunai bersyarat dan penerima program keluarga harapan	20%	0	0

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Prosentase Penerima Jaminan Sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	20%	0	0
		Prosentase tertangani anak terlantar, bayi terlantar dan anak jalanan	20%	0	0
		Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat	20%	20	100
11	Meningkatnya sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Samarinda (SPM)	90%	90	100
		Persentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (SPM)	100%	100	100
		Tingkat waktu tanggap (response time rate)	100%	100	100
12	Terwujudnya pengembangan seni budaya, peran dan prestasi pemuda, pemasyarakatan olah raga, pemberdayaan masyarakat & perempuan, dan sukses Keluarga Berencana	Jumlah Misi Kesenian (SPM)	5 kali	2	40
		Cakupan Kajian Seni (SPM)	33%	15	45,45
		Cakupan Fasilitasi Seni (SPM)	57%	35	61,40
		Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian (SPM)	57%	40	70,17
		Cakupan Organisasi seni (SPM)	67%	45	67,16
		Cakupan Tempat umum (SPM)	100%	85	85
		Cakupan Gelar Seni (SPM)	100%	85	85
		Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	100	100
		Jumlah tradisi masyarakat yang dilestarikan	5 buah	4	80

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Lapangan olahraga Per 1000 penduduk	503 unit	502	99,80
		Jumlah Cabang Olahraga Prestasi	6 cabang	6	100%
		Jumlah klub olahraga	310 klp	310	100%
		Jumlah organisasi olahraga	64 klp	64	100%
		Jumlah organisasi pemuda	98 klp	98	100%
		Jumlah Wirausahawan Muda	25 orang	26	104
		Presentasi kelembagaan PUG yang aktif	100%	100	100
		Persentase pengelola institusi PUG dan anak yang mengikuti pelatihan	100%	100	100
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	100%	100	100
		persentase kelompok perempuan yang mengikuti prog.Keberdayaan dalam wirausaha guna penguatan ekonomi keluarga	100%	100	100
		Rasio KDRT yang tertangani	100%	100	100
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan (SPM)	100%	169	169
		Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (SPM)	100%	30	30

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (SPM)	100%	169	169
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (SPM)	100%	169	169
		Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (SPM)	100%	169	169
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (SPM)	100%	169	169
		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (SPM)	100%	169	169
		PKK aktif	90%	100	111,11
		Posyandu aktif	90 klp	692	768
		Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	10%	10	100
		Prosentase fasilitasi bagi pemerintah kelurahan dalam peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK) dan posyandu	30%	30	100
		KB Aktif	97.474,00 orang	93.873	96,3
		Laju Pertumbuhan Penduduk	3,38 %	3,8	112,42
		Presentase Pemakaian Kontrasepsi	60,48 %	59,71	98,72

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Jumlah PPKBD	58 klp	59	100
		UPPKS	96,99%	128	95,30
		Jumlah BKB	84,21%	88	82,95
13	Tercapainya stabilitas keamanan & ketertiban iklim kondusif serta yang	Penurunan Angka Kriminalitas	3%	2	66,66
		Persentase Penanganan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	75	75
		Jumlah konflik sosial di masyarakat	60 kasus	50	83,33
		Presentase Ormas, LSM dan OKP yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	0 kp	0	0
14	Meningkatnya pendapatan & pengelolaan keuangan	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	79%	88,84	112,45
		Tingkat kelengkapan dokumen utama perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, KUAP-PPASP)	100%	100	100
		Tingkat Kelengkapan Dokumen Utama Pengendalian dan Evaluasi (evaluasi RPJMD, dan evaluasi RKPD)	100%	100	100
		Rasio realisasi PAD terhadap target PAD	100%	83,39	83,39
15	Terwujudnya pelayanan publik berkualitas, transparan,	Kategori Penilaian laporan kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah kota Samarinda	CC kategori	CC	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	akuntabel dan bebas korupsi	Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Berdasarkan LPPD	ST (sangat tinggi)	ST	100%
		Terbentuknya perubahan kelembagaan dan SOTK	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Persentase unit pelayanan publik yang memiliki nilai Survey Kepuasan Masyarakat baik	10%	30	300
		Jumlah aplikasi e-government di lingkup Pemerintah Kota Samarinda	25 buah	15	60
		Luas tanah yang siap bangun untuk infrastruktur pemeritahan baru	100 ha		

Samarinda, Maret 2017

WALIKOTA SAMARINDA



H.SYAHARIE JA'ANG.SH,MSi



WALIKOTA SAMARINDA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. SYAHARIE JA'ANG, SH, M.Si

Jabatan : WALIKOTA SAMARINDA

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Samarinda, 01 April 2016
WALIKOTA SAMARINDA

H. SYAHARIE JA'ANG, SH, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
1	Terlaksananya pengendalian banjir & relokasi Tepi SKM	Jumlah titik banjir	42 Titik	PU & Penataan ruang
		Persentase Drainase kota dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	55%	
		Drainase lingkungan/permukiman dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	100%	
		Persentase Pembangunan turap di wilayah aliran sungai	10%	
		Persentase kawasan kumuh di tepi DAS Karang Mumus	100%	Perumahan rakyat & kawasan permukiman
		Persentase kawasan kumuh	100%	
		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1 kali/hari/kecamatan	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
		Kegiatan Penegakan hukum lingkungan	25 Kali/tahun	Lingkungan Hidup
Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang	100%	PU & Penataan ruang		
2	Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Sehat dan Kota Bebas Narkoba	Persentase puskesmas memberikan pelayanan sesuai standar termasuk puskesmas rawat inap	10%	Kesehatan
		Persentase kunjungan rujukan di fasyankes strata 2 dan strata 3	100%	Kesehatan
		Persentase tersedianya obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan di puskesmas	100%	Kesehatan
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (SPM)	100%	Kesehatan
		Persentase balita gizi kurang	12%	Kesehatan



	Persentase Ibu hamil mendapat tablet tambah darah (TTD)	80%	Kesehatan
	Cakupan bayi < 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	45%	Kesehatan
	Persentase kelurahan yang mempunyai SOPkseiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah	100%	Kesehatan
	Angka kejadian semua kasus TB (CNR Seluruh Kasus TB per 100.000 penduduk)	100%	Kesehatan
	Cakupan penemuan dan penanganan kasus baru HIV AIDS	50%	Kesehatan
	Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (SPM)	100%	Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4) (SPM)	95%	Kesehatan
	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (SPM)	85%	Kesehatan
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (SPM)	90%	Kesehatan
	Persentase puskesmas yang melakukan kelas ibu hamil (SPM)	78%	Kesehatan
	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (SPM)	90%	Kesehatan
	Cakupan kunjungan bayi (SPM)	80%	Kesehatan
	Cakupan pelayanan anak balita (SPM)	80%	Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan lansia (60+ Th)	70%	Kesehatan
	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	13 Unit	Kesehatan
	Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan pusling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai	90%	Kesehatan



		Jumlah sarana prasarana rumah sakit rujukan yang memenuhi standar	13 Buah	Kesehatan
		Rasio rumah sakit per satuan penduduk	13 Unit	Kesehatan
		Cakupan kelurahan siaga aktif (SPM)	100%	Kesehatan
		Persentase kelurahan siaga aktif mandiri (SPM)	100%	Kesehatan
		Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	55%	Kesehatan
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	100%	Perumahan rakyat & kawasan permukiman
		Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba	30 kasus	Kepemudaan & Olahraga
		Persentase fasyankes institusi penerima wajib lapor (IPWL) pecandu narkoba yang aktif	5%	Kesehatan
3	Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	41,17 %	Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A/SDLB	111,58%	
		Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	98,80%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/SDLB	93,40%	
		Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	67,73%	
		Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	81,69%	
		Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	90,94%	
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	
		Persentase Sekolah SD/MI terakreditasi B dan A.	88,36%	
		Persentase Sekolah SMP/MTs terakreditasi B dan A.	89,74%	
		Angka melek huruf	98,62%	
		Angka rata-rata lama sekolah	10,26 Tahun	
		Angka harapan lama sekolah	14,16 Tahun	



4	Meningkatnya infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota	persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota	10%	PU & Penataan ruang
		Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	65%	Perhubungan
		Persentase ketersediaan angkutan kota	48,76%	Perhubungan
		Persentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota	50,69%	Perhubungan
		Persentase kendaraan yang telah melakukan uji	90%	Perhubungan
		Proporsi panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik	80,6%	PU & Penataan ruang
		Proporsi panjang jaringanjalan Lingkungan dalam kondisi baik	100%	PU & Penataan ruang
		Persentase jalan kondisi rusak yang terehabilitasi	18%	PU & Penataan ruang
		Pelaksanaan Pembinaan, Penataan dan Penertiban Parkir Tepijalan di Kota Samarinda	56 Kali	Perhubungan
		Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	100%	Perumahan rakyat & kawasan permukiman
		Panjang jalan yang memiliki trotoar	35%	
		Rasio Jaringan Irigasi berfungsi dengan baik	1 : 0,43	PU & Penataan ruang
		persentase air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	0%	PU & Penataan ruang
5	Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah	Persentase Ruang kelas SD/MI kondisi baik	78,21%	Pendidikan
		Persentase Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik	88,58%	
		Persentase SD/MI dan yang memiliki Sarpras sesuai standar Nasional	100%	
		Persentase SMP/MTs yang memiliki Sarpras sesuai standar Nasional	100%	



6	Fasilitasi bagi santri dari keluarga yang tidak mampu di pesantren	Jumlah santri dari keluarga tidak mampu yang memperoleh bantuan	0 Orang	Pendidikan
7	Meningkatnya kapasitas & distribusi air bersih	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100%	PU & Penataan ruang
		Pelayanan Air Bersih (SPAM)	100%	PU & Penataan ruang
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	100%	PU & Penataan ruang
		persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	100%	PU & Penataan ruang
		Persentase rumah tangga dengan akses air bersih yang layak	80%	Kesehatan
8	Tercapainya kebersihan, keindahan & kota ramah lingkungan (taman & RTH)	Cakupan rehabilitasi lahan kritis diluar lahan ex- tambang	1%	Kehutanan
		Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	7%	Lingkungan Hidup
		Persentase Penyediaan RTH Publik	25%	Lingkungan Hidup
		Persentase Sampah yang terangkut (Penanganan sampah)	64%	Lingkungan Hidup
		Persentase Peningkatan Pengurangan Timbulan Sampah (3R)	5,70 %	Lingkungan Hidup
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara (SPM)	16 usaha	Lingkungan Hidup
		Jumlah kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan	0%	Perencanaan Pembangunan
		Pemantauan status mutu air (sungai)	Cemar berat	Lingkungan Hidup
		Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	40 usaha	Lingkungan Hidup



		Persentase kegiatan usahamemiliki ijin pembuangan air limbah	20%	PU & Penataan Ruang
9	Meningkatnya perekonomian melalui investasi swasta dan pasartradisional	Jumlah pasar daerah yang dikelola	12 Pasar	Perdagangan
		Jumlah pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat	2 Pasar	Perdagangan
		Memperkenalkan produk unggulan daerah ke luar daerah	24 kali	Bagian Perekonomian
		Terwujudnya pengendalian Inflasi Daerah	4 sidak	Bagian Perekonomian
		Jumlah tenaga kerja terserap PMA/PMDN	2.650 orang	Ketenagakerjaan
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100%	Ketenagakerjaan
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	0%	Ketenagakerjaan
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100%	Ketenagakerjaan
		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	173 perusahaan	Penanaman Modal
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Rp. 6.500.000.000	Penanaman Modal
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)	Rp. 2.250.000.000.000	
		Jumlah Peta Potensi Penanaman Modal	0	
		Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan (SPM)	3 kali	Penanaman Modal
		10	Meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM &Koperasi, bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan,	Pembentukan Kawasan Industri di kota samarinda
Jumlah pedagang (formal dan informal) yang dibina	60%			Perdagangan
Tersedianya laporan tertatanya Pasar dan PKL yang ada di Kota Samarinda	10 laporan			Bagian Perekonomian
Persentase koperasi aktif	79,64 %			Koperasi & UMKM



	Peternakan & Perikanan, serta			
usaha jasa lainnya		Jumlah UMKM yang dibina	100 unit	Koperasi & UMKM
		Jumlah Obyek Wisata Unggulan yang menggambarkan kekhasan lokal	6 obyek	Pariwisata
		Jumlah produk ekonomi kreatif yang dikembangkan	9 produk	Perdagangan
		Komoditi Ekspor Unggulan Daerah	0	Pertanian
		Produksi pertanian tanaman pangan utama	14.294,6 Ton	Pertanian
		Produksi perikanan budidaya	1.297 Ton	Pertanian
		Produksi perikanan tangkap	14.822,9 Ton	Pertanian
		Produksi daging	10.057 Ton	Pertanian
		Presentase Keamanan Pangan	85%	Ketahanan Pangan
		Persentase terlaksananya penyaluran raskin secara tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu dan tepat adminitrasi	15.976 RTS	Bagian Perekonomian
		Jumlah penduduk yang menjadi peserta melalui JKN	75%	Kesehatan
		Persentase (%) PMKS skala kab/kot yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (SPM)	3,13%	Sosial
		Persentase (%) PMKS skala kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (SPM)	20%	Sosial
		Jumlah Fakir miskin yangmendapat bantuan tunai bersyarat dan penerima program keluarga harapan	20%	Sosial
		Prosentase Penerima Jaminan Sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial	20%	Sosial



		Prosentase tertangani anak terlantar, bayi terlantar dan anak jalanan	20%	Sosial
		Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat	20%	Sosial
11	Meningkatnya sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Samarinda (SPM)	90%	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
		Persentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (SPM)	100%	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
		Tingkat waktu tanggap (response time rate)	100%	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
12	Terwujudnya pengembangan seni budaya, peran dan prestasi pemuda, pemasyarakatan olah raga, pemberdayaan masyarakat & perempuan, dan sukses Keluarga Berencana	Jumlah Misi Kesenian (SPM)	5 kali	Kebudayaan
		Cakupan Kajian Seni (SPM)	33%	Kebudayaan
		Cakupan Fasilitas Seni (SPM)	57%	Kebudayaan
		Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian (SPM)	57%	Kebudayaan
		Cakupan Organisasi seni (SPM)	67%	Kebudayaan
		Cakupan Tempat umum (SPM)	100%	Kebudayaan
		Cakupan Gelar Seni (SPM)	100%	Kebudayaan
		Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	Kebudayaan
		Jumlah tradisi masyarakat yang dilestarikan	5 buah	Kebudayaan
		Rasio Lapangan olahraga	503 unit	Kepemudaan & Olahraga
		Jumlah Cabang Olahraga Prestasi	6 cabang	Kepemudaan & Olahraga
Jumlah klub olahraga	310 klp	Kepemudaan & Olahraga		
Jumlah organisasi olahraga	64 klp	Kepemudaan & Olahraga		



	Jumlah organisasi pemuda	98 klp	Kepemudaan & Olahraga
	Jumlah Wirausahawan Muda	25 orang	Kepemudaan & Olahraga
	Presentasi kelembagaan PUG yang aktif	100%	Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
	Persentase pengelola institusi PUG dan anak yang mengikuti pelatihan	100%	Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	100%	Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
	persentase kelompok perempuan yang mengikuti prog.Keberdayaan dalam wirausaha guna penguatan ekonomi keluarga	100%	Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
	Rasio KDRT yang tertangani	100%	Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan (SPM)	100%	Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (SPM)	100%	Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (SPM)	100%	Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (SPM)	100%	Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak



	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (SPM)	100%	Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (SPM)	100%	Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (SPM)	100%	Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
	PKK aktif	90%	Pemberdayaan masyarakat & desa
	Posyandu aktif	90 klp	Pemberdayaan masyarakat & desa
	Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	10%	Pemberdayaan masyarakat & desa
	Prosentase fasilitasi bagi pemerintah kelurahan dalam peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK) dan posyandu	30%	Pemberdayaan masyarakat & desa
	KB Aktif	97.474,00 orang	Pengendalian penduduk & keluarga berencana
	Laju Pertumbuhan Penduduk	3,38 %	Pengendalian penduduk & keluarga berencana
	Presentase Pemakaian Kontrasepsi	60,48 %	Pengendalian penduduk & keluarga berencana
	Jumlah PPKBD	58 Kelompok	Pengendalian penduduk & keluarga berencana



		UPPKS	96,99%	Pengendalian penduduk & keluarga berencana
		Jumlah BKB	84,21%	Pengendalian penduduk & keluarga berencana
13	Tercapainya stabilitas keamanan & ketertiban serta iklim yang kondusif	Penurunan Angka Kriminalitas	3%	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
		Persentase Penanganan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
		Jumlah konflik sosial di masyarakat	60 kasus	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
		Persentase Ormas, LSM dan OKP yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	0 kp	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
14	Meningkatnya pendapatan & pengelolaan keuangan	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	79%	BPKAD
		Tingkat kelengkapan dokumen utama perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, KUAP-PPASP)	100%	Perencanaan Pembangunan
		Tingkat Kelengkapan Dokumen Utama Pengendalian dan Evaluasi (evaluasi RPJMD, dan evaluasi RKPD)	100%	Perencanaan Pembangunan
		Rasio realisasi PAD terhadap target PAD	100%	Dispenda
15	Terwujudnya pelayanan publik	Kategori Penilaian laporan kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah kota Samarinda	CC kategori	Bagian Organisasi



berkualitas, transparan, akuntabel dan bebas korupsi	Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Berdasarkan LPPD	ST (sangat tinggi)	Bagian Pemerintahan Umum
	Terbentuknya perubahan kelembagaan dan SOTK	1 dokumen	Bagian Organisasi
	Persentase unit pelayanan publik yang memiliki nilai Survey Kepuasan Masyarakat baik	10%	Bagian Organisasi
	Jumlah aplikasi e-government di lingkup Pemerintah Kota Samarinda	25 buah	Komunikasi & Informatika
	Luas tanah yang siap bangun untuk infrastruktur pemerintahan baru	100 ha	PU & Penataan ruang

Samarinda, 01 April 2016

WALIKOTA SAMARINDA

H. SYAHARIE JA'ANG, SH, M.Si



Program	Anggaran
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 200.000.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 100.000.000,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 500.000.000,-
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 147.210.000,-
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 950.000.000,-
6. Program pembangunan Jalan Dan Jembatan	Rp 270.000.000,-
7. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	
8. Program Pembangunan turap/talud/ bronjong	
9. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	
10. Program pembangunan sistem informasi data base jalan dan jembatan	
11. Program pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya	
12. Program pengendalian Banjir	
13. Program tanggap darurat jalan dan jembatan	
14. Program peningkatan sarana prasarana kebinamargaan	
15. Program Penyediaan dan pengolahan air baku	
16. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	
17. Program Rehab / Pembangunan Bangunan Gedung Dinas / Kantor	
18. Program Pengaturan Jasa Konstruksi	
19. Program Perencanaan Tata Ruang	
20. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	



21. Program pengembangan Perumahan
22. Program Lingkungan Sehat perumahan
23. Program pengelolaan areal pemakaman
24. Program Pengembangan Data/Informasi
25. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
26. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
27. Program perencanaan bidang
28. sumberdaya manusia
29. Program perencanaan bidang pemerintahan dan aparatur
30. Program perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
31. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
32. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
33. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
34. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
35. Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ
36. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
37. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
38. Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
39. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
40. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
41. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
42. Pengendalian pencemaran Dan perusakan Lingkungan Hidup
43. Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
44. Peningkatan Pengendalian Polusi
45. Program perlindungan konservasi dan sumber daya alam
46. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)



47. Program penataan penguasaan, pemilikan penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
48. Program Penyelesaian Konflik- konflik Pertanahan
49. Program penataan Administrasi Kependudukan
50. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak
51. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
52. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
53. Program Keluarga Berencana
54. Program pelayanan kontrasepsi
55. Program pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
56. Program Pengembangan Pusat pelayanan Informasi Dan Konseling KRR
57. Program penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
58. Program pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
59. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
60. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
61. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
62. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
63. Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil
64. Program pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
65. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma
66. Program pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
67. Program pembinaan Eks penyandang penyakit social (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya)
68. Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
69. Program Pembinaan Anak Terlantar
70. Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
71. Program peningkatan Kesempatan Kerja
72. Program Perlindungan Dan pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan
73. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil menengah Yang Kondusif
74. Program pengembangan sistem Pendukung Usaha bagi Usaha mikro kecil menengah



75. Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
76. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
77. Program peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
78. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
79. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
80. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
81. Program pengembangan Nilai Budaya
82. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
83. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
84. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
85. Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan
86. Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda
87. Program pencegahan penyalahgunaan narkoba
88. Program pembinaan Dan pemasyarakatan Olah Raga
89. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah raga
90. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
91. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
92. Program pemeliharaan Ketrantibnas Dan pencegahan tindak Kriminal
93. Program Pendidikan Politik Masyarakat
94. Program pengembangan wawasan kebangsaan
95. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
96. Program kedaruratan dan logistik
97. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
98. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
99. Program pencegahan dan kesiapsiagaan
100. Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
101. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
102. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
103. Program pembinaan dan pengembangan aparatur



104. Program Program Litbang Bidang SDA dan Teknoogi
105. Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan
106. Program Litbang Bidang Kesra dan Kemasyarakatan
107. Program Litbang Bidang Pemerintahan dan Aparatur
108. Program Penguatan Sistem Inovasi daerah (SiDa)
109. Program Peningkatan Koordinasi
110. dan Kerjasama jejaring kerja Litbang
111. Program Pembentukan jaringan Kediklatan
112. Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH
113. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
114. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
115. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
116. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
117. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
118. Program Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas
119. Program Bina Pembangunan Daerah
120. Penataan Wilayah Adm. Penegasan Batas Daerah dan Toponimi
121. Program Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga
122. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
123. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
124. Program peningkatan kualitas pelayanan publik
125. Program penguatan Ketatalaksanaan
126. Program penguatan Akuntabilitas Kinerja
127. Program penguatan Pengawasan
128. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
129. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
130. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
131. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
132. Program Pengelolaan Aset Daerah



133. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan
134. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
135. Program penyelesaian konflik - konflik pertanahan
136. Program Penataan Daerah otonomi baru
137. Program Menintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
138. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
139. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
140. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelanggaran Disiplin PNS
141. Program Pelatihan Kewirausahaan menjelang masa pensiun bagi anggota Korpri
142. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
143. Program Peningkatan Ketersediaan dan Penguatan Cadangan Pangan
144. Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan
145. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Pengembangan Penyuluh dan Kelompok Tani/Gapoktan
146. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
147. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan
148. Program Penyelamatan Dan pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
149. Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah
150. Program peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa
151. Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
152. Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
153. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
154. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan
155. Program Penyelamatan Dan pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
156. Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah
157. Program peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam membangun Desa
158. Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
159. Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
160. Program pengembangan komunikasi, Informasi Dan Media Massa
161. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi



162. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
163. Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
164. Program pembinaan dan peningkatan kapasitas perpustakaan
165. Program penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan
166. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
167. Program Peningkatan produksi Pertanian/ Perkebunan
168. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
169. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
170. Program Rehabilitasi Hutan & Lahan
171. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
172. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
173. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian
174. Program rehabilitasi hutan dan lahan
175. Program pembinaan Dan pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
176. Program pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan
177. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
178. Program pengembangan Destinasi Pariwisata
179. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
180. Program Pengembangan dan pembinaan pengrajin-pengrajin berbasis ekonomi kreatif.
181. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
182. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (Program Muatan Lokal)
183. Program peningkatan produksi perikanan tangkap
184. Program peningkatan populasi dan produksi peternakan
185. Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD RPH Sapi dan Babi
186. Peningkatan pengawasan Produksi hasil peternakan
187. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan dan Peternakan
188. Program pemberdayaan masyarakat dan pengawasan sumberdaya kelautan
189. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan
190. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan



191. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
192. Program Perlindungan Konsumen Dan pengamanan Perdagangan
193. Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor
194. Program peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri
195. Program peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri
196. Program pengembangan industri Kecil Dan menengah
197. Program Penataan Struktur Industri
198. Program peningkatan sentra IKM

Samarinda, April 2016

WALIKOTA SAMARINDA

H. SYAHARIE JA'ANG, SH, M.Si